



# BPHN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



# 2023

## LAPORAN KEUANGAN BPHN SATKER TAHUNAN (*AUDITED*)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

JL. MAYJEND SUTOYO NO 10 JAKARTA TIMUR 13640



# **Badan Pembinaan Hukum Nasional**

**Laporan Keuangan Tahunan Satuan Kerja**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal

31 Desember 2023

**Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan**

**Jakarta Timur 13640**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaa Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
NIP. 197705092001122001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	46
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	65
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	79



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. May. Jend. Sutoyo-Cililitan No.10 Jakarta Timur

Telp. 021-8091908 Fax 021-8002265 website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati

NIP. 197705092001122001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp58.277.500 atau mencapai 291 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp20.000.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.345.659.738 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar 48.886.291.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp399.790.313.816 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp239.929.556 ; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp398.911.010.607 ; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp639.373.653; Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp715.176.761 dan Rp399.790.313.816

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.324.589 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp49.446.789.440; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp49.433.464.851) Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp26.763.000; dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp49.406.701.351).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp400.237.667.014 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp49.406.701.351 dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp55.740.920 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp48.299.912.312 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp399.075.137.055.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Buletin Teknis SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan sesuai dengan PMK nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN****BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2023		% thd Angg	TAHUN 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	20.000.000	58.277.500	291	10.020.609
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>20.000.000</b>	<b>58.277.500</b>	<b>291</b>	<b>10.020.609</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	17.002.977.000	16.789.330.933	99	16.897.721.259
Belanja Barang	B.4	27.055.368.000	26.759.520.758	99	18.860.311.841
Belanja Modal	B.5	4.827.946.000	4.796.808.047	99	2.579.331.255
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>48.886.291.000</b>	<b>48.345.659.738</b>	<b>99</b>	<b>38.337.364.355</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**



## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

## NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	59.148.730	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(295.744)	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	181.076.570	98.063.299
Persediaan Belum Diregister	C.11	-	-
Jumlah Aset Lancar		239.929.556	98.063.299
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.12	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.14	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.15	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.16	26.605.556.857	24.758.430.869
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.17	-	-
Gedung dan Bangunan	C.18	62.954.462.581	59.683.830.714
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.19	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.20	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.21	1.123.767.442	1.088.776.559
Konstruksi dalam pengerjaan	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.23	(47.938.133.273)	(41.440.019.747)
Aset Tetap yang belum diregister	C.24	-	-
Jumlah Aset Tetap		398.911.010.607	400.256.375.395
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.25	4.234.323.660	4.184.325.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.26	589.375.493	-
Aset Lain-Lain	C.27	430.984.260	853.242.316
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.28	(4.615.309.760)	(5.037.567.816)
Jumlah Aset Lainnya		639.373.653	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>399.790.313.816</b>	<b>400.354.438.694</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.28	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.29	687.628.955	107.413.285
Pendapatan Diterima di Muka	C.30	27.547.806	9.358.395
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.31	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		715.176.761	116.771.680
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>715.176.761</b>	<b>116.771.680</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.32	399.075.137.055	400.237.667.014
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>399.075.137.055</b>	<b>400.237.667.014</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>399.790.313.816</b>	<b>400.354.438.694</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

## BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13.324.589	12.512.140
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>13.324.589</b>	<b>12.512.140</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	16.789.330.933	16.897.721.259
Beban Persediaan	D.3	676.771.180	618.639.650
Beban Barang dan Jasa	D.4	11.793.421.029	9.347.522.200
Beban Pemeliharaan	D.5	3.555.957.901	3.354.965.899
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.629.129.179	5.677.081.468
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	6.001.883.474	5.855.601.849
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	295.744	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>49.446.789.440</b>	<b>41.751.532.325</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(49.433.464.851)</b>	<b>(41.739.020.185)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	26.763.500	50.001.111
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	13.943.009
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>26.763.500</b>	<b>63.944.120</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(49.406.701.351)</b>	<b>(41.675.076.065)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBP	D.12	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(49.406.701.351)</b>	<b>(41.675.076.065)</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

### LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

**31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2023	2022
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	400.237.667.014	403.693.026.368
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(49.406.701.351)	(41.675.076.065)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(55.740.920)	(49.538.524)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.6	(55.740.920)	(49.538.524)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	48.299.912.312	38.269.255.235
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	(1.162.529.959)	(3.455.359.354)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>399.075.137.055</b>	<b>400.237.667.014</b>

## **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional**

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

##### **RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang pembinaan hukum nasional, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
2. Pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan peraturan perundang-undangan, pemantauan dan peninjauan undang-undang, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan dan bantuan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, serta pembinaan penyuluh hukum dan analis hukum;
4. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

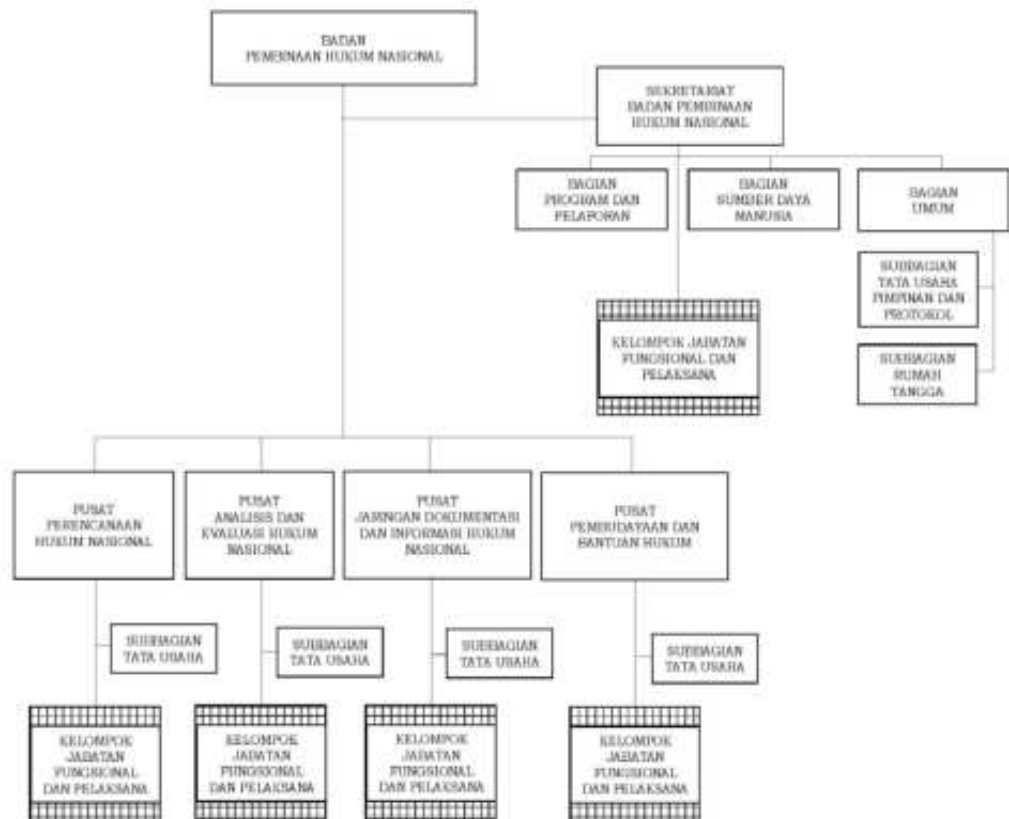
1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretariat Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional;
3. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional;

4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;  
dan
5. Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia :

**“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;

3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdapat pada aplikasi SAKTI pada Modul Persediaan, Modul Aset tetap dan Modul GLP. Modul GLP dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis Akuntansi*

## **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis

akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited.



Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional

antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi

dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset*

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar*

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh

lima juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata

setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*AsetLainnya*

**e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas*

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Berikut adalah tabel rekapitulasi revisi DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester II Tahun Anggaran 2023:

REVISI KE	TANGGAL REVISI	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1	26/12/2022	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-773/AG/AG.5/2022 tanggal 24 Desember 2022 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023 pada Delapan Unit Kemenkumham 2. Nota Dinas Kepala Bagian Pelaporan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-163 Perihal Penyampaian DIPA dan RKA-K/L Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023 Revisi ke-1 ( <i>Automatic Adjustment</i> )	Revisi dalam rangka Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp1.141.371 pada output 1614.EBB akun 533121
2	25/01/2023	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-08 tanggal 26 Januari 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi tanggal 25 Januari 2023	Revisi antar jenis belanja
3	15/02/2023	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-13 tanggal 16 Februari 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi RPD Triwulan I TA 2023	Update RPD Hal III DIPA Triwulan I TA 2023
4	06/03/2023	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-19 tanggal 07 Maret 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Revisi Anggaran DIPA BPHN	Revisi antar output dan KRO
5	21/03/2023	Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-27 tanggal 21 Maret 2023 Perihal penyampaian POK Revisi Pemutakhiran level KPA	Pemutakhiran POK
6	14/04/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-36 tanggal 14 April 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Update RPD Hal III DIPA Triwulan II TA 2023, Revisi dari Belanja Modal ke Belanja Barang
7	31/05/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-46 tanggal 31 Mei 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Revisi antar kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paralegal Justice Awards
8	12/06/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-52 tanggal 12 Juni 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Revisi antar output untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paralegal Justice Awards
9	14/07/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-65 tanggal 14 Juli 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Update RPD Hal III DIPA Triwulan III TA 2023 dan Revisi DIPA
10	01/08/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-72 tanggal 02 Agustus 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Revisi antar output untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HDKD

11	10/08/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-76 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi POK Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Revisi POK
12	24/08/2023	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-379/AG/AG.5/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2. Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-89 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Penyampaian RKA-K/L Unit Hasil Revisi Buka Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023	Buka Blokir Automatic Adjustment TA 2023
	07/09/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-424/AG/AG.5/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Pengesahan usulan revisi pergeseran anggaran antar unit setjen kemenkumham TA 2023	Anggaran Belanja Tambahan dari Sekretraiat Jenderal Kemenkumham sebesar Rp1.694.866.000 guna mendukung kegiatan LDCC
13	26/09/2023	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-90 tanggal 26 September 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Revisi antar output dan KRO
14	02/10/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5880/WPB.12/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Update RPD Hal III DIPA Triwulan IV TA 2023
15	13/10/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-518/AG/AG.5/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Antar Unit Kemenkumham TA 2023	Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai Sebesar Rp550.000.000 dari BPHN ke Sekretariat Jenderal Kemenkumham
16	07/11/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7288/WPB.12/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Revisi untuk mendukung kegiatan RUU PHN di Jember
17	27/11/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7888/WPB.12/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Revisi untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Pembentukan PUU terkait dengan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan UU PHN di Batu Malang
18	08/12/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8695/WPB.12/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Revisi untuk mendukung kegiatan Fasilitasi Pembentukan PUU BPHN di Bali
19	21/12/2023	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9231/WPB.12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Revisi dan Pemutakhiran POK

Berdasarkan tabel di atas, pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Badan Pembinaan Hukum Nasional mendapatkan Anggaran Belanja Tambahan Sebesar Rp1.694.866.000 dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tambahan TA 2023 sebesar Rp1.557.108.000 berupa Belanja Barang dalam rangka Pelaksanaan JDIHN dan LDCC Awards pada kegiatan kehumasan BPHN;
2. Anggaran Belanja Tambahan TA 2023 sebesar Rp137.758.000 berupa Belanja Barang dalam rangka Supervisi Tindak Lanjut Penelitian Pagu Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah TA 2024.

Hal tersebut sesuai dengan dokumen revisi anggaran sebagai berikut:

1. Surat Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-79 tanggal 23 Agustus 2023 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Tambahan (ABT) TA 2023;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-203 tanggal 01 September 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-204 tanggal 01 September 2023 Perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-KU.01.02-206 tanggal 01 September 2023 Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran;
5. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-424/AG/AG.5/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Pengesahan Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Antar Unit Setjen Kemenkumham TA 2023.

Badan Pembinaan Hukum Nasional juga melakukan pergeseran Belanja Pegawai ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebesar Rp550.000.000 sesuai dengan dokumen revisi anggaran sebagai berikut:

1. Surat Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.01-507 Tanggal 25 Agustus 2023 Perihal Inventarisasi Perkiraan Kelebihan Belanja Pegawai BPHN TA 2023;
2. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-KU.01.02-04 Tanggal 03 Oktober 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-225 Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Usulan Revisi Anggaran;
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-226 tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Persetujuan Revisi Anggaran;
5. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hask Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.02-228 Tanggal 10 Oktober 2023 Perihal Penetapan Perubahan Rencana Kerja (RKA) atas Revisi Anggaran;
6. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-518/AG/AG.5/2023 Tanggal 13 Oktober 2023 Perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Antar Unit Kemenkumham TA 2023.

Dokumen revisi anggaran tersedia pada lampiran laporan keuangan ini.

Berikut adalah Tabel perubahan pagu anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun Anggaran 2023:

Uraian	31 Desember 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Pajak	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	20.000.000	20.000.000
Penerimaan Hibah	0	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	17.552.977.000	17.002.977.000
Belanja Barang	22.495.720.000	27.055.368.000
Belanja Modal	7.692.728.000	4.827.946.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>47.741.425.000</b>	<b>48.886.291.000</b>

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 Desember 2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.702.291.000	1.452.291.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	2.737.390.000	2.737.390.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.770.352.000	3.020.352.000
Perencanaan Hukum Nasional	1.597.799.000	1.597.799.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	38.933.593.000	40.078.459.000
<b>Total Belanja</b>	<b>47.741.425.000</b>	<b>48.886.291.000</b>

Sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, bahwa akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi digunakan mulai Semester II Tahun 2023. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional masih terdapat sisa anggaran dan realisasi akun belanja khusus COVID-19 sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah tabel sisa anggaran dan realisasi akun belanja khusus covid-19 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode sampai dengan 31 Desember 2023:

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			KETERANGAN
			BELANJA	%	SISA	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	30.268.000	30.202.573	99,78%	65.427	Sewa langganan aplikasi Zoom
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	722.000	405.000	56,09%	317.000	Biaya Rapid Test/Swab PCR
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>30.990.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>98,77%</b>	<b>382.427</b>	

Terhadap sisa anggaran tersebut sudah dilakukan revisi tetapi sisa anggarannya terlalu kecil sehingga secara satuan tidak dapat memenuhi kebutuhan sedangkan untuk realisasi pada semester

II, tidak dilakukan ralat karena dikhawatirkan akan menurunkan Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023.

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp58.277.500*

### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp58.277.500 atau mencapai 291 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000. Pada Semester II Tahun Anggaran 2023 pendapatan sebesar Rp58.277.500 adalah berupa:

1. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.514.000 berupa Sewa kantin BPHN untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku 1 Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas Sebagian tanah dan atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023;
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.763.500 berupa hasil lelang barang bergerak 1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat sesuai dengan risalah lelang nomor 602/28/2023 tanggal 14 November 2023.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

***Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Per 31 Desember 2023***

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	26.763.500	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	20.000.000	31.514.000	158
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.000.000</b>	<b>58.277.500</b>	<b>291</b>

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

**Perbandingan Realisasi Pendapatan  
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	50.001.111	-100,00
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	26.763.500	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	31.514.000	4.165.000	656,64
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		10.343.009	-100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	3.600.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>58.277.500</b>	<b>68.109.120</b>	<b>-14,44</b>

Realisasi Pendapatan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan periode sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penerimaan kembali belanja pegawai dan barang tahun anggaran yang lalu.

*Realisasi Belanja Negara* **B.2 Belanja**

*Rp48.345.659.738* Realisasi Belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp48.345.659.738 atau 99 persen dari anggaran belanja sebesar Rp48.886.291. Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2023:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA. 2023**

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	17.002.977.000	16.789.330.933	99
Belanja Barang	27.055.368.000	26.759.520.758	99
Belanja Modal	4.827.946.000	4.796.808.047	99
<b>Total Belanja</b>	<b>48.886.291.000</b>	<b>48.345.659.738</b>	<b>99</b>
<b>Jumlah</b>	<b>48.886.291.000</b>	<b>48.345.659.738</b>	<b>99</b>

Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.008.295.383 atau sebesar 26,11% dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran Tahun Anggaran 2023 lebih besar dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel berikut:

***Perbandingan Realisasi Belanja***

***Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	16.789.330.933	16.897.721.259	(0,64)
Belanja Barang	26.759.520.758	18.860.311.841	41,88
Belanja Modal	4.796.808.047	2.579.331.255	85,97
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>48.345.659.738</b>	<b>38.337.364.355</b>	<b>26,11</b>

Sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus COVID-19, bahwa akun khusus COVID-19 hanya digunakan sampai dengan Semester I Tahun 2023 dan tidak lagi digunakan mulai Semester II Tahun 2023. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional masih terdapat sisa anggaran dan realisasi akun belanja khusus COVID-19 sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah tabel sisa anggaran dan realisasi akun belanja khusus covid-19 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode sampai dengan 31 Desember 2023:

AKUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI BELANJA			KETERANGAN
			BELANJA	%	SISA	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	30.268.000	30.202.573	99,78%	65.427	Sewa langganan aplikasi Zoom
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	722.000	405.000	56,09%	317.000	Biaya Rapid Test/Swab PCR
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>30.990.000</b>	<b>30.607.573</b>	<b>98,77%</b>	<b>382.427</b>	



Terhadap sisa anggaran tersebut sudah dilakukan revisi tetapi sisa anggarannya terlalu kecil sehingga secara satuan tidak dapat memenuhi kebutuhan sedangkan untuk realisasi pada semester II, tidak dilakukan ralat karena dikhawatirkan akan menurunkan Nilai IKPA Tahun Anggaran 2023.

*Belanja Pegawai*  
*Rp16.789.330.933*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.789.330.933 dan Rp16.897.721.259. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berikut adalah tabel pagu dan realisasi belanja pegawai DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023:

#### ***Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023***

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.619.682.000	16.418.430.384	98,79
Belanja Lembur	383.295.000	372.998.000	97,31
<b>Total Belanja Pegawai</b>	<b>17.002.977.000</b>	<b>16.791.428.384</b>	<b>98,76</b>
<b>Pengembalian</b>		<b>(2.097.451)</b>	
<b>Belanja Pegawai (Netto)</b>	<b>17.002.977.000</b>	<b>16.789.330.933</b>	<b>98,74</b>

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp2.097.451 yang terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp2.451 melalui potongan SPM;
2. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp540.000 berupa Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Hukum Pertama bulan Maret 2023 a.n Deasy Kamila dikarenakan tugas belajar sesuai dengan NTPN Nomor 792195UDQBTHR824 tanggal 04 Mei 2023;

3. Pengembalian Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp1.000.000 berupa Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Penyelia bulan Februari dan Maret 2023 a.n Dien Shalli dikarenakan cuti melahirkan sesuai dengan NTPN Nomor 2F2D92CNR1K03JGA tanggal 04 Mei 2023;
4. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp555.000 berupa Tunjangan Umum PNS karena dilantik sebagai JFT sebanyak 3 pegawai a.n Alfansyah, Moh. Khomsin dan Sri Indah melalui potongan SPM 00235T/409288/2023 tanggal 04 Mei 2023.

Perbandingan realisasi belanja pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

***Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai***

***Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	16.418.430.384	16.872.026.404	(2,69)
Belanja Lembur	372.998.000	258.850.000	44,10
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>16.791.428.384</b>	<b>17.130.876.404</b>	<b>(1,98)</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.097.451)	(233.155.145)	(99,10)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>16.789.330.933</b>	<b>16.897.721.259</b>	<b>(0,64)</b>

*Belanja Barang*  
*Rp26.759.520.75*  
8

***B.4 Belanja Barang***

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.759.520.758 dan Rp18.860.311.841. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Belanja Barang, khususnya Belanja Barang Persediaan akan mempengaruhi jumlah persediaan di bagian aset lancar pada neraca.

Berikut adalah tabel pagu dan realisasi Belanja Barang DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang  
TA. 2023**

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	4.159.608.000	4.142.377.202	99,59
Belanja Barang Non Operasional	2.946.173.000	2.904.993.132	98,60
Belanja Barang Persediaan	888.553.000	879.917.146	99,03
Belanja Jasa	4.780.578.000	4.773.303.893	99,85
Belanja Pemeliharaan	3.456.985.000	3.435.825.206	99,39
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.823.471.000	10.657.138.117	98,46
<b>Total Belanja Barang</b>	<b>27.055.368.000</b>	<b>26.793.554.696</b>	<b>99,03</b>
<b>Pengembalian</b>		<b>(34.033.938)</b>	
<b>Belanja Barang (Netto)</b>	<b>27.055.368.000</b>	<b>26.759.520.758</b>	<b>98,91</b>

Berdasarkan Tabel di atas, terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp34.033.938 yang terdiri dari:

1. Pengembalian Belanja Jasa Profesi sebesar Rp1.690.000 berupa Pengembalian honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas asesor PMPRB sesuai dengan NTPN Nomor E660B7N8Q0PLASC6 tanggal 13 Februari 2023;
2. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.657.333 berupa selisih biaya tiket pesawat kegiatan perjadin diskusi penyusunan NA di Palembang sesuai dengan NTPN Nomor 5040C6QRA6J8B3D3 tanggal 15 Juni 2023;
3. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp2.122.575 berupa selisih biaya tiket pesawat dan uang penginapan kegiatan perjadin penyusunan NA RUU ke DIY sesuai dengan NTPN Nomor 56C901GAB74TG91L tanggal 15 Juni 2023;
4. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp1.650.000 berupa Pengembalian uang harian kegiatan workshop peningkatan kapasitas asesor PMPRB sesuai dengan NTPN Nomor 5B603520AH2G9MM9 tanggal 13 Februari 2023;
5. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp150.000 berupa Pengembalian Biaya Uang Harian paket meeting fullboard selama 1 hari kegiatan Konsiyering Penyelarasan sesuai dengan NTPN

- Nomor D93E5395AS9MR84F tanggal 16 Juni 2023;
6. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp150.000 berupa Pengembalian uang harian kegiatan konsinyering penyusunan NA RUU Badan Usaha Di Jawa Barat a.n Uci Bayu Kurniawan sesuai dengan NTPN Nomor 6AEF42CNR1NA61PE tanggal 15 Juni 2023;
  7. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp300.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan monev pelaporan keuangan DIPA BPHN di Kanwil NTB a.n Ira Yustisia sesuai NTPN Nomor 5EC86520AHK9TH5J tanggal 11 Agustus 2023;
  8. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp62.000 berupa selisih uang tiket travel kegiatan monev laporan keuangan dan nilai IKPA di Kanwil Jawa Barat a.n Rizky Awaliyah dan Ratna Jamilah sesuai NTPN Nomor 981171GAB7AOBLG5 tanggal 11 Agustus 2023;
  9. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di Jawa Barat a.n Vian Budi dan Andhika Rizki sesuai NTPN Nomor C724A8JM9RTQN4IR tanggal 11 Agustus 2023;
  10. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp32.000 berupa selisih uang penginapan kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN di Jawa Barat a.n Teguh Irawan dan Bangun Asanurjaya sesuai NTPN Nomor D283D45IQN1T3J88 tanggal 11 Agustus 2023;
  11. Pengembalian Honor Narasumber KHN kegiatan penyusunan DPHN karena tidak diperkenankan menerima honor (Narasumber KPK) sebesar Rp4.335.000 sesuai NTPN Nomor 3C8455UFMUL7FA4I tanggal 22 Desember 2023;
  12. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp450.000 berupa selisih biaya penggantian tiket pesawat dan uang harian kegiatan Monev JDIH ke Maluku a.n

- Desyana Berliana sesuai NTPN Nomor 6C2FA2CPNKBVCO0G tanggal 22 Desember 2023;
13. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Pemetaan dan Profilling AH di Sulawesi Selatan sebesar Rp96.840 sesuai NTPN Nomor 7561445KN9GELAHK tanggal 22 Desember 2023;
  14. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan pelaksanaan AEH di Sumatera Barat sebesar Rp5.369.520 sesuai NTPN Nomor 1B6915UFMUL7F9M6 tanggal 22 Desember 2023;
  15. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih Pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan AEH di Jawa Timur sebesar Rp2.187.600 sesuai NTPN Nomor EDA663977EU289UR tanggal 22 Desember 2023;
  16. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa pengembalian selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual kegiatan penyusunan DPHN di NTB sebesar Rp10.585.270 sesuai NTPN Nomor 6D397522742R2A7V tanggal 22 Desember 2023;
  17. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa Pengembalian Selisih Pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan AEH di Jawa Timur sebesar Rp1.633.800 sesuai NTPN Nomor 8EE5C0JUNV6T1AG8 tanggal 22 Desember 2023;
  18. Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa berupa pengembalian selisih pengajuan LS Di Awal dengan Biaya Aktual kegiatan pemetaan dan Profilling AH di Lampung sebesar Rp230.000 sesuai NTPN Nomor 285785UFMUL7FAIA tanggal 22 Desember 2023;
  19. Pengembalian selisih biaya uang harian kegiatan FGD Tim Teknis JDIH di Bogor a.n M.Reyhan Pradipta sebesar Rp300.000 sesuai NTPN Nomor C82242CPNKBVCO3A tanggal 22 Desember 2023.

Perbandingan realisasi belanja barang Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Perbandingan Belanja Barang**  
**Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.142.377.202	3.563.178.816	16,26
Belanja Barang Non Operasional	2.904.993.132	2.516.183.125	15,45
Belanja Barang Persediaan	879.917.146	583.180.152	50,88
Belanja Jasa	4.773.303.893	3.247.770.126	46,97
Belanja Pemeliharaan	3.435.825.206	3.273.888.754	4,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.657.138.117	5.685.923.275	87,43
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>26.793.554.696</b>	<b>18.870.124.248</b>	<b>41,99</b>
Pengembalian Belanja	(34.033.938)	(9.812.407,00)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>26.759.520.758</b>	<b>18.860.311.841</b>	<b>41,88</b>

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.899.208.917 atau 41,88 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022, hal ini dikarenakan pagu anggaran Tahun 2023 lebih besar dibandingkan periode sebelumnya.

*Belanja Modal*  
*Rp4.796.808.047*

**B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.796.808.047 dan Rp2.579.331.255. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 85,97 persen bila dibandingkan dengan periode 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan pagu anggaran Tahun 2023 lebih besar dibandingkan dengan pagu anggaran Tahun 2022.

Berikut tabel perbandingan Realiasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal**

**Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.106.782	2.333.786.913	(40,26)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3.317.712.222	198.746.152	1569,32
Belanja Modal Lainnya	84.989.043	46.798.190	81,61
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>4.796.808.047</b>	<b>2.579.331.255</b>	<b>85,97</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.796.808.047</b>	<b>2.579.331.255</b>	<b>85,97</b>

Berikut adalah tabel Pagu dan Realisasi Belanja Modal DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023:

**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
TA. 2023**

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.698.000	1.394.106.782	99,96
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.348.248.000	3.317.712.222	99,09
Belanja Modal Lainnya	85.000.000	84.989.043	99,99
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>4.827.946.000</b>	<b>4.796.808.047</b>	<b>99,36</b>
<b>Pengembalian</b>		-	
<b>Belanja Modal (Netto)</b>	<b>4.827.946.000</b>	<b>4.796.808.047</b>	<b>99,36</b>

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp4.796.808.047 merupakan Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset pada Neraca, yang berupa:

1. 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak);
2. 4 Unit Televisi (Polytron Smart TV Google PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak);
3. 1 Unit Mesin Pemotong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak);
4. 5 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak);

5. 5 Unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak);
6. 49 Unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak);
7. 7 Unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak);
8. 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak);
9. 5 Unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak);
10. 1 Unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak);
11. 9 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak);
12. Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak);
13. Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak);
14. 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak);
15. Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp198.971.096 (termasuk pajak);
16. Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt.3 Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp47.230.000 (termasuk pajak);
17. 1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.885.400;
- 18.1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.485.999;
19. Pekerjaan Perencanaan Kontruksi Gedung Induk dan Annex Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp42.394.200;
- 20.1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp12.635.608;



21. Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Induk dan Annex Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp77.722.700;
- 22.1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.144.300;
23. Biaya Konsumsi dalam rangka rapat lanjutan pembahasan pengembangan rancangan JKK pada pengelola kegiatan renovasi BPHN sebesar Rp8.992.626;
24. Biaya Konsumsi makan dan snack dalam rangka rapat layanan pengadaan tentang pembahasan konsep awal rancangan JKK BPHN pada Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp22.452.500;
25. Biaya honor tim pengelolaan kegiatan renovasi lt 3 gd annex, ruang kerja pimpinan gd SJDI dan ruang kerja pimpinan gd induk BPHN periode September 2023 sebesar Rp10.700.000;
26. Biaya Pembelian Buku Buku Hukum dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp474.900;
27. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-1 sebesar Rp655.217.750;
28. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan renovasi lt.2 gd.annex, ruang kerja pimpinan gd.SJDI, dan ruang kerja pimpinan gd.induk BPHN sebesar Rp24.845.750;
29. Biaya honor pengangkatan tim pengelola kegaitan renovasi lt.2 gd. annex, ruang kerja pimpinan gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan gd. induk BPHN TA 2023 sebesar Rp12.265.000;
30. Biaya Pembelian Buku - buku hukum (monografi) dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp5.364.676;
31. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-2 sebesar Rp823.469.100;

32. Biaya Pengadaan Ebook JDIHN BPHN TA. 2023 sebesar Rp49.998.160;
33. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 gd annex, ruang kerja pimpinan gd induk BPHN TA 2023 termin 2 (30%) sebesar Rp29.814.900;
34. Pembayaran belanja modal sesuai kontrak PHN.1-PB.02.01-911/2023 tgl 18 Jul 23, BAST PHN.1-PB.02.01-1327/2023 tgl 29 Nov 23, BAP PHN.1-PB.02.01-1350/2023 tgl 1 Des 23. Pengadaan Perencanaan Konstruksi Kgt Renovasi Lt 2 Gedung Annex dan Induk Termin Ke-3 sebesar Rp21.197.100;
35. Biaya konsumsi dan transport lokal pengelola kegiatan renovasi dalam rangka pembahasan progress renovasi BPHN termin II (lanjutan pada kantor BPHN TA 2023) sebesar Rp8.157.000;
36. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-3 sebesar Rp1.266.210.150;
37. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 Gd. annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI, dan ruang kerja pimpinan Gd. induk BPHN sebesar Rp44.722.350;
38. Biaya honor dan konsumsi dalam rangka rapat pembahasan pelaporan progress renovasi gedung kantor BPHN sebesar Rp 23.350.000.

Berikut adalah rincian Realisasi Belanja Modal Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disajikan pada tabel:

**Rincian Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2023**

No	Akun	Nomor SP2D	Nilai SP2D	Keterangan
1	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231391302003250	37.500.000	5 Unit Lemari ES
		231391302003258	19.000.000	4 Unit Televisi
		231391302003272	4.600.000	1 Unit Mesin Pemotong Rumput
		231391303002180	11.445.000	5 Unit Dispenser
		231391303005409	53.000.000	5 Unit Scanner
		231391302008099	677.425.000	49 Unit Laptop
		231391302011461	171.500.000	7 Unit PC
		231391303010130	38.500.000	5 Unit Proyektor
		231391701000537	78.750.000	5 Unit printer
		231391303014069	29.500.000	1 unit Laptop
		231391701000855	20.601.000	9 Unit Dispenser
		231391701000855	139.488.150	Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN
		231391701000855	14.797.632	Pengadaan Peralatan Podcast
		231391701000855	98.000.000	4 Unit Komputer Meja
2	533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	231391302011408	198.971.096	Perbaikan dan Pemasangan Paving Block
		231391701000855	47.230.000	Perbaikan Toilet Lt.3 Kantor BPHN TA 2023
		231391303026247	42.394.200	Pengadaan Perencanaan Konstruksi Gedung Annex dan Induk Kantor BPHN Termin Ke-1
		231391303031523	77.722.700	Perencanaan Konstruksi Gedung Induk dan Annex Kantor BPHN TA. 2023 Termin Ke-2
		231391701001938	31.445.126	Rapat lanjutan pembahasan pengembangan dan rapat layanan pengadaan ttg pembahasan konsep awal rancangan JKK BPHN pada kantor BPHN TA 2023
		231391303041648	10.700.000	Honor tim pengelolaan kegiatan renovasi lt 3 gd annex, ruang kerja pimpinan gd SJD dan ruang kerja pimpinan gd induk BPHN periode September
		231391303042793	655.217.750	Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJD dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-1
		231391701002362	24.845.750	Pengadaan jasa konsultasi pengawasan renovasi lt.2 gd.annex, ruang kerja pimpinan gd.SJDI, dan ruang kerja pimpinan gd.induk BPHN
		231391303046974	12.265.000	Honor pengangkatan tim pengelola kegiatan renovasi lt.2 gd. annex, ruang kerja pimpinan gd. SJD dan ruang kerja pimpinan gd. induk BPHN TA 2023
		231391303048486	823.469.100	Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJD dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-2
		231391701002634	29.814.900	Pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 gd annex, ruang kerja pimpinan gd indk BPHN TA 2023 termin 2 (30%)

		231391303052799	21.197.100	Pengadaan Perencanaan Konstruksi Kgt Renovasi Lt 2 Gedung Annex dan Induk Termin Ke-3
		231391701002854	8.157.000	Biaya konsumsi dan transport lokal pengelola kegiatan renovasi dalam rangka pembahasan progress renovasi BPHN termin II
		231391303054394	1.266.210.150	Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDl dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-3
		231391701004216	68.072.350	Pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 Gd. annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDl, dan ruang kerja pimpinan Gd. induk BPHN serta honor dan konsumsi dalam rangka rapat pembahasan pelaporan progress renovasi gedung kantor BPHN
3	536111 Belanja Modal Lainnya	231391303012041	5.885.400	1 Paket buku buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023
		231391701001076	5.485.999	1 Paket buku buku hukum
		231391303031721	12.635.608	1 Paket buku buku hukum
		231391303036657	5.144.300	1 Paket buku buku hukum
		231391303041648	474.900	1 Paket Buku Buku Hukum
		231391303046974	5.364.676	1 Paket Buku - buku hukum (monografi)
		231391701002634	49.998.160	Ebook JDIHN
<b>JUMLAH</b>		<b>4.796.808.047</b>		

*Belanja Modal Tanah Rp0*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada anggaran atau pun realisasi belanja modal Tanah di Tahun Anggaran 2023.

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.394.106.782*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.394.106.782 dan Rp2.333.786.913. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 40,26 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dikarenakan pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2023 lebih rendah dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja modal peralatan dan mesin periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.394.106.782	2.333.786.913	(40,26)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.394.106.782</b>	<b>2.333.786.913</b>	<b>(40,26)</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.394.106.782</b>	<b>2.333.786.913</b>	<b>(40,26)</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp1.394.106.782 merupakan Pembelian yang akan menambah nilai dan kuantitas Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Neraca, berupa:

1. 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak);
2. 4 Unit Televisi (Polytron Smart TV Google PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak);
3. 1 Unit Mesin Pemotong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak);
4. 5 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak);
5. 5 Unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak);
6. 49 Unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak);
7. 7 Unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak);
8. 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak);
9. 5 Unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak);
10. 1 Unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak);
11. 9 Unit Dispenser (Polytron Dispenser PWC 776) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak);
12. Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak);

13. Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak);
14. 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak);

*Belanja Modal  
Gedung dan  
Bangunan  
Rp3.317.712.222*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.317.712.222 dan Rp198.746.152. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar anggaran belanja modal gedung dan bangunan di Tahun Anggaran 2022 terkena blokir *Automatic Adjustment* sampai dengan akhir tahun anggaran. Berikut adalah tabel perbandingan realisasi belanja Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

#### **Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI 31 DES 2023	REALISASI 31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.317.712.222	198.746.152	1569,32
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>3.317.712.222</b>	<b>198.746.152</b>	<b>1569,32</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.317.712.222</b>	<b>198.746.152</b>	<b>1569,32</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan pada neraca sebesar Rp3.317.712.222. Belanja tersebut berupa:

1. Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp198.971.096 (termasuk pajak);
2. Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt.3 Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp47.230.000 (termasuk pajak);
3. Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Annex dan Induk Kantor BPHN sebesar Rp42.394.200 (termasuk pajak);

4. Pekerjaan Perencanaan Konstruksi Gedung Annex dan Induk Kantor BPHN sebesar Rp77.722.700 (termasuk pajak).
5. Biaya Konsumsi dalam rangka rapat lanjutan pembahasan pengembangan rancangan JKK pada pengelola kegiatan renovasi BPHN sebesar Rp8.992.626;
6. Biaya Konsumsi makan dan snack dalam rangka rapat layanan pengadaan tentang pembahasan konsep awal rancangan JKK BPHN pada Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp22.452.500;
7. Biaya honor tim pengelolaan kegiatan renovasi lt 3 gd annex, ruang kerja pimpinan gd SJDI dan ruang kerja pimpinan gd induk BPHN periode September 2023 sebesar Rp10.700.000;
8. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-1 sebesar Rp655.217.750;
9. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultasi pengawasan renovasi lt.2 gd.annex, ruang kerja pimpinan gd.SJDI, dan ruang kerja pimpinan gd.induk BPHN sebesar Rp24.845.750;
10. Biaya honor pengangkatan tim pengelola kegiatan renovasi lt.2 gd. annex, ruang kerja pimpinan gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan gd. induk BPHN TA 2023 sebesar Rp12.265.000;
11. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-2 sebesar Rp823.469.100;
12. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 gd annex, ruang kerja pimpinan gd indk BPHN TA 2023 termin 2 (30%) sebesar Rp29.814.900;
13. Pembayaran belanja modal sesuai kontrak PHN.1-PB.02.01-911/2023 tanggal 18 Juli 23, BAST PHN.1-PB.02.01-1327/2023 tgl 29 November 23, BAP PHN.1-PB.02.01-1350/2023 tanggal 1 Desember 23. Pengadaan Perencanaan Konstruksi Kgt Renovasi Lt 2 Gedung Annex dan Induk Termin Ke-3 sebesar Rp21.197.100;

14. Biaya konsumsi dan transport lokal pengelola kegiatan renovasi dalam rangka pembahasan progress renovasi BPHN termin II (lanjutan pada kantor BPHN TA 2023) sebesar Rp8.157.000;
15. Pengadaan Konstruksi Fisik Renovasi Lantai 2 Gd. Annex, R. Kerja Pimpinan Gd. SJDI dan R. Kerja Pimpinan Gd. Induk BPHN TA. 2023 Termin Ke-3 sebesar Rp1.266.210.150;
16. Biaya pekerjaan pengadaan jasa konsultan pengawas renovasi lt 2 Gd. annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI, dan ruang kerja pimpinan Gd. induk BPHN sebesar Rp44.722.350;
17. Biaya honor dan konsumsi dalam rangka rapat pembahasan pelaporan progress renovasi gedung kantor BPHN sebesar Rp 23.350.000.

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan Rp0*

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Belanja Modal  
Lainnya  
Rp84.989.043*

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp84.989.043 dan Rp46.798.190. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar 81,61 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan pagu anggaran belanja modal lainnya Tahun Anggaran 2023 lebih besar dibandingkan Pagu Anggaran Tahun 2022.



**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya**  
**Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN JENIS BELANJA	31 DES 2023	31 DES 2022	Naik (Turun) %
Belanja Buku dan Koleksi Perpustakaan (monografi)	84.989.043	46.798.190	81,61
Belanja Penambahan Nilai Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>84.989.043</b>	<b>46.798.190</b>	<b>81,61</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>84.989.043</b>	<b>46.798.190</b>	<b>81,61</b>

Belanja Modal Lainnya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 menambah nilai aset tetap lainnya pada neraca sebesar Rp84.989.043. Belanja tersebut adalah berupa:

1. 1 Paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.885.400;
2. 1 Paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.485.999;
3. 1 Paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp12.635.608;
4. 1 Paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA. 2023 sebesar Rp5.144.300;
5. Biaya Pembelian Buku Buku Hukum dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp474.900;
6. Biaya Pembelian Buku - buku hukum (monografi) dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp5.364.676;
7. Biaya Pengadaan Ebook JDIHN BPHN TA. 2023 sebesar Rp49.998.160.

## C. PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp0*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

#### ***Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran***

#### ***31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

<b>Keterangan</b>	<b>31 DES 2023</b>	<b>31 DES 2022</b>
Saldo UP	Rp -	Rp -
Kwitansi UP belum di SPM-kan	Rp -	Rp -
Saldo TUP	Rp -	
Kuitansi TUP yang belum di SPM-kan	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp0*

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB*  
*Rp59.148.730*

#### **C.4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp59.148.730. dan Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang PNB pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2023 sebesar Rp59.148.730 adalah hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari:

1. Koreksi Beban atas kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

*Bagian Lancar*  
*Tagihan TP/TGR*  
*Rp0*

#### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA  
Rp0*

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelapora

*Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang Lancar  
(Rp295.744)*

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp295.744) dan (Rp0). Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 adalah hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

1. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Beban atas temuan Pengembalian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.342;
2. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402.

*Belanja Dibayar di  
Muka Rp0*

### **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang  
Masih Harus  
Diterima Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp181.076.570*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Masing-masing adalah sebesar Rp181.076.570 dan Rp98.063.299. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

#### ***Rincian Persediaan Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Barang Konsumsi	181.076.570	98.063.299
<b>Jumlah</b>	<b>181.076.570</b>	<b>98.063.299</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-01 tanggal 02 Januari 2024.

*Persediaan Belum  
diregister Rp0*

### **C.11 Persediaan Belum Diregister**

Nilai Persediaan Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### **C.12 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

### **C.13 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
(Rp0)*

### **C.14 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah  
Rp356.165.357.00  
0*

### **C.15 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>356.165.357.000</b>
Mutasi tambah:	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>356.165.357.000</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Tanah Periode 31 Desember 2023**

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	11.348 m2	Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur	356.165.357.000
<b>Jumlah</b>			<b>356.165.357.000</b>

Saldo aset tetap berupa Tanah seluas 11.348 m2 terletak di Jalan Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat Nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

*Peralatan dan  
Mesin*

*Rp26.605.556.857*

**C.16 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp26.605.556.857 dan Rp24.758.430.869 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>24.758.430.869</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.394.106.782
Transfer Masuk	409.738.000
Reklas Masuk	199.771.250
Perolehan Hasil tindak lanjut normalisasi	
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	853.242.316
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset	(430.984.260)
Transfer Keluar	(378.976.850)
Reklas Keluar	(199.771.250)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>26.605.556.857</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22.314.784.270)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>4.290.772.587</b>

Mutasi tambah pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.856.858.348 adalah berasal dari:

1. Transaksi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pembelian sebesar Rp1.394.106.782 yang terdiri dari:
  - a. 5 Unit Lemari ES LG GN-B372PXGB Kulkas 2 Pintu 410 L sebesar Rp37.500.000 (termasuk pajak);
  - b. 4 Unit Televisi (*Polytron Smart TV Google* PLD43UG5959) sebesar Rp19.000.000 (termasuk pajak);
  - c. 1 Unit Mesin Pemotong Rumput (Honda Brushcutter UMR435N) sebesar Rp4.600.000 (termasuk pajak);
  - d. 5 Unit Dispenser (*Polytron Dispenser PWC 776*) sebesar Rp11.445.000 (termasuk pajak);
  - e. 5 Unit Scanner (1 Epson DS1630 Scanner Portable dan 4 Epson Workforce ES-580W) sebesar Rp53.000.000 (termasuk pajak);
  - f. 49 Unit Laptop (Acer Travelmate P214 Core-i5) sebesar Rp677.425.000 (termasuk pajak);
  - g. 7 Unit PC (ACER AIO Veriton Z4) sebesar Rp171.500.000 (termasuk pajak);
  - h. 5 Unit Proyektor (Viewsonic Proyektor VS16909) sebesar Rp38.500.000 (termasuk pajak);
  - i. 5 Unit printer (Epson L15150) sebesar 78.750.000 (termasuk pajak);
  - j. 1 Unit Laptop (Axioo Mybook Pro L7V) sebesar 29.500.000 (termasuk pajak);
  - k. 9 Unit Dispenser (*Polytron Dispenser PWC 776*) sebesar Rp20.601.000 (termasuk pajak);
  - l. Pengadaan Neon Box Tulisan BPHN sebesar Rp139.488.150 (termasuk pajak);
  - m. Pengadaan Peralatan Podcast sebesar Rp14.797.632 (termasuk pajak);
  - n. 4 Unit Komputer Meja Merk Acer Veriton Z4 AIO sebesar Rp98.000.000 (termasuk pajak);
2. Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp853.242.316 yang berupa:



- a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap AC Split sebesar Rp565.570.316 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.03.01-02 tanggal 17 Mei 2022;
  - b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor sebesar Rp9.395.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-07 tanggal 12 Juni 2023;
  - c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Summersible Pump sebesar Rp229.812.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.04.03-05 tanggal 30 Mei 2023;
  - d. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Televisi sebesar Rp48.465.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-03 tanggal 26 Mei 2023.
3. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp199.771.250 yang berupa:
- a. Reklasifikasi Masuk berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah) sebesar Rp168.871.250 sesuai Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023;
  - b. Reklasifikasi Masuk berupa Server sebesar Rp30.900.000 sesuai Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Nomor PHN.1-PB.03.01-52 tanggal 29 November 2023.
4. Transfer Masuk sebesar Rp409.738.000 yang berupa:
- a. 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor PPH.1-PB.05.05-15 tanggal 02 Agustus 2023.
  - b. 10 Buah Laptop sebesar Rp399.750.000 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Berita Acara Nomor HKI.1-PB.02.01-2225 tanggal 02 November 2023.

Mutasi kurang pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.009.732.360 adalah berasal dari:

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp430.984.260 yang berupa:
  - a. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Sepeda motor sebesar Rp107.382.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-02 tanggal 12 Juni 2023;
  - b. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp198.680.260 sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023;
  - c. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN Dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023.
2. Transfer keluar ke kantor wilayah sebesar Rp378.976.850 yang terdiri dari:
  - a. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-03 tanggal 27 Januari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-25 tanggal 11 Mei 2023;
  - b. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-14 tanggal 01 Februari 2023;
  - c. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-13 tanggal

- 01 Februari 2023 dan Berita Acara Serah Terima Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-25 tanggal 17 April 2023;
- d. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-10 tanggal 01 Februari 2023;
  - e. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-03 tanggal 28 Februari 2023;
  - f. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-01 tanggal 27 Januari 2023;
  - g. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa Laptop sebesar Rp11.795.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-04 tanggal 27 Januari 2023;
  - h. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-22 tanggal 13 Maret 2023;
  - i. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-09 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-26 tanggal 05 Mei 2023;
  - j. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi berupa Laptop sebesar Rp11.795.000

- sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-11 tanggal 01 Februari 2023;
- k. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-08 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-21 tanggal 10 Maret 2023;
  - l. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-16 tanggal 16 Februari 2023;
  - m. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-06 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin Nomor PHN.1-PB.03.01-20 tanggal 10 Maret 2023;
  - n. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.770 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-12 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-31 tanggal 26 Mei 2023;
  - o. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp26.592.632 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-15 tanggal 01 Februari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-32 tanggal 12 Juni 2023;
  - p. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan

- Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-02 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-23 tanggal 20 Mei 2023;
- q. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-05 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-24 tanggal 20 Maret 2023;
- r. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berupa Laptop dan Alat Podcast sebesar Rp24.450.768 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-07 tanggal 27 Januari 2023 dan BAST Peralatan dan Mesin (Alat Podcast) Nomor PHN.1-PB.03.01-19 tanggal 28 Februari 2023;
3. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp199.771.250 yang berupa:
- a. Reklasifikasi Keluar Sedan sebesar Rp168.871.250 sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Nomor PHN.1-PB.04.01-09 tanggal 27 Juli 2023.
- b. Reklasifikasi Keluar P.C Unit sebesar Rp30.900.000 sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Barang Milik Negara Nomor PHN.1-PB.03.01-52 tanggal 29 November 2023.

*Peralatan dan  
Mesin Belum  
Diregister  
Rp0*

### **C.17 Peralatan dan Mesin Belum Diregister**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp.62.954.462.58  
1*

### **C.18 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp62.954.462.581 dan

Rp59.683.830.714. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>59.683.830.714</b>
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	246.201.096
Pengembangan Melalui KDP	3.071.511.126
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	179.449.000
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(226.529.355)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>62.954.462.581</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(25.623.349.003)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>37.331.113.578</b>

Mutasi tambah pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.497.161.222 adalah berupa:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang menambah nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp246.201.096 berupa:
  - a. Pekerjaan Perbaikan dan Pemasangan Paving Block Kantor BPHN sebesar Rp198.971.096;
  - b. Pekerjaan Perbaikan Toilet Lt. 3 Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.230.000.
2. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp179.449.000 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Aset Nomor PHN.1-PB.04.01-08 tanggal 27 Juli 2023;
3. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp3.071.511.126 berupa pekerjaan konstruksi Gedung Annex, Gedung SJDI dan Gedung Induk BPHN sesuai dengan Berita Acara Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Nomor PHN.1-PB.04.01-02 Tanggal 15 Januari 2024.

Mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp226.529.355 adalah berupa :

1. Koreksi Pencatatan Pagar Permanen sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan dan Perubahan Nilai Aset Nomor PHN.1-PB.04.01-08 tanggal 27 Juli 2023 sebesar Rp179.449.000;

2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

*Gedung dan  
Bangunan Belum  
Diregister Rp0*

### **C.19 Gedung dan Bangunan Belum Diregister**

Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0 dan Rp0.

*Jalan, Jaringan  
dan Irigasi Rp0*

### **C.20 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	-

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp1.123.767.442*

### **C.21 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.123.767.442 dan Rp1.088.776.559. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>1.088.776.559</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	34.990.883
Mutasi kurang:	
Penghapusan	
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>1.123.767.442</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	0
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>1.123.767.442</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp34.990.883 pada periode 31 Desember 2023 adalah berupa:

1. Pembelian 1 paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.885.400;
2. Pembelian 1 paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.485.999;
3. Pembelian 1 paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.635.608;
4. Pembelian 1 paket buku-buku hukum dalam rangka kegiatan pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.144.300.
5. Biaya Pembelian Buku Buku Hukum dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA.2023 sebesar Rp474.900;
6. Biaya Pembelian Buku - buku hukum (monografi) dalam rangka pengelolaan perpustakaan hukum Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp5.364.676;

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0*

## **C.22 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset



tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(47.939.369.078)*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp47.939.369.078) dan (Rp41.440.019.747). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023:

#### ***Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Periode 31 Desember 2023***

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	356.165.357.000	0	356.165.357.000
2	Peralatan dan Mesin	26.605.556.857	22.314.784.270	4.290.772.587
3	Gedung dan Bangunan	62.954.462.581	25.623.349.003	37.331.113.578
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.123.767.442	0	1.123.767.442
		<b>446.849.143.880</b>	<b>47.938.133.273</b>	<b>398.911.010.607</b>

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp4.234.323.660*

### **C.24 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp4.234.323.660 dan Rp4.184.325.500 Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan *Ebook* JDIHN. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022</b>	<b>4.184.325.500</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	49.998.160
Hibah	-
Reklasifikasi Masuk	-
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>4.234.323.660</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(4.184.325.500)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>49.998.160</b>

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp49.998.160 pada periode 31 Desember 2023 adalah berupa pengadaan *Ebook* JDIHN BPHN TA. 2023.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

#### ***Rincian Aset Tak berwujud periode 31 Desember 2023***

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Software :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya (Ebook JDIHN)	49.998.160
<b>Jumlah</b>	<b>4.234.323.660</b>

*Dana Yang  
Dibatasi  
Penggunaannya  
Rp589.375.493*

#### **C.25 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya**

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp589.375.493 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan

sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun Anggaran).

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp589.375.493 adalah Dana pada rekening penampungan untuk kontrak sebagai berikut:

No.	Nomor SPK dan Nama Pekerjaan	Tanggal pelaksanaan	Nilai Kontrak	Jadwal Batas Pembayaran dan Jumlah			Status Pembayaran
1	PHN.1PB.02.01-07/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 28.220.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 32.055.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
2	PHN.1PB.02.01-06/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 67.740.000	Termin 1	21-Jul-23	Rp 33.870.000	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 33.870.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
3	PHN.1PB.02.01-09/2023 tgl 02 Jan 23 Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 60.876.840	Termin 1	21-Jul-23	Rp 30.438.420	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 30.438.420	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
4	PHN.1PB.02.01-08/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Websserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 63.752.850	Termin 1	21-Jul-23	Rp 31.876.425	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 31.876.425	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
5	PHN.1PB.02.01-01/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 417.600.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 104.400.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
6	PHN.1PB.02.01-23/2023 tgl 01 Mar 23 Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023	01 Mar s/d 31 Des 23	Rp 17.170.201	Termin 1	22-Jun-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 2	20-Sep-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 3	31-Dec-23	Rp 46.868.079	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
7	PHN.1PB.02.01-246/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 318.470.150	Termin 1	20-Dec-23	Rp 159.235.075	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 159.235.075	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
8	PHN.1PB.02.01-247/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 166.873.176	Termin 1	20-Dec-23	Rp 83.436.588	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 83.436.588	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
9	PHN.1PB.02.01-248/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 50.955.224	Termin 1	20-Dec-23	Rp 25.477.612	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 25.477.612	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
10	PHN.1PB.02.01-249/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 83.436.588	Termin 1	20-Dec-23	Rp 41.718.294	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 41.718.294	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 589.375.493</b>	

## C.26 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp430.984.260 dan Rp853.242.316. Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan yang berada dalam kondisi rusak berat sehingga tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan akan diajukan untuk proses penghapusan dari BMN. Berikut adalah rincian Aset lain-lain bila disajikan dalam tabel:

<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>853.242.316</b>
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	430.984.260
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN karena penjualan	-
Reklasifikasi ke Aset Tetap	(853.242.316)
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>430.984.260</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(430.984.260)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2023</b>	<b>-</b>

Mutasi tambah sebesar Rp430.984.260 adalah penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang adalah berupa:

- a. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa 5 Unit sepeda motor sebesar Rp107.382.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-02 tanggal 12 Juni 2023;
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Micro Bus (Penumpang 15 s.d 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023;
- c. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp198.680.260 sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.03.01-51 tanggal 29 November 2023.

Mutasi kurang sebesar Rp853.242.316 adalah berupa penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan aktif, yang terdiri dari:

- a. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap AC Split sebesar Rp565.570.316 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.03.01-02 tanggal 17 Mei 2022;
- b. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Sepeda Motor sebesar Rp9.395.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-07 tanggal 12 Juni 2023;
- c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Summersible Pump sebesar Rp229.812.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.04.03-05 tanggal 30 Mei 2023;
- d. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Televisi sebesar Rp48.465.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN1-PB.04.03-03 tanggal 26 Mei 2023.

Berikut adalah tabel rincian Aset Lain-lain pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2023:

**Rincian Aset Lain-Lain Periode 31 Desember 2023**

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3020104001	Sepeda Motor	Unit	5	107.382.000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	124.922.000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	198.680.260
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>	<b>430.984.260</b>

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp4.615.309.760)*

**C.27 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing (Rp4.615.309.760) dan (Rp5.037.567.816). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset

Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Tak Berwujud Lainnya	49.998.160	-	49.998.160
<b>Jumlah</b>	<b>4.234.323.660</b>	<b>(4.184.325.500)</b>	<b>49.998.160</b>
Aset Lain-lain	430.984.260	(430.984.260)	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.665.307.920</b>	<b>(4.615.309.760)</b>	<b>49.998.160</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

**C.28 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Berikut adalah tabel uang muka dari KPPN periode 30 September 2023:

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo UP	Rp -	Rp -
Kuitansi UP belum di SPM-kan	Rp -	Rp -
Saldo TUP	Rp -	
Kuitansi TUP yang belum di SPM-kan	Rp -	Rp -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp -</b>

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp687.628.955*

**C.29 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp687.628.955 dan Rp107.413.285. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan

kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp107.413.285 telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2023.

Berikut adalah Tabel pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2022 dengan nomor ID 547100163555	67.159.197	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303000195
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2022 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079	39.189.068	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303000195
3	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2022	1.065.020	Dibayarkan pada tanggal 06 Februari 2023 sesuai SP2D Nomor 231391303001082
<b>Jumlah Total</b>		<b>107.413.285</b>	

Pada 31 Desember 2023 terdapat saldo Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp687.628.955 dengan rincian sebagai berikut:

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	589.375.493	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024
		59.552.282	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555
		37.728.322	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079
		972.858	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023
<b>Jumlah</b>		<b>687.628.955</b>	

*Utang Yang Belum  
Ditagihkan  
Rp0*

### **C.30 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan utang akrual saat Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pihak ketiga.



Pengakuan hutang ini dicatat oleh Satker dengan dokumen sumber BAST.

*Pendapatan  
Diterima di Muka  
Rp27.547.806*

### **C.31 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.547.806 dan Rp9.358.395. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima Di Muka pada Periode 31 Desember sebesar Rp27.547.806 adalah Pendapatan atas sewa kantin BPHN tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-PB.03.01-34 Tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000 dan sudah diakui sebagai pendapatan sewa periode berjalan untuk waktu 3 Bulan (Oktober s.d Desember 2023) sebesar Rp3.966.194.

*Beban yang  
Masih Harus  
Dibayar Rp0*

### **C.32 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

*Ekuitas  
Rp399.062.128.61  
9*

### **C.33 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp399.062.128.619 dan Rp400.237.667.014. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan PNB*

*Rp13.324.589*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.324.589 dan Rp12.514.140. Berikut adalah perbandingan rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

#### ***Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak***

#### ***Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

URAIAN	31 DES 2023	31 DES 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13.324.589	12.512.140	6,49
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	-
<b>Jumlah</b>	<b>13.324.589</b>	<b>12.512.140</b>	<b>6,49</b>

Pendapatan LO sebesar Rp13.324.589 pada Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berupa:

1. Pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Periode berjalan sebesar Rp9.358.395 (Januari s.d September 2023) atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2021 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 September 2023 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2021 sebesar Rp24.990.000.
2. Pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Periode berjalan sebesar Rp3.966.194 (Oktober s.d Desember 2023) atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2023 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku 1 Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas Sebagian tanah dan atau bangunan pada Badan Pembinaan

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000.

*Beban Pegawai  
Rp16.789.330.933*

## **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp16.789.330.933 dan Rp16.897.721.259. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berikut adalah rincian Beban Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022:

### **Rincian Beban Pegawai Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

<b>URAIAN</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Gaji Pokok PNS	10.999.399.080	11.016.042.260	-0,15
Beban Pembulatan Gaji PNS	168.399	173.563	(2,98)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	719.599.160	722.330.890	-0,38
Beban Tunj. Anak PNS	188.884.068	198.491.572	-4,84
Beban Tunj. Struktural PNS	354.430.000	666.630.000	-46,83
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.830.928.000	1.383.689.000	32,32
Beban Tunj. PPh PNS	83.116.726	86.033.294	-3,39
Beban Tunj. Beras PNS	563.065.500	579.649.680	-2,86
Beban Uang Makan PNS	1.529.887.000	1.785.186.000	-14,30
Beban Tunjangan Umum PNS	146.855.000	200.645.000	-26,81
Beban Uang Lembur	372.998.000	258.850.000	44
<b>Jumlah</b>	<b>16.789.330.933</b>	<b>16.897.721.259</b>	<b>-0,64</b>

*Beban Persediaan*  
*Rp676.771.180*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp676.771.180 dan Rp618.639.650. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Berikut adalah rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

***Rincian Beban Persediaan***  
***Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

<b>URAIAN</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Persediaan Konsumsi	676.771.180	618.639.650	9,40
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>676.771.180</b>	<b>618.639.650</b>	<b>9,40</b>

*Beban Barang dan  
Jasa*  
*Rp11.805.489.404*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp11.805.489.404 dan Rp9.347.522.200. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Berikut adalah Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa**  
**Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.922.710.129	3.229.591.875	21,46
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.049.500	5.042.000	79,48
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160.392.000	200.640.000	(20,06)
Beban Barang Operasional Lainnya	20.023.000	0	100,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30.202.573	127.904.941	(76,39)
Beban Bahan	1.979.221.134	1.763.952.052	12,20
Beban Honor Output Kegiatan	453.592.000	381.142.500	19,01
Beban Barang Non Operasional Lainnya	472.179.998	370.445.473	27,46
Beban Langganan Listrik	1.307.505.965	1.114.944.297	17,27
Beban Langganan Telepon	13.421.744	13.502.300	(0,60)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434.755.870	399.600.000	8,80
Beban Sewa	1.320.698.000	1.112.240.000	18,74
Beban Jasa Profesi	481.975.000	365.672.500	31,81
Beban Jasa Lainnya	1.199.357.491	22.300.000	5278,28
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	405.000	240.544.262	(99,83)
<b>Jumlah</b>	<b>11.805.489.404</b>	<b>9.347.522.200</b>	<b>26,30</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp3.555.957.901*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.555.957.901 dan Rp3.354.965.965.899. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.875.672.589	1.857.508.466	0,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.526.107.812	1.379.620.333	10,62
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	154.177.500	117.837.100	30,84
Beban Persediaan suku Cadang	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.555.957.901</b>	<b>3.354.965.899</b>	<b>5,99</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp10.629.129.179*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.629.129.179 dan Rp5.677.081.468. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### **Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022**

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	5.525.613.440	3.378.073.614	63,57
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	577.711.357	352.670.000	63,81
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.076.839.676	386.444.000	437,42
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.448.964.706	1.559.893.854	57,00
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.629.129.179</b>	<b>5.677.081.468</b>	<b>87,23</b>

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp0*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi  
Rp6.003.119.279*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.003.119.279 dan Rp5.855.601.849. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### ***Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

<b>URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2022</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.916.497.334	1.891.952.316	1,30
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.086.621.945	3.960.849.533	3,18
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>6.003.119.279</b>	<b>5.852.801.849</b>	<b>2,57</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-	2.800.000	(100,00)
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>2.800.000</b>	<b>(100,00)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>6.003.119.279</b>	<b>5.855.601.849</b>	<b>2,52</b>

Terdapat perbedaan nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Operasional dengan Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel sebesar Rp55.740.920. Pada Laporan Operasional, nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp4.086.621.945 sedangkan pada Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel adalah sebesar Rp4.142.362.865 hal ini dikarenakan adanya koreksi pencatatan pagar batas permanen dan koreksi Nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen BPHN yang menyebabkan adanya Penyusutan Transaksional sebesar Rp55.740.920.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih (Rp0)*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp0) dan (Rp0). Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

##### ***Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Jangka Panjang - Tunjangan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp26.763.500*

#### **D.11 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

##### ***Rincian Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	26.763.500	0	0,00
Pendapatan dari Pemindahtangann BMN Lainnya	0	50.001.111	0,00
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.343.009	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3.600.000	0,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>26.763.500</b>	<b>63.944.120</b>	<b>(58,15)</b>



Surplus dari kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2023 adalah Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp26.763.500 yang berupa hasil lelang 1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat sesuai dengan Risalah Lelang Nomor: 602/28/2023 tanggal 14 November 2023.

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

#### **D.12 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp400.237.667.0  
14*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 01 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp400.237.667.014 dan Rp403.693.026.368.

*Defisit LO  
(Rp49.419.709.78  
7)*

#### **E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp49.419.709.787) dan (Rp41.675.076.065). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak  
Kumulatif  
Perubahan  
Kebijakan  
Akuntansi/Kesal  
ahan Mendasar  
Rp0*

#### **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Penyesuaian Nilai  
Aset  
Rp0*

### **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan Rp0*

### **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0*

### **E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Selisih Revaluasi  
Aset Tetap Rp0*

### **E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Aset Tetap  
Non Revaluasi  
(Rp55.740.920)*

### **E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp(55.740.920) dan Rp (49.538.524). Pada periode 31 Desember 2023 terdapat saldo Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi sebesar (Rp55.740.920) berupa Penyusutan Transaksional atas koreksi pencatatan pagar batas permanen

dan koreksi Nilai bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen BPHN. Berikut adalah Tabel rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi:

**Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi  
per 31 Desember 2023**

No	Uraian	Nilai
1	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	(179.449.000)
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen	76.302.780
3	Koreksi Pencatatan Pagar Permanen	179.449.000
4	Koreksi Pencatatan Pagar Permanen	(20.561.860)
	<b>Jumlah</b>	<b>55.740.920</b>

*Koreksi Lain-Lain  
(Rp0)*

**E.3.7 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

**Rincian Koreksi Lain-Lain**

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	-

*Transaksi Antar  
Entitas  
Rp48.299.912.312*

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp48.299.912.312 dan Rp38.269.255.235. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Berikut adalah tabel rincian transaksi antar entitas periode 31 Desember 2023:

**Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas**

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Diterima dari Entitas Lain	(58.277.500)
Ditagihkan ke Entitas Lain	48.345.659.738
Transfer Masuk	349.781.250
Transfer Keluar	(337.251.176)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>48.299.912.312</b>

**E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023 adalah Rp58.277.500, dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL)  
Periode 31 Desember 2023**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai</b>
Setoran Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 31.514.000
Setoran Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp 535.270
Setoran Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 26.763.500
Setoran Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	Rp (535.270)
	<b>Rp 58.277.500</b>

Sedangkan DKEL sebesar Rp48.345.659.738 berupa transaksi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

**Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)  
Periode 31 Desember 2023**

<b>Akun</b>	<b>Uraian</b>	<b>Transaksi belanja</b>
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 16.418.430.384
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp (2.097.451)
5122	Belanja Lembur	Rp 372.998.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 4.142.377.202
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 2.904.993.132
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	Rp -
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 879.917.146
5221	Belanja Jasa	Rp 4.773.303.893
5211	Pengembalian Belanja Jasa	Rp (6.025.000)
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 3.435.825.206
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 10.657.138.117
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp (28.008.938)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 1.394.106.782
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 3.317.712.222
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 84.989.043
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 48.345.659.738</b>

#### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Pada Periode 31 Desember 2023 Saldo Transfer Masuk Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebesar Rp349.781.250 yang berupa:

- a. Transfer Masuk dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 sesuai Berita Acara Transfer Keluar BMN Nomor PPH.1-PB.05.05-15 tanggal 02 Agustus 2023 dengan penyusutan transfer masuk sebesar (Rp9.988.000).
- b. Transfer Masuk dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 10 buah Laptop sebesar Rp399.750.000 sesuai Berita Acara Nomor HKI.1-PB.02.01-2225 tanggal 02 November 2023 dengan penyusutan transfer masuk sebesar (Rp49.968.750).

Berikut adalah Tabel Rincian Transfer Masuk pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2023:

<b>Transfer Masuk</b>	<b>Nilai</b>
Peralatan dan Mesin	409.738.000
Penyusutan Transfer Masuk (Peralatan dan mesin)	(59.956.750)
<b>Jumlah</b>	<b>349.781.250</b>

Pada periode 31 Desember 2023 terdapat transfer keluar sebesar Rp337.251.176 berupa transfer peralatan dan mesin beserta akumulasi penyusutannya ke kantor wilayah. Berikut adalah Tabel rincian transfer keluar pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode 31 Desember 2023:

No	Transfer Keluar	Nama Satker Penerima	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	24.450.768
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	- 2.739.952
3	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	11.795.000
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	- 1.474.375
5	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	24.450.768
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	- 2.739.952
7	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	11.795.000
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	- 1.474.375
9	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	24.450.768
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	- 2.739.952
11	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	11.795.000
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	- 1.474.375
13	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	11.795.000
14	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	- 1.474.375
15	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	24.450.768
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	- 2.739.952
17	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	24.450.768
18	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	- 2.739.952
19	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	11.795.000
20	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	- 1.474.375
21	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	24.450.768
22	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	- 2.739.952
23	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	24.450.768
24	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	- 2.739.952
25	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	24.450.768
26	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	- 2.739.952
27	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA	24.450.770
28	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA	- 2.739.952
29	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	26.592.632
30	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	- 1.474.375
31	Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	24.450.768
32	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	- 2.739.952
33	Peralatan dan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN	24.450.768
34	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN	- 2.739.952
35	Peralatan dan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI	24.450.768
36	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI	- 2.739.952
<b>JUMLAH</b>			<b>337.251.176</b>

### E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

*Ekuitas Akhir*  
*Rp399.062.128.6*  
*19*

### E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp399.062.128.619 dan Rp400.237.667.014.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. Pada tanggal 02 Januari 2023 telah dilakukan jurnal balik atas jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka pada akhir tahun 2022 sebesar Rp9.358.395 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp67.159.197 sesuai SP2D nomor 231391303000195 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp39.189.068 sesuai SP2D nomor 231391303000195 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
4. Pada tanggal 06 Februari 2023 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp1.065.020 sesuai SP2D nomor 231391303001082 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
5. Terdapat Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp687.628.955 berupa Belanja Yang Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 98.253.462 dan Utang kepada pihak lainnya sebesar Rp589.375.493 yang sudah dibuatkan jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Desember 2023. Berikut adalah rincian Utang kepada pihak lainnya periode 31 Desember 2023:

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	589.375.493	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024
		59.552.282	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555
		37.728.322	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079
		972.858	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023
<b>Jumlah</b>		<b>687.628.955</b>	

6. Pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka diakhir Desember 2023 atas Sewa Kantin BPHN Tahun 2023 yang bernilai Rp31.514.000 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku 1 Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan surat perjanjian sewa atas Sebagian tanah dan atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.1-PB.03.01-34 tanggal 12 September 2023 sebesar Rp27.547.806;
7. Pada tanggal 31 Desember 2023 pada Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp589.375.493 yang merupakan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dalam hal ini adalah Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang merupakan rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada Tahun Anggaran). Saldo Dana



Yang Dibatasi Penggunaannya pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp589.375.493 adalah Dana pada rekening penampungan untuk kontrak sebagai berikut:

No.	Nomor SPK dan Nama Pekerjaan	Tanggal pelaksanaan	Nilai Kontrak	Jadwal Batas Pembayaran dan Jumlah			Status Pembayaran
1	PHN.1PB.02.01-07/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 28.220.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 32.055.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
2	PHN.1PB.02.01-06/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 67.740.000	Termin 1	21-Jul-23	Rp 33.870.000	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 33.870.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
3	PHN.1PB.02.01-09/2023 tgl 02 Jan 23 Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 60.876.840	Termin 1	21-Jul-23	Rp 30.438.420	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 30.438.420	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
4	PHN.1PB.02.01-08/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Websver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 63.752.850	Termin 1	21-Jul-23	Rp 31.876.425	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 31.876.425	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
5	PHN.1PB.02.01-01/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 417.600.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 104.400.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
6	PHN.1PB.02.01-213/2023 tgl 01 Mar 23 Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses pernyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023	01 Mar s/d 31 Des 23	Rp 17.170.201	Termin 1	22-Jun-23	Rp 35.151061	SP2D
				Termin 2	20-Sep-23	Rp 35.151061	SP2D
				Termin 3	31-Dec-23	Rp 46.868.079	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
7	PHN.1PB.02.01-1246/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 318.470.150	Termin 1	20-Dec-23	Rp 159.235.075	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 159.235.075	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
8	PHN.1PB.02.01-1247/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 166.873.176	Termin 1	20-Dec-23	Rp 83.436.588	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 83.436.588	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
9	PHN.1PB.02.01-1248/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 50.955.224	Termin 1	20-Dec-23	Rp 25.477.612	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 25.477.612	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
10	PHN.1PB.02.01-1249/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 83.436.588	Termin 1	20-Dec-23	Rp 41.718.294	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 41.718.294	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-012024
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 589.375.493</b>	

Atas pencatatan BAST RPATA untuk kontrak tersebut, menghasilkan saldo Utang Yang Belum ditagihkan pada neraca sebesar Rp589.375.493 yang kemudian dilakukan

Jurnal Penyesuaian sehingga menghasilkan Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan nilai yang sama.

8. Terdapat belanja modal pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp 4.796.808.047, belanja modal tersebut berupa belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp1.394.106.782, belanja modal Penambahan Nilai Gedung dan bangunan sebesar Rp3.317.712.222 dan belanja modal lainnya sebesar Rp84.989.043. Belanja modal yang terealisasi tersebut mempengaruhi penambahan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya serta aset tak berwujud pada Neraca sebesar Rp5.249.827.253. Dengan demikian terdapat selisih antara belanja modal dalam LRA dengan kenaikan jumlah aset pada neraca sebesar Rp453.019.206.

Hal ini disebabkan karena adanya:

- a. Penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp853.242.316 berupa Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan (Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap);
- b. Penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Reklasifikasi Masuk Mini Bus dan Server sebesar Rp199.771.250;
- c. Penambahan nilai peralatan dan mesin berupa Transfer Masuk sebesar Rp409.738.000 yang terdiri dari 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 10 buah Laptop sebesar Rp399.750.000 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. Pengurangan nilai peralatan dan mesin sebesar (Rp430.984.260) berupa Penghentian Aset dari Penggunaan;
- e. Pengurangan nilai peralatan dan mesin berupa Reklasifikasi Keluar Sedan dan P.C Unit sebesar (Rp199.771.250);

- f. Pengurangan nilai peralatan dan mesin berupa Transfer keluar peralatan dan mesin (Laptop dan Alat Podcast) ke Kantor Wilayah sebesar (Rp378.976.850).

Berikut adalah selisih belanja modal pada LRA dan penambahan nilai aset pada neraca yang disajikan dalam tabel:

No	Keterangan	Belanja Modal	Penambahan pada Neraca	Selisih	Penjelasan
1	Peralatan dan Mesin	1.394.106.782	1.847.125.988	453.019.206	1. Mutasi bertambah peralatan dan mesin sebesar Rp853.242.316 berupa Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan (Reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap) 2. Mutasi bertambah berupa Reklasifikasi Masuk sebesar Rp199.771.250 berupa Mini Bus Penumpang 14 Orang Ke Bawah sebesar Rp168.871.250 dan Server sebesar Rp30.900.000 3. Mutasi bertambah berupa Transfer Masuk Sebesar Rp409.738.000 berupa 1 buah Meja Rapat sebesar Rp9.988.000 dari Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 10 buah Laptop sebesar Rp399.750.000 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Mutasi berkurang peralatan dan mesin sebesar (Rp430.984.260) berupa Penghentian Aset dari Penggunaan 4. Mutasi berkurang Transfer keluar peralatan dan mesin (Laptop dan Alat Podcast) ke Kantor Wilayah sebesar (Rp378.976.850) 5. Mutasi berkurang berupa Reklasifikasi Keluar sebesar (Rp199.771.250) berupa Sedan sebesar (Rp168.871.250) dan P.C Unit sebesar (Rp30.900.000)
2	Gedung dan Bangunan	3.317.712.222	3.317.712.222	-	-
3	Aset tetap lainnya	34.990.883	34.990.883	-	-
4	Aset tak berwujud	49.998.160	49.998.160	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4.796.808.047</b>	<b>5.249.827.253</b>	<b>453.019.206</b>	

9. Telah dilakukan jurnal atas Koreksi kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355 (memo penyesuaian terlampir);
10. Telah dilakukan jurnal atas Koreksi kelebihan / selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375 (memo penyesuaian terlampir).

### **F.3 Tindak Lanjut Temuan**

Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai berikut :

1. Terdapat kelebihan / selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
2. Terdapat kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah dilakukan penyetoran ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355;

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN

# LAPORAN KEUANGAN



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013  
**ESELON I** : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10  
**SATUAN KERJA** : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 409288

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:53 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>48,886,291,000</b>	<b>48,345,659,738</b>	<b>(540,631,262)</b>	<b>99</b>	<b>38,946,171,000</b>	<b>38,337,364,355</b>	<b>(608,806,645)</b>	<b>98</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
I GUSTI PUTU MILAWATI  
197705092001122001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 409288

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 07/05/24 10:59 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500	0	26,763,500	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	20,000,000	31,514,000	0	31,514,000	157.57
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39
	JUMLAH PENDAPATAN	20,000,000	58,277,500	0	58,277,500	291.39

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 409288  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 07/05/24 10:57 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,305,140,000	11,003,117,000	10,999,399,080	0	10,999,399,080	99.97	3,717,920
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	177,000	170,850	2,451	168,399	96.53	8,601
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	729,500,000	719,599,160	0	719,599,160	98.64	9,900,840
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	198,000,000	188,884,068	0	188,884,068	95.4	9,115,932
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	361,648,000	354,430,000	0	354,430,000	98	7,218,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,845,500,000	1,832,468,000	1,540,000	1,830,928,000	99.29	14,572,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	87,500,000	83,116,726	0	83,116,726	94.99	4,383,274
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	568,000,000	563,065,500	0	563,065,500	99.13	4,934,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,673,040,000	1,529,887,000	0	1,529,887,000	91.44	143,153,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	153,200,000	147,410,000	555,000	146,855,000	96.22	6,345,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111</b>	<b>17,097,697,000</b>	<b>16,619,682,000</b>	<b>16,418,430,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,416,332,933</b>	<b>98.79</b>	<b>203,349,067</b>
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	383,295,000	372,998,000	0	372,998,000	97.31	10,297,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122</b>	<b>455,280,000</b>	<b>383,295,000</b>	<b>372,998,000</b>	<b>0</b>	<b>372,998,000</b>	<b>97.31</b>	<b>10,297,000</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51</b>	<b>17,552,977,000</b>	<b>17,002,977,000</b>	<b>16,791,428,384</b>	<b>2,097,451</b>	<b>16,789,330,933</b>	<b>98.76</b>	<b>213,646,067</b>
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,084,906,000	3,933,297,000	3,922,710,129	0	3,922,710,129	99.73	10,586,871
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,529,000	9,131,000	9,049,500	0	9,049,500	99.11	81,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	200,640,000	165,792,000	160,392,000	0	160,392,000	96.74	5,400,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	23,010,000	21,120,000	20,023,000	0	20,023,000	94.81	1,097,000
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>3,377,825,000</b>	<b>4,159,608,000</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>0</b>	<b>4,142,377,202</b>	<b>99.59</b>	<b>17,230,798</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,034,808,000	2,015,479,000	1,979,221,134	0	1,979,221,134	98.2	36,257,866
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	538,630,000	454,944,000	453,592,000	0	453,592,000	99.7	1,352,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	429,882,000	475,750,000	472,179,998	0	472,179,998	99.25	3,570,002
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>3,003,320,000</b>	<b>2,946,173,000</b>	<b>2,904,993,132</b>	<b>0</b>	<b>2,904,993,132</b>	<b>98.6</b>	<b>41,179,868</b>
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	568,149,000	783,553,000	776,275,800	0	776,275,800	99.07	7,277,200
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	105,000,000	103,641,346	0	103,641,346	98.71	1,358,654
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100  
**SATUAN KERJA** : 409288  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**DKI JAKARTA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 07/05/24 10:57 AM  
 Halaman : 2  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	685,649,000	888,553,000	879,917,146	0	879,917,146	99.03	8,635,854
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,430,400,000	1,316,580,000	1,316,573,626	0	1,316,573,626	100	6,374
522112	Belanja Langganan Telepon	42,000,000	13,596,000	13,513,906	0	13,513,906	99.4	82,094
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	439,500,000	435,096,000	434,755,870	0	434,755,870	99.92	340,130
522141	Belanja Sewa	1,135,100,000	1,326,038,000	1,320,698,000	0	1,320,698,000	99.6	5,340,000
522151	Belanja Jasa Profesi	676,700,000	488,400,000	488,000,000	6,025,000	481,975,000	99.92	6,425,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	167,278,000	1,200,146,000	1,199,357,491	0	1,199,357,491	99.93	788,509
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	247,295,000	722,000	405,000	0	405,000	56.09	317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,138,273,000	4,780,578,000	4,773,303,893	6,025,000	4,767,278,893	99.85	13,299,107
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,156,293,000	1,875,867,000	1,875,672,589	0	1,875,672,589	99.99	194,411
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	34,055,000	34,055,000	34,044,805	0	34,044,805	99.97	10,195
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,295,494,000	1,547,063,000	1,526,107,812	0	1,526,107,812	98.65	20,955,188
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,485,842,000	3,456,985,000	3,435,825,206	0	3,435,825,206	99.39	21,159,794
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,870,061,000	5,627,743,000	5,551,372,378	25,758,938	5,525,613,440	98.64	102,129,560
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	551,060,000	602,940,000	577,711,357	0	577,711,357	95.82	25,228,643
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	433,270,000	2,077,684,000	2,076,839,676	0	2,076,839,676	99.96	844,324
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,780,420,000	2,515,104,000	2,451,214,706	2,250,000	2,448,964,706	97.46	66,139,294
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	8,634,811,000	10,823,471,000	10,657,138,117	28,008,938	10,629,129,179	98.46	194,341,821
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	170,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	22,495,720,000	27,055,368,000	26,793,554,696	34,033,938	26,759,520,758	99.03	295,847,242
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,840,728,000	1,394,698,000	1,394,106,782	0	1,394,106,782	99.96	591,218
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,840,728,000	1,394,698,000	1,394,106,782	0	1,394,106,782	99.96	591,218
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	5,812,000,000	3,348,248,000	3,317,712,222	0	3,317,712,222	99.09	30,535,778
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	5,812,000,000	3,348,248,000	3,317,712,222	0	3,317,712,222	99.09	30,535,778
5361	Belanja Modal Lainnya							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**ESELON I** : 10 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100 **DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA** : 409288 **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 07/05/24 10:57 AM  
 Halaman : 3  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_satker  
 Tgl Data : 7/5/24 7:41 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
536111	Belanja Modal Lainnya	40,000,000	85,000,000	84,989,043	0	84,989,043	99.99	10,957
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	40,000,000	85,000,000	84,989,043	0	84,989,043	99.99	10,957
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	7,692,728,000	4,827,946,000	4,796,808,047	0	4,796,808,047	99.36	31,137,953
	JUMLAH BELANJA	47,741,425,000	48,886,291,000	48,381,791,127	36,131,389	48,345,659,738	98.97	540,631,262

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10  
**WILAYAH/PROVINSI** : null  
**SATUAN KERJA** : 409288  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**BA(013) ES1(10) DKI JAKARTA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 07/05/24 10:57 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --rekon17  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	17,500,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	247,295,000	722,000	405,000	0	405,000	56.09	317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	247,295,000	722,000	405,000	0	405,000	56.09	317,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	331,535,000	30,990,000	30,607,573	0	30,607,573	98.77	382,427
	JUMLAH BELANJA	331,535,000	30,990,000	30,607,573	0	30,607,573	98.77	382,427

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:53 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	59,148,730	0	59,148,730	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(295,744)	0	(295,744)	0.00
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>58,852,986</b>	<b>0</b>	<b>58,852,986</b>	<b>0.00</b>
Persediaan	181,076,570	98,063,299	83,013,271	84.65
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>239,929,556</b>	<b>98,063,299</b>	<b>141,866,257</b>	<b>144.67</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	356,165,357,000	356,165,357,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	26,605,556,857	24,758,430,869	1,847,125,988	7.46
Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	59,683,830,714	3,270,631,867	5.48
Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	1,088,776,559	34,990,883	3.21
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>	<b>(47,938,133,273)</b>	<b>(41,440,019,747)</b>	<b>(6,498,113,526)</b>	<b>15.68</b>
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>398,911,010,607</b>	<b>400,256,375,395</b>	<b>(1,345,364,788)</b>	<b>(0.34)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	4,234,323,660	4,184,325,500	49,998,160	1.19
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	589,375,493	0	589,375,493	0.00
Aset Lain-lain	430,984,260	853,242,316	(422,258,056)	(49.49)
<b>AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA</b>	<b>(4,615,309,760)</b>	<b>(5,037,567,816)</b>	<b>422,258,056</b>	<b>(8.38)</b>
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>639,373,653</b>	<b>0</b>	<b>639,373,653</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>399,790,313,816</b>	<b>400,354,438,694</b>	<b>(564,124,878)</b>	<b>(0.14)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	687,628,955	107,413,285	580,215,670	540.17
Pendapatan Diterima Dimuka	27,547,806	9,358,395	18,189,411	194.36
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>715,176,761</b>	<b>116,771,680</b>	<b>598,405,081</b>	<b>512.46</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>715,176,761</b>	<b>116,771,680</b>	<b>598,405,081</b>	<b>512.46</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	(0.29)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>399,075,137,055</b>	<b>400,237,667,014</b>	<b>(1,162,529,959)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>399,075,137,055</b>	<b>400,237,667,014</b>	<b>(1,162,529,959)</b>	<b>(0.29)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>399,790,313,816</b>	<b>400,354,438,694</b>	<b>(564,124,878)</b>	<b>(0.14)</b>

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORGANISASI** : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA** : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:53 AM  
Halaman : 2

lap\_neraca\_satker\_komparatif

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh  
**I GUSTI PUTU MILAWATI**  
197705092001122001

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 10  
WILAYAH/PROVINSI : 0100  
SATUAN KERJA : 409288

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
DKI JAKARTA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl. Cetak 07/05/2024 11:01 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	98,063,299	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	19,957,797,804
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	21,482,221,943
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,242,316	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	853,242,316
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	107,413,285
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	9,358,395
0.0	391111	Ekuitas	0	400,237,667,014
<b>JUMLAH</b>			<b>446,832,026,257</b>	<b>446,832,026,257</b>



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 10:53 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,148,730	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,744
0.0	117111	Barang Konsumsi	181,076,570	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,314,784,270
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	25,623,349,003
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	589,375,493	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	430,984,260
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	98,253,462
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	589,375,493
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	27,547,806
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	48,345,659,738
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	58,277,500	0
0.0	313211	Transfer Keluar	337,251,176	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	349,781,250
0.0	391111	Ekuitas	0	400,237,667,014
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	55,740,920	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	13,324,589
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,999,399,080	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	168,399	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	719,599,160	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	188,884,068	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	354,430,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,830,928,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	83,116,726	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	563,065,500	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,529,887,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	146,855,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	372,998,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,910,641,754	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 10:53 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,049,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	160,392,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	20,023,000	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,202,573	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,979,221,134	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	453,592,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	472,179,998	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,307,505,965	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	13,421,744	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434,755,870	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,320,698,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	481,975,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,199,357,491	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,875,672,589	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,526,107,812	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,525,613,440	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	577,711,357	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,076,839,676	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,448,964,706	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,916,497,334	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4,085,386,140	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	676,771,180	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	154,177,500	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	295,744	0
<b>JUMLAH</b>			<b>502,242,111,629</b>	<b>502,242,111,629</b>

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



Dilandatangani secara elektronik oleh

I GUSTI PUTU MILAWATI

197705092001122001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 10:55 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	48,345,659,738
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	58,277,500	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	26,763,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	31,514,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,999,399,080	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	170,850	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	719,599,160	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	188,884,068	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	354,430,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,832,468,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	83,116,726	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	563,065,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,529,887,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	147,410,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	372,998,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,922,710,129	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,049,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	160,392,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	20,023,000	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	30,202,573	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,979,221,134	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	453,592,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	472,179,998	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	776,275,800	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	103,641,346	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,316,573,626	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	13,513,906	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	434,755,870	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,320,698,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	488,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	1,199,357,491	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	405,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,875,672,589	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34,044,805	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,526,107,812	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,551,372,378	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	577,711,357	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,076,839,676	0

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:55 AM  
Halaman : 2  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,451,214,706	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,394,106,782	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	3,317,712,222	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	84,989,043	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	2,451
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,540,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	555,000
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	6,025,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	25,758,938
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	2,250,000
JUMLAH			48,440,068,627	48,440,068,627

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I GUSTI PUTU MILAWATI  
197705092001122001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:51 AM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	13,324,589	12,512,140	812,449	6.493
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	13,324,589	12,512,140	812,449	6.493
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	13,324,589	12,512,140	812,449	6.493
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,789,330,933	16,897,721,259	(108,390,326)	(0.641)
Beban Persediaan	676,771,180	618,639,650	58,131,530	9.397
Beban Barang dan Jasa	11,793,421,029	9,347,522,200	2,445,898,829	26.166
Beban Pemeliharaan	3,555,957,901	3,354,965,899	200,992,002	5.991
Beban Perjalanan Dinas	10,629,129,179	5,677,081,468	4,952,047,711	87.229
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**UNIT ORGANISASI** : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA** : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:51 AM  
Halaman : 2  
lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,001,883,474	5,855,601,849	146,281,625	2.498
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	295,744	0	295,744	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>49,446,789,440</b>	<b>41,751,532,325</b>	<b>7,695,257,115</b>	<b>18.431</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(49,433,464,851)</b>	<b>(41,739,020,185)</b>	<b>(7,694,444,666)</b>	<b>18.435</b>
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	26,763,500	50,001,111	(23,237,611)	(46.474)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	26,763,500	50,001,111	(23,237,611)	(46.474)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	13,943,009	(13,943,009)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	13,943,009	(13,943,009)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>26,763,500</b>	<b>63,944,120</b>	<b>(37,180,620)</b>	<b>(58.145)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(49,406,701,351)</b>	<b>(41,675,076,065)</b>	<b>(7,731,625,286)</b>	<b>18.552</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(49,406,701,351)</b>	<b>(41,675,076,065)</b>	<b>(7,731,625,286)</b>	<b>18.552</b>

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I GUSTI PUTU MILAWATI  
197705092001122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 013 ) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UNIT ORGANISASI : ( 10 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 409288 ) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 10:52 AM  
Halaman : 1  
lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	400,237,667,014	403,693,026,368	(3,455,359,354)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(49,406,701,351)	(41,675,076,065)	(7,731,625,286)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(55,740,920)	(49,538,524)	(6,202,396)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(55,740,920)	(49,538,524)	(6,202,396)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	48,299,912,312	38,269,255,235	10,030,657,077	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,162,529,959)	(3,455,359,354)	2,292,829,395	-
EKUITAS AKHIR	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	-

Keterangan :

FINAL



JAKARTA, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I GUSTI PUTU MILAWATI  
197705092001122001





# LAMPIRAN

## LAPORAN BARANG MILIK NEGARA



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2023(SALDO AWAL)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB** : 013                      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB** : 409288                **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tanggal : 08/05/24 11:21 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_sawal\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	98,063,299
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	24,758,430,869
133111	Gedung dan Bangunan	59,683,830,714
135121	Aset Tetap Lainnya	1,088,776,559
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(19,957,797,804)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(21,482,221,943)
162151	Software	4,184,325,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	853,242,316
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(853,242,316)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
<b>J U M L A H</b>		<b>400,354,438,694</b>

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB** : 013                      **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB** : 409288                **BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 08/05/24 11:18 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	181,076,570
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,314,784,270)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(25,623,349,003)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(430,984,260)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
<b>J U M L A H</b>		<b>399,142,085,337</b>



Jakarta, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 15/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 15/05/24 8:18 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_sedia\_satker

Kode	Uraian	Jumlah
<b>117111</b>	<b>Barang Konsumsi</b>	
1010301001	Alat Tulis	5,417,400
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	107,800
1010301003	Penjepit Kertas	97,500
1010301004	Penghapus/Korektor	148,600
1010301005	Buku Tulis	21,436,000
1010301006	Ordner Dan Map	44,782,000
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	538,400
1010301010	Alat Perekat	697,400
1010301012	Staples	424,000
1010301013	Isi Staples	371,250
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	1,014,900
1010302001	Kertas HVS	17,741,500
1010302002	Berbagai Kertas	2,771,000
1010302004	Amplop	1,260,600
1010304004	Tinta/Toner Printer	25,517,000
1010304006	USB/Flash Disk	2,008,000
1010304010	Mouse	560,000
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	567,000
1010306010	Batu Baterai	1,121,000
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	2,945,217
1010314002	Obat Padat (Barang Konsumsi)	11,293,516
1010314004	Obat Serbuk/Tepung (Barang Konsumsi)	27,500
1010314005	Obat Gel/ Salep (Barang Konsumsi)	645,503
1010314999	Obat Lainnya (Barang Konsumsi)	4,423,484
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	35,160,000
<b>Jumlah Barang Konsumsi</b>		<b>181,076,570</b>
<b>TOTAL</b>		<b>181,076,570</b>

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 409288**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:19 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>3,593</b>	<b>24,758,430,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>3,728</b>	<b>26,605,556,857</b>
30103	ALAT BANTU	-	18	2,105,854,500	1	229,812,000	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	35	5,719,454,450	2	178,266,250	8	599,855,510	29	5,297,865,190
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	-	922	2,272,569,895	6	177,988,150	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,721	4,823,291,573	84	731,966,948	13	166,666,850	1,792	5,388,591,671
30601	ALAT STUDIO	-	133	2,579,580,592	0	0	0	0	133	2,579,580,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	59	423,081,420	0	0	0	0	59	423,081,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	402	5,332,443,956	71	1,376,175,000	19	243,210,000	454	6,465,408,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	252	1,086,720,029	11	162,650,000	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>19</b>	<b>59,683,830,714</b>	<b>0</b>	<b>3,497,161,222</b>	<b>1</b>	<b>226,529,355</b>	<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	59,504,381,714	0	3,497,161,222	0	47,080,355	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	179,449,000	0	0	1	179,449,000	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>27,080</b>	<b>1,088,776,559</b>	<b>256</b>	<b>34,990,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,080	1,088,776,559	256	34,990,883	0	0	27,336	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>
30103	ALAT BANTU	-	1	229,812,000	0	0	1	229,812,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	9,395,000	7	430,984,260	1	9,395,000	7	430,984,260
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	58	614,035,316	0	0	58	614,035,316	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>442,549,637,458</b>		<b>6,819,994,713</b>		<b>2,089,504,031</b>		<b>447,280,128,140</b>



Jakarta, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 409288**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM  
Tgl Cetak : 14/05/24 9:01 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>309</b>	<b>126,584,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309</b>	<b>126,584,000</b>
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	201	106,231,000	0	0	0	0	201	106,231,000
30601	ALAT STUDIO	-	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
<b>TOTAL</b>				<b>126,584,000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>126,584,000</b>

Jakarta, 31 Desember 2023  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 409288**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 14/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 14/05/24 9:02 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>3,902</b>	<b>24,885,014,869</b>	<b>175</b>	<b>2,856,858,348</b>	<b>40</b>	<b>1,009,732,360</b>	<b>4,037</b>	<b>26,732,140,857</b>
30103	ALAT BANTU	-	18	2,105,854,500	1	229,812,000	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	35	5,719,454,450	2	178,266,250	8	599,855,510	29	5,297,865,190
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	-	922	2,272,569,895	6	177,988,150	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,922	4,929,522,573	84	731,966,948	13	166,666,850	1,993	5,494,822,671
30601	ALAT STUDIO	-	141	2,581,340,592	0	0	0	0	141	2,581,340,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	149	440,948,420	0	0	0	0	149	440,948,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	22	16,649,160	0	0	0	0	22	16,649,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	402	5,332,443,956	71	1,376,175,000	19	243,210,000	454	6,465,408,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	252	1,086,720,029	11	162,650,000	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>19</b>	<b>59,683,830,714</b>	<b>0</b>	<b>3,497,161,222</b>	<b>1</b>	<b>226,529,355</b>	<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	59,504,381,714	0	3,497,161,222	0	47,080,355	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	179,449,000	0	0	1	179,449,000	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>27,080</b>	<b>1,088,776,559</b>	<b>256</b>	<b>34,990,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,080	1,088,776,559	256	34,990,883	0	0	27,336	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>60</b>	<b>853,242,316</b>	<b>7</b>	<b>430,984,260</b>
30103	ALAT BANTU	-	1	229,812,000	0	0	1	229,812,000	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	1	9,395,000	7	430,984,260	1	9,395,000	7	430,984,260
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	58	614,035,316	0	0	58	614,035,316	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>442,676,221,458</b>		<b>6,819,994,713</b>		<b>2,089,504,031</b>		<b>447,406,712,140</b>





Jakarta, 14 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 11:19 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>11,348</b>	<b>356,165,357,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356,165,357,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	356,165,357,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>3,728</b>	<b>26,605,556,857</b>	<b>(19,957,797,804)</b>	<b>(2,356,986,466)</b>	<b>0</b>	<b>(22,314,784,270)</b>	<b>4,290,772,587</b>
30103	ALAT BANTU	-	19	2,335,666,500	(2,065,059,857)	(257,008,429)	0	(2,322,068,286)	13,598,214
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	29	5,297,865,190	(4,588,858,021)	227,153,546	0	(4,361,704,475)	936,160,715
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	3,241,700	(2,695,275)	(258,170)	0	(2,953,445)	288,255
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	2	10,380,492	(10,380,492)	0	0	(10,380,492)	0
30303	ALAT UKUR	-	3	4,507,972	(4,507,972)	0	0	(4,507,972)	0
30501	ALAT KANTOR	-	928	2,450,558,045	(2,118,188,075)	(89,979,477)	0	(2,208,167,552)	242,390,493
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,792	5,388,591,671	(3,461,552,293)	(1,034,355,623)	0	(4,495,907,916)	892,683,755
30601	ALAT STUDIO	-	133	2,579,580,592	(2,137,072,711)	(126,375,508)	0	(2,263,448,219)	316,132,373
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	59	423,081,420	(398,316,420)	(9,642,000)	0	(407,958,420)	15,123,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	12	15,923,160	(15,572,502)	(350,658)	0	(15,923,160)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	330,083,510	(298,893,746)	(9,153,892)	0	(308,047,638)	22,035,872
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1	26,125,000	(6,531,250)	(3,265,625)	0	(9,796,875)	16,328,125
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	1	2,195,000	(2,195,000)	0	0	(2,195,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	454	6,465,408,956	(3,891,380,644)	(909,039,312)	0	(4,800,419,956)	1,664,989,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	263	1,249,370,029	(937,445,529)	(140,881,715)	0	(1,078,327,244)	171,042,785
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	22,977,620	(19,148,017)	(3,829,603)	0	(22,977,620)	0
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>18</b>	<b>62,954,462,581</b>	<b>(21,482,221,943)</b>	<b>(4,141,127,060)</b>	<b>0</b>	<b>(25,623,349,003)</b>	<b>37,331,113,578</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	18	62,954,462,581	(21,461,660,083)	(4,161,688,920)	0	(25,623,349,003)	37,331,113,578
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	0	0	(20,561,860)	20,561,860	0	0	0
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>27,336</b>	<b>1,123,767,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,123,767,442</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	27,336	1,123,767,442	0	0	0	0	1,123,767,442
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>7</b>	<b>430,984,260</b>	<b>(853,242,316)</b>	<b>422,258,056</b>	<b>0</b>	<b>(430,984,260)</b>	<b>0</b>
30103	ALAT BANTU	-	0	0	(229,812,000)	229,812,000	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	7	430,984,260	(9,395,000)	(421,589,260)	0	(430,984,260)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(614,035,316)	614,035,316	0	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>42,437</b>	<b>447,280,128,140</b>	<b>(42,293,262,063)</b>	<b>(6,075,855,470)</b>	<b>0</b>	<b>(48,369,117,533)</b>	<b>398,911,010,607</b>



Jakarta, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati

197705092001122001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 14/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 14/05/24 8:58 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		309	126,584,000	(101,562,400)	(19,967,800)	0	(121,530,200)	5,053,800
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	201	106,231,000	(81,354,600)	(19,895,200)	0	(101,249,800)	4,981,200
30601	ALAT STUDIO	-	8	1,760,000	(1,760,000)	0	0	(1,760,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	90	17,867,000	(17,867,000)	0	0	(17,867,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	10	726,000	(580,800)	(72,600)	0	(653,400)	72,600
<b>JUMLAH</b>			<b>309</b>	<b>126,584,000</b>	<b>(101,562,400)</b>	<b>(19,967,800)</b>	<b>0</b>	<b>(121,530,200)</b>	<b>5,053,800</b>



Jakarta, 14 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 013**  
**UAKPB : 409288**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 14/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 14/05/24 9:02 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_atb\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>162151</b>	<b>Software</b>		<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4,184,325,500</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
<b>162191</b>	<b>Aset Tak Berwujud Lainnya</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>49,998,160</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	0	0	519	49,998,160	0	0	519	49,998,160
<b>TOTAL</b>				<b>4,184,325,500</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>		<b>4,234,323,660</b>

Jakarta, 14 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001



**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Tgl Data : 14/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 14/05/24 8:59 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	519	49,998,160	0	0	0	0	49,998,160
<b>JUMLAH</b>			<b>525</b>	<b>4,234,323,660</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(4,184,325,500)</b>	<b>49,998,160</b>

Jakarta, 14 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001



**DAFTAR BARANG BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 15-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_bpyb  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 15 MEI 2024  
PENANGGUNG JAWAB UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati  
NIP. 197705092001122001

**DAFTAR BMN HILANG YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 15-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dbh  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 15 MEI 2024  
PENANGGUNG JAWAB UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati  
NIP. 197705092001122001



**DAFTAR BMN HIBAH DK/TP YANG SUDAH DIUSULKAN KE PENGELOLA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

NAMA UAKPB : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KODE UAKPB : 409288

TANGGAL : 15-05-2024  
Kode LAP : daftar\_bmn\_dhdktp  
HALAMAN : 1 dari 1

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	IDENTITAS BARANG			RUPIAH
				MERK/TIPE	NO DOKUMEN	TGL DOK	
Tidak ada data							
JUMLAH							

JAKARTA, 15 MEI 2024  
PENANGGUNG JAWAB UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati  
NIP. 197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
131111 Tanah

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
Halaman : 1 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	M2	11,348	356,165,357,000	11,348	356,165,357,000	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>356,165,357,000</b>		<b>356,165,357,000</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 2 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010302001	Elevator /Lift		2	1,490,098,000	2	1,490,098,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,490,098,000	2	1,490,098,000	0	0
3010303003	Stationary Compressor		1	3,210,000	1	3,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	3,210,000	1	3,210,000	0	0
3010304002	Portable Generating Set		1	4,042,500	1	4,042,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	4,042,500	1	4,042,500	0	0
3010304003	Stationary Generating Set		3	114,416,000	3	114,416,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	114,416,000	3	114,416,000	0	0
3010305002	Portable Water Pump		5	126,665,000	5	126,665,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	5	126,665,000	5	126,665,000	0	0
3010305003	Stationary Water Pump		4	129,748,000	4	129,748,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	129,748,000	4	129,748,000	0	0
3010305005	Sumersible Pump		3	467,487,000	3	467,487,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	237,675,000	2	237,675,000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Unit	1	229,812,000	1	229,812,000	0	0
3020101001	Sedan		6	1,383,372,700	6	1,383,372,700	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	7	1,552,243,950	7	1,552,243,950	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Unit	(1)	(168,871,250)	(1)	(168,871,250)	0	0
3020101002	Jeep		2	849,150,000	2	849,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	849,150,000	2	849,150,000	0	0
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )		1	250,000,000	1	250,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	374,922,000	2	374,922,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 3 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Unit	(1)	(124,922,000)	(1)	(124,922,000)	0	0
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		13	2,495,212,490	13	2,495,212,490	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	13	2,525,021,500	13	2,525,021,500	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	Unit	1	168,871,250	1	168,871,250	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Unit	(1)	(198,680,260)	(1)	(198,680,260)	0	0
3020104001	Sepeda Motor		6	88,992,500	6	88,992,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	10	186,979,500	10	186,979,500	0	0
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Unit	(5)	(107,382,000)	(5)	(107,382,000)	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Unit	1	9,395,000	1	9,395,000	0	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya		1	231,137,500	1	231,137,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	231,137,500	1	231,137,500	0	0
3030103001	Battery Charge		3	1,921,700	3	1,921,700	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	1,921,700	3	1,921,700	0	0
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet		2	1,320,000	2	1,320,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,320,000	2	1,320,000	0	0
3030205001	Tool Kit Set		1	5,506,969	1	5,506,969	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,506,969	1	5,506,969	0	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK		1	4,873,523	1	4,873,523	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,873,523	1	4,873,523	0	0
3030301064	Memori Programmer		2	2,417,972	2	2,417,972	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,417,972	2	2,417,972	0	0
3030308012	Termometer Standar		1	2,090,000	1	2,090,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 4 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbtn\_satker

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,090,000	1	2,090,000	0	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)		6	9,546,000	6	9,546,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	9,546,000	6	9,546,000	0	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik		2	3,940,000	2	3,940,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,940,000	2	3,940,000	0	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik		14	21,126,980	14	21,126,980	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	14	21,126,980	14	21,126,980	0	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio		5	234,200,000	5	234,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	234,200,000	5	234,200,000	0	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio		2	74,800,000	2	74,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	74,800,000	2	74,800,000	0	0
3050104001	Lemari Besi/Metal		87	161,964,500	87	161,964,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	87	161,964,500	87	161,964,500	0	0
3050104002	Lemari Kayu		56	114,759,000	56	114,759,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	56	114,759,000	56	114,759,000	0	0
3050104003	Rak Besi		278	334,819,890	278	334,819,890	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	278	334,819,890	278	334,819,890	0	0
3050104004	Rak Kayu		57	88,344,984	57	88,344,984	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	57	88,344,984	57	88,344,984	0	0
3050104005	Filing Cabinet Besi		152	292,050,721	152	292,050,721	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	152	292,050,721	152	292,050,721	0	0
3050104007	Brandkas		8	4,775,000	8	4,775,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 5 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	4,775,000	8	4,775,000	0	0
3050104011	Rotary Filling		2	4,467,000	2	4,467,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,467,000	2	4,467,000	0	0
3050104016	Roll Opek		7	10,906,000	7	10,906,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	10,906,000	7	10,906,000	0	0
3050104020	Lemari Display		2	8,000,000	2	8,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,000,000	2	8,000,000	0	0
3050105001	Tabung Pemadam Api		90	66,102,500	90	66,102,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	90	66,102,500	90	66,102,500	0	0
3050105002	Hydrant		3	23,372,000	3	23,372,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	23,372,000	3	23,372,000	0	0
3050105003	Sprinkler		1	1,156,000	1	1,156,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,156,000	1	1,156,000	0	0
3050105004	Fire Alarm		3	3,615,000	3	3,615,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	3,615,000	3	3,615,000	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System		3	163,281,745	3	163,281,745	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	163,281,745	3	163,281,745	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		2	155,020,150	2	155,020,150	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	15,532,000	1	15,532,000	0	0
101	Pembelian	Buah	1	139,488,150	1	139,488,150	0	0
3050105010	White Board		33	7,807,890	33	7,807,890	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	33	7,807,890	33	7,807,890	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 6 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105013	Copy Board/Elektric White Board		1	2,732,000	1	2,732,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,732,000	1	2,732,000	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas		17	106,706,000	17	106,706,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	106,706,000	17	106,706,000	0	0
3050105017	Mesin Absensi		8	138,762,000	8	138,762,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	138,762,000	8	138,762,000	0	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas		3	11,528,000	3	11,528,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	11,528,000	3	11,528,000	0	0
3050105025	Headmachine Besar		3	2,690,000	3	2,690,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,690,000	3	2,690,000	0	0
3050105031	Panel Pameran		4	3,887,000	4	3,887,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	3,887,000	4	3,887,000	0	0
3050105037	White Board Electronic		2	4,278,000	2	4,278,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	4,278,000	2	4,278,000	0	0
3050105038	Laser Pointer		11	11,440,000	11	11,440,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	11,440,000	11	11,440,000	0	0
3050105039	Display		2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,900,000	2	9,900,000	0	0
3050105045	Penangkal Petir		1	6,931,000	1	6,931,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,931,000	1	6,931,000	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus		15	161,709,500	15	161,709,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	123,209,500	10	123,209,500	0	0
101	Pembelian	Buah	5	38,500,000	5	38,500,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 7 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)		23	43,300,000	23	43,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	23	43,300,000	23	43,300,000	0	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector		18	126,925,935	18	126,925,935	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	126,925,935	18	126,925,935	0	0
3050105062	Bel		3	24,475,000	3	24,475,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	24,475,000	3	24,475,000	0	0
3050105095	Wastafel Portable		1	9,996,250	1	9,996,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	unit	1	9,996,250	1	9,996,250	0	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya		3	1,242,000	3	1,242,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	1,242,000	3	1,242,000	0	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal		2	2,156,234	2	2,156,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,156,234	2	2,156,234	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu		230	229,130,781	230	229,130,781	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	230	229,130,781	230	229,130,781	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal		324	357,392,000	212	307,580,000	112	49,812,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	324	357,392,000	212	307,580,000	112	49,812,000
3050201004	Kursi Kayu		12	3,372,000	12	3,372,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	3,372,000	12	3,372,000	0	0
3050201005	Sice		31	381,625,416	31	381,625,416	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	31	381,625,416	31	381,625,416	0	0
3050201008	Meja Rapat		111	332,597,000	111	332,597,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	110	322,609,000	110	322,609,000	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	1	9,988,000	1	9,988,000	0	0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 8 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050201009	Meja Komputer		78	18,233,000	59	13,183,000	19	5,050,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	78	18,233,000	59	13,183,000	19	5,050,000
3050201010	Tempat Tidur Besi		1	2,866,234	1	2,866,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,866,234	1	2,866,234	0	0
3050201013	Meja Telepon		44	5,038,000	44	5,038,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	44	5,038,000	44	5,038,000	0	0
3050201014	Meja Resepsionis		4	23,064,000	4	23,064,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	23,064,000	4	23,064,000	0	0
3050201016	Kasur/Spring Bed		8	38,385,000	8	38,385,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	38,385,000	8	38,385,000	0	0
3050201017	Sketsel		3	9,007,000	3	9,007,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	9,007,000	3	9,007,000	0	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		450	609,206,830	386	559,542,830	64	49,664,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	450	609,206,830	386	559,542,830	64	49,664,000
3050202003	Jam Elektronik		1	92,000	1	92,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	92,000	1	92,000	0	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		1	2,886,500	1	2,886,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,886,500	1	2,886,500	0	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput		3	13,972,500	3	13,972,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	9,372,500	2	9,372,500	0	0
101	Pembelian	Buah	1	4,600,000	1	4,600,000	0	0
3050203004	Mesin Cuci		1	2,970,000	1	2,970,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 9 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,970,000	1	2,970,000	0	0
3050203005	Air Cleaner		1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,299,000	1	2,299,000	0	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya		1	412,500	1	412,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	412,500	1	412,500	0	0
3050204001	Lemari Es		17	83,064,910	17	83,064,910	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	45,564,910	12	45,564,910	0	0
101	Pembelian	Buah	5	37,500,000	5	37,500,000	0	0
3050204003	A.C. Window		8	234,610,000	8	234,610,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	234,610,000	8	234,610,000	0	0
3050204004	A.C. Split		126	1,598,786,641	126	1,598,786,641	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	76	1,033,216,325	76	1,033,216,325	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Buah	50	565,570,316	50	565,570,316	0	0
3050204006	Kipas Angin		2	1,254,000	2	1,254,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,254,000	2	1,254,000	0	0
3050205019	Mixer		1	6,462,500	1	6,462,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	6,462,500	1	6,462,500	0	0
3050206002	Televisi		29	166,810,000	29	166,810,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	99,345,000	17	99,345,000	0	0
101	Pembelian	Buah	4	19,000,000	4	19,000,000	0	0
402	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Buah	8	48,465,000	8	48,465,000	0	0
3050206007	Loudspeaker		18	76,250,500	18	76,250,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 10 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	76,250,500	18	76,250,500	0	0
3050206008	Sound System		6	334,180,200	6	334,180,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	18	486,049,418	18	486,049,418	0	0
101	Pembelian	Buah	1	14,797,632	1	14,797,632	0	0
302	Transfer Keluar	Buah	(13)	(166,666,850)	(13)	(166,666,850)	0	0
3050206012	Wireless		3	12,498,000	3	12,498,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	12,498,000	3	12,498,000	0	0
3050206014	Microphone		12	29,480,000	12	29,480,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	29,480,000	12	29,480,000	0	0
3050206015	Microphone Table Stand		3	2,013,000	3	2,013,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	2,013,000	3	2,013,000	0	0
3050206016	Mic Conference		1	84,150,000	1	84,150,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	84,150,000	1	84,150,000	0	0
3050206017	Unit Power Supply		5	90,190,000	5	90,190,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	90,190,000	5	90,190,000	0	0
3050206019	Stabilisator		1	275,000	0	0	1	275,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	275,000	0	0	1	275,000
3050206020	Camera Video		2	99,327,860	2	99,327,860	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	99,327,860	2	99,327,860	0	0
3050206021	Tustel		1	3,076,250	1	3,076,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,076,250	1	3,076,250	0	0
3050206034	Tangga Aluminium		7	14,086,105	7	14,086,105	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	14,086,105	7	14,086,105	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 11 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3050206036	Dispenser		33	92,144,534	33	92,144,534	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	60,098,534	19	60,098,534	0	0
101	Pembelian	Buah	14	32,046,000	14	32,046,000	0	0
3050206046	Handy Cam		4	70,398,500	4	70,398,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	4	70,398,500	4	70,398,500	0	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ))		1	666,232	1	666,232	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	666,232	1	666,232	0	0
3050206056	Karpet		2	59,605,000	2	59,605,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	59,605,000	2	59,605,000	0	0
3050206057	Vertikal Blind		51	72,705,184	51	72,705,184	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	51	72,705,184	51	72,705,184	0	0
3050206058	Gordyin/Kray		317	264,581,100	317	264,581,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	317	264,581,100	317	264,581,100	0	0
3050206059	Kabel Roll		10	7,700,000	10	7,700,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	7,700,000	10	7,700,000	0	0
3050206061	Keset Kaki		8	25,224,000	8	25,224,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	25,224,000	8	25,224,000	0	0
3050206068	DVD Player		1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,000,000	1	2,000,000	0	0
3050206071	Kabel		8	3,459,500	3	2,029,500	5	1,430,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	3,459,500	3	2,029,500	5	1,430,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan		10	25,117,660	10	25,117,660	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 12 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	25,117,660	10	25,117,660	0	0
3060101002	Audio Mixing Portable		1	5,802,500	1	5,802,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	5,802,500	1	5,802,500	0	0
3060101003	Audio Mixing Stationer		2	20,702,000	2	20,702,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	20,702,000	2	20,702,000	0	0
3060101017	Cassette Duplicator		3	34,824,000	3	34,824,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	34,824,000	3	34,824,000	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC		6	41,074,000	6	41,074,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	41,074,000	6	41,074,000	0	0
3060101039	Light Signal		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)		5	61,821,288	5	61,821,288	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	61,821,288	5	61,821,288	0	0
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)		1	2,381,500	1	2,381,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,381,500	1	2,381,500	0	0
3060101060	Power Amplifier		2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	11,000,000	2	11,000,000	0	0
3060101079	Microphone Cable		1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,870,000	1	1,870,000	0	0
3060101085	Cable		8	1,760,000	0	0	8	1,760,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	1,760,000	0	0	8	1,760,000
3060101088	Voice Recorder		7	6,964,500	7	6,964,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 13 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	6,964,500	7	6,964,500	0	0
3060101091	Digital LED Running Text		6	23,499,300	6	23,499,300	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	23,499,300	6	23,499,300	0	0
3060102003	Camera Electronic		3	91,520,000	3	91,520,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	91,520,000	3	91,520,000	0	0
3060102012	Video Monitor		1	59,751,660	1	59,751,660	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	59,751,660	1	59,751,660	0	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable		1	8,448,000	1	8,448,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	8,448,000	1	8,448,000	0	0
3060102016	Video Switcher		2	21,940,260	2	21,940,260	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	21,940,260	2	21,940,260	0	0
3060102020	Video Test Signal Generator		1	12,287,000	1	12,287,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,287,000	1	12,287,000	0	0
3060102034	Teleprompter		1	19,140,000	1	19,140,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	19,140,000	1	19,140,000	0	0
3060102045	Tripod Camera		19	58,388,958	19	58,388,958	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	19	58,388,958	19	58,388,958	0	0
3060102055	Lighting Stand Tripod		11	71,606,700	11	71,606,700	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	71,606,700	11	71,606,700	0	0
3060102056	Film Projector		5	146,646,000	5	146,646,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	5	146,646,000	5	146,646,000	0	0
3060102057	Slide Projector		1	3,190,000	1	3,190,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,190,000	1	3,190,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 14 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3060102060	Camera Film		3	116,688,000	3	116,688,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	116,688,000	3	116,688,000	0	0
3060102061	Lensa Kamera		8	108,303,600	8	108,303,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	108,303,600	8	108,303,600	0	0
3060102099	Automatic Emergency Light		2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	1,100,000	2	1,100,000	0	0
3060102107	Layar Film/Projector		1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	16,400,000	1	16,400,000	0	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack		1	12,162,360	1	12,162,360	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	12,162,360	1	12,162,360	0	0
3060102118	Head Set		2	6,072,000	2	6,072,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	6,072,000	2	6,072,000	0	0
3060102128	Camera Digital		15	280,600,000	15	280,600,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	15	280,600,000	15	280,600,000	0	0
3060102129	Tas Kamera		1	2,400,200	1	2,400,200	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,400,200	1	2,400,200	0	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera		2	8,231,500	2	8,231,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	8,231,500	2	8,231,500	0	0
3060102131	Lensa Filter		1	1,687,500	1	1,687,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	1,687,500	1	1,687,500	0	0
3060102135	LCD Monitor		7	1,204,207,689	7	1,204,207,689	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	1,204,207,689	7	1,204,207,689	0	0
3060102152	RF Cable		1	7,700,000	1	7,700,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 15 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	7,700,000	1	7,700,000	0	0
3060102165	Camera Conference		1	2,035,000	1	2,035,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,035,000	1	2,035,000	0	0
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya		4	44,145,077	4	44,145,077	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	44,145,077	4	44,145,077	0	0
3060104045	Mesin Barcode		1	3,740,000	1	3,740,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,740,000	1	3,740,000	0	0
3060199999	Alat Studio Lainnya		3	57,750,000	3	57,750,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	3	57,750,000	3	57,750,000	0	0
3060201001	Telephone (PABX)		2	241,354,500	2	241,354,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	241,354,500	2	241,354,500	0	0
3060201003	Pesawat Telephone		104	20,608,000	14	2,741,000	90	17,867,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	104	20,608,000	14	2,741,000	90	17,867,000
3060201006	Handy Talky (HT)		16	48,210,000	16	48,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	16	48,210,000	16	48,210,000	0	0
3060201010	Facsimile		11	35,178,000	11	35,178,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	35,178,000	11	35,178,000	0	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya		10	72,597,920	10	72,597,920	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	10	72,597,920	10	72,597,920	0	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya		4	9,800,000	4	9,800,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	4	9,800,000	4	9,800,000	0	0
3060206002	Wireless Amplifier		2	13,200,000	2	13,200,000	0	0



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 16 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	13,200,000	2	13,200,000	0	0
3060323022	Change Over Switch		12	15,923,160	12	15,923,160	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	12	15,923,160	12	15,923,160	0	0
3060346005	Conecctor		10	726,000	0	0	10	726,000
000	Saldo Awal TAYL	Buah	10	726,000	0	0	10	726,000
3070101001	Sterilisator		1	9,900,000	1	9,900,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	9,900,000	1	9,900,000	0	0
3070101005	Tensimeter		2	12,866,234	2	12,866,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	12,866,234	2	12,866,234	0	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)		1	658,000	1	658,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	658,000	1	658,000	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet		1	935,000	1	935,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	935,000	1	935,000	0	0
3070101022	Lemari Steril		1	4,565,000	1	4,565,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	4,565,000	1	4,565,000	0	0
3070101026	Tabung O2		2	3,088,635	2	3,088,635	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,088,635	2	3,088,635	0	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)		3	12,155,075	3	12,155,075	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	12,155,075	3	12,155,075	0	0
3070101127	Kursi Dorong		1	2,791,250	1	2,791,250	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,791,250	1	2,791,250	0	0
3070102002	Dental Unit		1	123,200,000	1	123,200,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 17 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbrmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	123,200,000	1	123,200,000	0	0
3070102019	Portable Dental Unit		1	14,107,500	1	14,107,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	14,107,500	1	14,107,500	0	0
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)		2	3,713,000	2	3,713,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	3,713,000	2	3,713,000	0	0
3070102118	Bein		1	671,293	1	671,293	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	671,293	1	671,293	0	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya		2	12,200,000	2	12,200,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	12,200,000	2	12,200,000	0	0
3070106096	Otoscope Halogen Lamp		2	2,811,234	2	2,811,234	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	2,811,234	2	2,811,234	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete		1	3,436,000	1	3,436,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	3,436,000	1	3,436,000	0	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya		1	89,347,170	1	89,347,170	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	89,347,170	1	89,347,170	0	0
3070118011	Data Catridge		1	24,657,600	1	24,657,600	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	24,657,600	1	24,657,600	0	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya		2	8,980,519	2	8,980,519	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	8,980,519	2	8,980,519	0	0
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)		1	26,125,000	1	26,125,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	26,125,000	1	26,125,000	0	0
3080804009	DC / AC Power Supply		1	2,195,000	1	2,195,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	2,195,000	1	2,195,000	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.55  
 Halaman : 18 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100101004	Internet		2	5,500,000	2	5,500,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	2	5,500,000	2	5,500,000	0	0
3100102001	P.C Unit		189	2,451,847,000	189	2,451,847,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	179	2,213,247,000	179	2,213,247,000	0	0
101	Pembelian	Buah	11	269,500,000	11	269,500,000	0	0
304	Reklasifikasi Keluar	Buah	(1)	(30,900,000)	(1)	(30,900,000)	0	0
3100102002	Lap Top		115	1,981,893,498	115	1,981,893,498	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	73	1,087,528,498	73	1,087,528,498	0	0
101	Pembelian	Buah	50	706,925,000	50	706,925,000	0	0
102	Transfer Masuk	Buah	10	399,750,000	10	399,750,000	0	0
302	Transfer Keluar	Buah	(18)	(212,310,000)	(18)	(212,310,000)	0	0
3100102003	Note Book		17	309,832,000	17	309,832,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	17	309,832,000	17	309,832,000	0	0
3100102007	Net Book		118	1,567,210,000	118	1,567,210,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	118	1,567,210,000	118	1,567,210,000	0	0
3100102009	Tablet PC		11	87,779,458	11	87,779,458	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	11	87,779,458	11	87,779,458	0	0
3100102999	Personal Komputer Lainnya		2	61,347,000	2	61,347,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	2	61,347,000	2	61,347,000	0	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)		20	202,707,500	20	202,707,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	20	202,707,500	20	202,707,500	0	0
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)		3	24,170,500	3	24,170,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	24,170,500	3	24,170,500	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
 Halaman : 19 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)		142	435,984,500	142	435,984,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	137	357,234,500	137	357,234,500	0	0
101	Pembelian	Buah	5	78,750,000	5	78,750,000	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)		11	122,421,650	11	122,421,650	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	69,421,650	6	69,421,650	0	0
101	Pembelian	Buah	5	53,000,000	5	53,000,000	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk		46	91,783,000	46	91,783,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	46	91,783,000	46	91,783,000	0	0
3100204001	Server		4	147,300,000	4	147,300,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	3	116,400,000	3	116,400,000	0	0
107	Reklasifikasi Masuk	Buah	1	30,900,000	1	30,900,000	0	0
3100204002	Router		23	118,198,719	23	118,198,719	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	23	118,198,719	23	118,198,719	0	0
3100204004	Modem		7	5,666,100	7	5,666,100	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	7	5,666,100	7	5,666,100	0	0
3100204030	Network Cable Tester		6	8,580,000	6	8,580,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	6	8,580,000	6	8,580,000	0	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya		1	92,558,060	1	92,558,060	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	1	92,558,060	1	92,558,060	0	0
3190106003	Sepeda Olah Raga		1	22,977,620	1	22,977,620	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	1	22,977,620	1	22,977,620	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
132111 Peralatan dan Mesin

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 20 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL</b>				<b>26,732,140,857</b>		<b>26,605,556,857</b>		<b>126,584,000</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
 Halaman : 21 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen		3	59,966,118,647	3	59,966,118,647	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	3	56,516,037,780	3	56,516,037,780	0	0
202	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Unit	0	246,201,096	0	246,201,096	0	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Unit	0	179,449,000	0	179,449,000	0	0
208	Pengembangan Melalui KDP	Unit	0	3,071,511,126	0	3,071,511,126	0	0
264	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Unit	0	(47,080,355)	0	(47,080,355)	0	0
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen		4	154,108,000	4	154,108,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	4	154,108,000	4	154,108,000	0	0
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas		1	481,163,934	1	481,163,934	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	481,163,934	1	481,163,934	0	0
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		2	1,422,910,000	2	1,422,910,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	1,422,910,000	2	1,422,910,000	0	0
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen		1	82,559,000	1	82,559,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	82,559,000	1	82,559,000	0	0
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen		2	383,440,000	2	383,440,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	2	383,440,000	2	383,440,000	0	0
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		5	464,163,000	5	464,163,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	5	464,163,000	5	464,163,000	0	0
4040104001	Pagar Permanen		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	179,449,000	1	179,449,000	0	0
305	Koreksi Pencatatan	Unit	(1)	(179,449,000)	(1)	(179,449,000)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
133111 Gedung dan Bangunan

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 22 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL</b>				<b>62,954,462,581</b>		<b>62,954,462,581</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
135121 Aset Tetap Lainnya

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 23 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbrmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6010101001	Monografi		27,336	1,123,767,442	27,336	1,123,767,442	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	27,080	1,088,776,559	27,080	1,088,776,559	0	0
101	Pembelian	Buah	256	34,990,883	256	34,990,883	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>1,123,767,442</b>		<b>1,123,767,442</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001



LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
136111 **Konstruksi Dalam pengerjaan**

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 24 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2	0	2	0	0	0
502	Perolehan/Penambahan KDP	dummy	1	42,394,200	1	42,394,200	0	0
503	Pengembangan KDP	dummy	0	3,029,116,926	0	3,029,116,926	0	0
513	Reklasifikasi Keluar KDP	dummy	(1)	(3,071,511,126)	(1)	(3,071,511,126)	0	0
514	Reklasifikasi Masuk KDP	dummy	2	3,071,511,126	2	3,071,511,126	0	0
599	Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	dummy	0	(3,071,511,126)	0	(3,071,511,126)	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh

I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
**162151 Software**

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 25 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101001	Software Komputer		6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
000	Saldo Awal TAYL	dummy	6	4,184,325,500	6	4,184,325,500	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>4,184,325,500</b>		<b>4,184,325,500</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
162191 Aset Tak Berwujud Lainnya

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 26 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbmn\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8010101050	Buku Digital		519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
101	Pembelian	Edisi	519	49,998,160	519	49,998,160	0	0
<b>TOTAL</b>				<b>49,998,160</b>		<b>49,998,160</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
 RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
 Halaman : 27 dari 28  
 Kode Lap : lap\_crbtn\_satker

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010305005	Sumersible Pump		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	229,812,000	1	229,812,000	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Unit	(1)	(229,812,000)	(1)	(229,812,000)	0	0
3020102002	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )		1	124,922,000	1	124,922,000	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	1	124,922,000	1	124,922,000	0	0
3020102003	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )		1	198,680,260	1	198,680,260	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	1	198,680,260	1	198,680,260	0	0
3020104001	Sepeda Motor		5	107,382,000	5	107,382,000	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Unit	1	9,395,000	1	9,395,000	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Unit	(1)	(9,395,000)	(1)	(9,395,000)	0	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Unit	5	107,382,000	5	107,382,000	0	0
3050204004	A.C. Split		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	50	565,570,316	50	565,570,316	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Buah	(50)	(565,570,316)	(50)	(565,570,316)	0	0
3050206002	Televisi		0	0	0	0	0	0
000	Saldo Awal TAYL	Buah	8	48,465,000	8	48,465,000	0	0
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	Buah	(8)	(48,465,000)	(8)	(48,465,000)	0	0

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

NAMA UAKPB : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

Tanggal : 15/05/2024 08.17.56  
Halaman : 28 dari 28  
Kode Lap : lap\_crbm\_n\_satker

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>TOTAL</b>				<b>430,984,260</b>		<b>430,984,260</b>		<b>0</b>



Jakarta, 15 May 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
I Gusti Putu Milawati  
197705092001122001

# LAMPIRAN DATA DUKUNG



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265  
laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA KOREKSI PENCATATAN DAN PERUBAHAN NILAI ASET  
Nomor : PHN.1-PB.04.01-08**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP. : 197304092002121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

1. Menyatakan bahwa telah melakukan koreksi pencatatan BMN berupa Pagar dengan kode aset 4040104001, Nup 1 senilai 179.449.000,-
2. Menyatakan telah melakukan koreksi pencatatan nilai/ kuantitas BMN berupa Gedung bangunan dengan kode 4010101001, Nup 1 dengan total nilai Rp.19.066.481.039,- menjadi Rp.19.245.930.039,- yang merupakan nilai kapitalisasi dari pagar yang telah dilakukan koreksi pencatatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan reklasifikasi Aset keluar dan masuk untuk Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

Anang Ardian Riza  
NIP 197304092002121008



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan Mayjen Soetoyo No. 10- Cillitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Laman: [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN  
HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN  
Nomor : PHN.I-PB.04.03-01**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu duapuluh empat, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami Tim Opname Fisik Barang Persediaan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP : 197304092002121008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Nama : Numansyah  
NIP : 198308242006041001  
Jabatan : Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nama : Evi Imalia  
NIP : 198402022006042001  
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan telah dilakukan opname fisik atas barang Persediaan dengan cara mencatat kuantitas dan kondisi barang persediaan pada satker Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 2 Januari 2024 dengan hasil ( rincian terlampir ).

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan pelaporan barang persediaan dan perekaman kedalam Aplikasi persediaan Semester II tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Januari 2024

Mengetahui,  
Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nurmansyah  
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan

Evi Imalia  
NIP 198402022006042001





**LAMPIRAN BERITA ACARA  
OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2023**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi
1	1010302004000020	Amplop coklat Kop BPHN Folio	5	Pak	592.500	Baik
2	1010302004000017	Amplop coklat Cabinet Polos	17	Pak	550.100	Baik
3	1010302004000026	Amplop Putih Nomor 90	4	Dus	118.000	Baik
4	1010301001000049	Balpoint sarasa Zebra 0,5 Biru	1	Lusin	259.000	Baik
5	1010306010000009	Baterai AAA alkaline	30	Pcs	570.000	Baik
6	1010306010000010	Baterai Alkaline AA	29	Pcs	551.000	Baik
7	1010301003000047	Binder Clip No. 111	3	Dus	18.000	Baik
8	1010301999000039	Box File Karton	4	Buah	74.000	Baik
9	1010301999000041	Box File Plastik Folio	7	Buah	276.500	Baik
10	1010301005000006	Buku Agenda	83	Buah	20.584.000	Baik
11	1010301005000017	Buku agenda folio	10	Buah	195.000	Baik
12	1010301005000031	Buku Agenda Folio 100 Lbr Kiky	10	Buah	280.000	Baik
13	1010301005000002	Buku Agenda Polio	4	Buah	78.000	Baik
14	1010301005000018	Buku ekspedisi	10	Buah	139.000	Baik
15	1010301005000003	Buku Expedisi	10	Buah	160.000	Baik
16	1010301006000034	Bussines file daichi F4	1	Lusin	58.000	Baik
17	1010301004000014	Correction Pen CF-S201PT Joyko	1	Buah	10.000	Baik
18	1010301008000002	Cutter Besar L-500	9	Buah	138.600	Baik
19	1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	3	Buah	25.500	Baik
20	1010304004000072	Epson T6642 CYAN	2	Buah	238.000	Baik
21	1010304004000073	Epson T6643 MAGENTA	4	Buah	476.000	Baik
22	1010304004000074	Epson T6643 YELLOW	4	Buah	476.000	Baik
23	1010304006000018	Flashdisk 128 GB Sandisk	1	Buah	238.000	Baik
24	1010304006000015	Flashdisk 16 GB Sandisk	4	Buah	380.000	Baik
25	1010304006000017	Flashdisk OTG 32 GB Sandisk	9	Buah	1.390.000	Baik
26	1010301008000013	Gunting kecil	7	Buah	63.000	Baik
27	1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D ( Stepler Kecil)	4	Buah	224.000	Baik
28	1010301008000008	Isi Cutter Besar L- 500	20	Tube	336.800	Baik
29	1010301013000007	Isi staples Kecil No. 10-1M max isi 20	5	Dus	371.250	Baik
30	1010301999000070	Joyco Tape Cutter 119	1	Buah	30.800	Baik
31	1010399999000026	Kalender	223	Buah	16.725.000	Baik
32	1010301999000064	Kalkulator	1	Buah	380.000	Baik
33	1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	215	Rim	13.996.500	Baik
34	1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	50	Rim	3.745.000	Baik
35	1010301010000017	Lakban Hitam 2"	16	Buah	324.800	Baik
36	1010301010000034	Lem Fox Stick	4	Buah	61.600	Baik
37	1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	5	Buah	112.500	Baik
38	1010302002000011	Lembar Disposisi	100	Buku	2.470.000	Baik
39	1010304010000001	Logitech Mouse Wireless M221	2	Buah	560.000	Baik
40	1010301006000060	Map Folder Ber Kop BPHN	2.200	Buah	43.120.000	Baik

41	1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	14	Buah	554.000	Baik
42	1010301004000017	Penghapus Pensil Staedtler 5-26 B-20	5	Buah	126.000	Baik
43	1010301004000011	Penghapus pensil Staedtler 526-B40	3	Buah	12.600	Baik
44	1010301001000010	Pensil 2B Staedler	10	Lusin	470.800	Baik
45	1010301001000046	Pensil 2B Faber Castle	3	Lusin	172.200	Baik
46	1010399999000008	Plakat	41	Buah	18.435.000	Baik
47	1010304999000016	Pointer R 400 Logitech	1	Buah	567.000	Baik
48	1010302002000064	Post it 3M 680-09 Sign Here	2	Buah	56.000	Baik
49	1010302002000045	Post It 654	10	Pad	168.000	Baik
50	1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	6	Lusin	1.251.600	Baik
51	1010301001000004	Pulpen FASTER C6	3	Lusin	121.800	Baik
52	1010301001000027	Pulpen Gel K1 Kenko	30	Lusin	1.596.000	Baik
53	1010301001000033	Pulpen Snowman pen V-5	5	Lusin	245.000	Baik
54	1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 XL Kenko	2	Buah	56.000	Baik
55	1010301999000067	Rautan Pensil angel A-5 (Kecil)	2	Buah	117.600	Baik
56	1010301999000058	Remover Kertas	2	Buah	80.000	Baik
57	1010301010000031	Solatif Bening Daimaru (12mm x 25yard)	4	Buah	22.400	Baik
58	1010301001000005	Spidol Art 70	1	Lusin	115.000	Baik
59	1010301001000032	Spidol Permanent Marker artline 70	5	Lusin	756.000	Baik
60	1010301001000017	Spidol whiteboard hitam	2	Lusin	206.000	Baik
61	1010301001000012	Stabilo bos	14	Buah	224.000	Baik
62	1010301012000002	Stapler HD 10 Max	10	Buah	200.000	Baik
63	1010302002000065	Sticker Label Tom & Jerry No.120	10	Lembar	77.000	Baik
64	1010301006000040	Stop Map Putih Berkop BPHN	5	Pak	1.050.000	Baik
65	1010301010000021	Tape dispencer besar	3	Buah	86.100	Baik
66	1010301010000022	Tape dispencer kecil	3	Buah	64.500	Baik
67	1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	15	Buah	3.045.000	Baik
68	1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	10	Buah	1.400.000	Baik
69	1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	12	Buah	1.680.000	Baik
70	1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	11	Buah	1.540.000	Baik
71	1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	12	Buah	1.428.000	Baik
72	1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	12	Buah	1.428.000	Baik
73	1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	11	Buah	1.309.000	Baik
74	1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	10	Buah	1.190.000	Baik
75	1010304004000106	Tinta Epson 008 Black	3	Buah	1.062.000	Baik
76	1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	3	Buah	921.000	Baik
77	1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	3	Buah	921.000	Baik
78	1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	3	Buah	921.000	Baik
79	1010304004000103	Tinta Epson 774 ( Epson M100)	3	Buah	1.005.000	Baik
80	1010304004000060	Tinta HP 802 Colour	1	Buah	233.000	Baik
81	1010304004000007	Tinta Hp Laser Jet 12 A	2	Buah	3.240.000	Baik
82	1010301002000003	Tinta Stempel	11	Buah	107.800	Baik
83	1010304004000037	Toner HP Laser Jet 85A	1	Buah	1.519.000	Baik
84	1010304004000101	Toner HP Laserjet 79 A	1	Buah	1.485.000	Baik
85	1010301003000030	Trgonal Clip no. 1 joiko	3	Buah	79.500	Baik

86	1010314002000243	Acetylcystein 200 Mg @100 GNOV	200	Box	262.000	Baik
87	1010314005000022	Acyclovir 5% Salep	4	Tube	20.684	Baik
88	1010314002000178	Alleron	1	Box	39.000	Baik
89	1010314002000105	Allohex	2	Box	131.000	Baik
90	1010314002000245	Allohex 10 Mg Tab @50	100	Tablet	131.000	Baik
91	1010314002000205	Allopurinol 100 MG Dus 100 Tab	1	Tablet	18.700	Baik
92	1010314002000246	Allopurinol 100 MG Dus 100 Tab @ 100 GBN	200	Gbn	81.200	Baik
93	1010314002000247	Allopurinol 300 Mg @ 100 Hexa	200	Box	131.000	Baik
94	1010314005000043	Alocclair Plus Gel 8 MI	1	Tube	111.333	Baik
95	1010314001000082	Alocclair Plus Spray 15 MI	1	Tube	124.431	Baik
96	1010314002000179	Ambeven	1	Box	231.000	Baik
97	1010314999000115	Any-Etch	5	Buah	263.625	Baik
98	1010314001000088	Aquadest 25 MI	1	Vial	9.064	Baik
99	1010314002000250	Arcoxia 120MG Tav@30	30	Tablet	735.750	Baik
100	1010314999000025	Articulating Paper	1	Box	126.540	Baik
101	1010314002000253	Atorvastatin Calc 10mg Tabghx	200	Box	524.000	Baik
102	1010314002000225	Atorvastatin CALC 20 Mg Tab GHX	3	Box	638.550	Baik
103	1010314002000254	Atorvastatin Calc 20MG Tab GHX	200	Box	851.400	Baik
104	1010314005000020	Balsem Telon	1	Pot	13.085	Baik
105	1010314002000236	Benosatan 500 Mg @ 100	1	Cap	131.000	Baik
106	1010314002000255	Benostan 500MG CAP@100	200	Cap	262.000	Baik
107	1010314001000008	Betadine 60ml	1	Botol	50.200	Baik
108	1010314005000018	Betasone N Salep	12	Box	233.412	Baik
109	1010314005000009	Bioplacento Gel	1	Tube	34.055	Baik
110	1010314002000050	Blue Hard Stone	1	Box	36.000	Baik
111	1010314002000259	Caviplex Kaplet @ 100 (ERELA)	200	Kaplet	183.400	Baik
112	1010314002000134	Cavit D3	1	Box	316.800	Baik
113	1010314002000252	Cefixime 200mg Cap@100 GDY	100	Box	480.300	Baik
114	1010314002000091	Cefiximetab 100 mg	2	Box	570.200	Baik
115	1010314001000029	Cendo LFX tetes mata	5	Botol	178.465	Baik
116	1010314002000204	Cetirizine 10 MG Dus 30 Tab	6	Dus	86.400	Baik
117	1010314001000085	Chemi Dental Poland NaOcl 5.25% + Surfactant25	1	Botol	198.690	Baik
118	1010314001000058	Chkm Ghimas	1	Botol	85.000	Baik
119	1010314999000018	Cotton Roll No.2 3	2	Buah	189.860	Baik
120	1010314002000260	Demacolin	200	Tablet	130.000	Baik
121	1010314999000125	Disposable Sringe 3 Cc	5	Pcs	22.920	Baik
122	1010314002000232	Dolofen -F tab @100	1	Box	106.000	Baik
123	1010314005000004	Erlamicetin (salep mata)	4	Tube	49.772	Baik
124	1010314001000009	Eugenol	1	Botol	55.000	Baik
125	1010314002000106	Exaflam Tab 25mg	2	Box	235.800	Baik
126	1010314004000001	Fletcher	1	Botol	27.500	Baik
127	1010314002000263	Floxifar 500mg Tab@100	200	Tablet	177.200	Baik
128	1010314005000008	Formyco Salep	4	Tube	101.640	Baik
129	1010314001000072	Forumen Tetes telinga	1	Botol	36.020	Baik
130	1010314999000039	Fuji 9	1	Buah	1.205.127	Baik

131	1010314002000097	Gastrucid Tab	3	Box	161.100	Baik
132	1010314002000266	Histigo 6mg KPL@50	250	Tablet	211.750	Baik
133	1010314005000049	Hydrocortisone 2.5%CR(DUS 24TUBE@ 5 Gr	18	Dus	81.522	Baik
134	1010314999000139	Infuset	1	Pcs	22.267	Baik
135	1010314001000050	Insto Eye Drops 7.5 ml Hijau	2	Botol	34.000	Baik
136	1010314001000048	Insto moist	1	Fis	15.063	Baik
137	1010314002000024	Intunal F	4	Box	393.200	Baik
138	1010314002000267	Irbesartan 300mg@20 GNV	40	Tablet	181.000	Baik
139	1010314999000136	K- File Niti 45-80/25 mm	1	Box	154.290	Baik
140	1010314002000268	Kalmethasone 0.5MG TAB@200	200	Tablet	28.800	Baik
141	1010314002000124	Kalnex	2	Tablet	10.400	Baik
142	1010314999000044	K-File 30	1	Kotak	165.000	Baik
143	1010314999000005	K-File No.15	2	Box	325.600	Baik
144	1010314999000006	K-file No.20	1	Box	162.800	Baik
145	1010314999000007	K-File No.25	1	Box	165.000	Baik
146	1010314002000079	Lansoprazole Tab	4	Box	128.800	Baik
147	1010314002000148	Meloxicam 15NG	1	Box	125.300	Baik
148	1010314002000271	Methyl Prednisolon 8mg GDX	100	Tablet	69.700	Baik
149	1010314001000094	Minosep 2% 60 MI	4	Botol	151.936	Baik
150	1010304004000074	Minyak Kayu Putih	18	Botol	280.962	Baik
151	1010314001000071	Minyak Tawon DD	3	Botol	109.665	Baik
152	1010314002000272	Mucohexin 8Mg Tab@100	400	Tablet	288.400	Baik
153	1010314001000096	Nacl Widatra 500 MI	1	Botol	9.054	Baik
154	1010314001000104	Nasalin Daily Nasal Hygiene	1	Botol	144.078	Baik
155	1010314002000111	Natur E	4	Botol	144.000	Baik
156	1010314001000005	OBH Intrasal	22	Botol	132.286	Baik
157	1010314002000078	Omeprazole Tab	25	Box	851.250	Baik
158	1010314002000160	Ondansetron 8mg	11	Box	397.716	Baik
159	1010314999000081	One swabs 2 Ply	3	Box	36.000	Baik
160	1010314002000276	Piroxicam 20mg (Dus 100 Tab)-BJN	100	Box	29.500	Baik
161	1010314999000109	Plossa Eucalyptus	12	Pcs	154.518	Baik
162	1010314999000118	Plossa Red Hot	15	Pcs	183.075	Baik
163	1010314002000185	Propranolol	1	Box	24.000	Baik
164	1010314001000097	Ringer lactat 500 MI	1	Botol	19.883	Baik
165	1010314999000086	Saliva	1	Pak	55.500	Baik
166	1010314001000033	Sanadryl	52	Botol	1.188.564	Baik
167	1010314002000069	Sanmol 500gr	2	Box	110.000	Baik
168	1010314002000278	Scopma Plus Tab	200	Box	349.200	Baik
169	1010314002000080	Scopma Tab	3	Box	469.500	Baik
170	1010314001000080	Sido Tolak Angin + madu @ 12 Sachet	2	Box	122.856	Baik
171	1010314999000142	Sput 1 Cc	1	Pcs	1.114	Baik
172	1010314999000001	Sput 5 cc	3	Buah	13.752	Baik
173	1010314002000234	Titan 150 Mg Tab @ 100	5	Box	393.000	Baik
174	1010314999000123	Transofix B.Braun	3	Pcs	70.728	Baik
175	1010314002000281	Tremenza Tab@100	100	Tablet	203.100	Baik
176	1010314999000131	Verdent Diamond Bur 314.019.534..012	1	Pcs	176.490	Baik

177	1010314999000133	Verdent Diamond Bur 314.197.524..014	1	Pcs	176.490	Baik
178	1010314999000130	Verdent Diamond Bur 314.494.534..010	1	Pcs	176.490	Baik
179	1010314002000046	Vesperum	1	Box	37.600	Baik
180	1010314002000282	Voltadex 50mg Tab@50	300	Tablet	196.500	Baik
181	1010314999000016	Z350 XT A3,5B	1	Buah	576.298	Baik
<b>JUMLAH</b>			<b>7.477</b>		<b>181.076.570</b>	

Jakarta, 02 Januari 2024

Mengetahui,  
Petugas Gudang/Petugas Persediaan



Nurmansyah  
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan



Evi Imalia  
NIP 198402022006042001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.03.01-02**

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Koreksi Perubahan Kondisi BMN

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3050204004	A.C Split	83	
2.	3050204004	A.C Split	92	
3.	3050204004	A.C Split	93	
4.	3050204004	A.C Split	95	
5.	3050204004	A.C Split	100	
6.	3050204004	A.C Split	119	
7.	3050204004	A.C Split	122	
8.	3050204004	A.C Split	124	
9.	3050204004	A.C Split	128	
10.	3050204004	A.C Split	133	
11.	3050204004	A.C Split	135	
12.	3050204004	A.C Split	137	
13.	3050204004	A.C Split	148	
14.	3050204004	A.C Split	160	
15.	3050204004	A.C Split	174	
16.	3050204004	A.C Split	176	
17.	3050204004	A.C Split	177	
18.	3050204004	A.C Split	178	
19.	3050204004	A.C Split	179	
20.	3050204004	A.C Split	180	
21.	3050204004	A.C Split	184	
22.	3050204004	A.C Split	185	
23.	3050204004	A.C Split	186	
24.	3050204004	A.C Split	187	
25.	3050204004	A.C Split	188	
26.	3050204004	A.C Split	189	
27.	3050204004	A.C Split	190	
28.	3050204004	A.C Split	192	
29.	3050204004	A.C Split	193	
30.	3050204004	A.C Split	194	
31.	3050204004	A.C Split	195	
32.	3050204004	A.C Split	206	
33.	3050204004	A.C Split	207	
34.	3050204004	A.C Split	209	
35.	3050204004	A.C Split	210	
36.	3050204004	A.C Split	211	
37.	3050204004	A.C Split	213	
38.	3050204004	A.C Split	214	
39.	3050204004	A.C Split	215	
40.	3050204004	A.C Split	216	

41.	3050204004	A.C Split	217	
42.	3050204004	A.C Split	218	
43.	3050204004	A.C Split	219	
44.	3050204004	A.C Split	220	
45.	3050204004	A.C Split	221	
46.	3050204004	A.C Split	222	
47.	3050204004	A.C Split	231	
48.	3050204004	A.C Split	232	
49.	3050204004	A.C Split	233	
50.	3050204004	A.C Split	234	
51	3090402014	Recharging System	1	





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN.1-PB.04.03-05**

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.

NIP : 19730409 200212 1 008

Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3.01.03.05.005	Sumersible Pump	1	Kondisi Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza

NIP. 197304092002121008



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website.[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.04.03-03**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Penggunaan BMN Kembali

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3.05.02.06.002	Televisi	15	
2.	3.05.02.06.002	Televisi	16	
3.	3.05.02.06.002	Televisi	17	
4.	3.05.02.06.002	Televisi	18	
5.	3.05.02.06.002	Televisi	19	
6.	3.05.02.06.002	Televisi	20	
7.	3.05.02.06.002	Televisi	21	
8.	3.05.02.06.002	Televisi	22	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BMN KEMBALI**  
**Nomor : PHN1-PB.04.03-07**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.

NIP : 19730409 200212 1 008

Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, dengan hasil :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1.	3020104001	Sepeda Motor	12	Kondisi Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan koreksi perubahan kondisi dengan cara melakukan koreksi terhadap kondisi Barang Milik Negara pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza  
NIP. 197304092002121008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Website. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

**BERITA ACARA**  
**PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN**  
**Nomor : PHN.1-PB.05.05-02**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H, M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza  
NIP. 19730409 200212 1 001

### Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	Rusak Berat
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Rusak Berat
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	Rusak Berat
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	Rusak Berat
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	29	Rusak Berat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Laman.[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA**  
**PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN**  
**Nomor : PHN.1-PB.03.01-51**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza,S.H,M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An.  
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza,S.H,M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 001



### Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3020102002	Micro Bus	4	Rusak Berat
2	3020102003	Mini Bus	12	Rusak Berat





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Fax. 021-8011753, 8002265  
Laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**BERITA ACARA REKLASIFIKASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan  
Nomor : PHN.1-PB.04.01-02**

Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP. : 19730409 200212 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Menyatakan bahwa telah melakukan Reklasifikasi KDP keluar dan masuk pada gedung dan bangunan dalam pengerjaan NUP 7 menjadi gedung dan bangunan dalam pengerjaan NUP 8 dan 9 pada aplikasi SAKTI Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan Reklasifikasi keluar dan masuk KDP untuk semester II tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An.

Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang  
Badan Pembinaan Hukum Nasional



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Anang Ardian Riza  
NIP. 197304092002121008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753

Laman.[www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id) email [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-52**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu duapuluh tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP. : 197304092002121008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

1. Menyatakan bahwa telah melakukan Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin dengan kode barang 3.10.01.02.001 berupa P.C Unit Nup 274;
2. Menyatakan telah melakukan Reklasifikasi masuk peralatan dan mesin dengan kode barang 3.10.02.04.001 berupa Server.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan Reklasifikasi Aset Keluar dan masuk untuk Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

An.Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang



Anang Ardian Riza  
NIP. 197304092002121008



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265  
laman [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**BERITA ACARA REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP**  
**Nomor : PHN.1-PB.04.01-09**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza  
NIP. : 197304092002121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

1. Menyatakan bahwa telah melakukan Reklasifikasi keluar peralatan dan mesin dengan kode barang 3.02.01.01.001 berupa sedan Nup 8.
2. Menyatakan Telah melakukan Reklasifikasi masuk peralatan dan mesin dengan kode barang 3.02.01.02.003 berupa mini bus .

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan reklasifikasi Aset keluar dan masuk untuk Semester II (dua) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

Anang Ardian Riza  
NIP 197304092002121008



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. May. Jend. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265 Laman. [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
PERIODE TAHUNAN TAHUN 2023  
NOMOR: PHN.1-PB.04.04-34**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : Nurmansyah  
NIP : 198308242006041001  
Jabatan : Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab unit Akutansi Kuasa Barang Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Ratna Jamilah  
NIP : 198603212017122001  
Jabatan : Penata Keuangan  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggungjawab unit Akutansi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Badan Pembinaan Hukum Nasional (013.10.0199.409288.KP) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akutansi barang dengan laporan keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L yang disusun oleh unit akutansi keuangan melalui laporan dalam e-rekon dan LK untuk periode tahunan Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagai berikut:

I. Data BMN

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2023 (31 Desember 2023)		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
<b>I</b>	<b>POSISI BMN DI NERACA</b>	<b>400.354.438.894</b>	<b>(1.166.508.807)</b>	<b>399.187.929.887</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>98.063.299</b>	<b>83.013.271</b>	<b>181.076.570</b>
1	Persediaan	98.063.299	83.013.271	181.076.570
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>400.256.375.395</b>	<b>(1.299.520.238)</b>	<b>398.956.855.157</b>
1	Tanah	358.165.357.000	0	358.165.357.000
2	Peralatan dan Mesin	24.758.430.869	1.847.125.988	26.605.556.857
3	Gedung dan Bangunan	59.683.830.714	3.317.712.222	63.001.542.936
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	1.088.776.559	34.990.883	1.123.767.442
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	0	0
8	<i>Akum. Peny. Aset Tetap</i>	<i>(41.440.019.747)</i>	<i>(6.499.349.331)</i>	<i>(47.939.369.078)</i>
<b>C</b>	<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Properti Investasi	0	0	0
2	<i>Akum. Peny. Properti Investasi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>D</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>0</b>	<b>49.998.160</b>	<b>49.998.160</b>
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	4.184.325.500	49.998.160	4.234.323.660
3	Aset Lain-lain <sup>7</sup>	853.242.316	(422.258.056)	430.984.260
4	<i>Akum. Peny. Aset Lainnya</i>	<i>(5.037.567.816)</i>	<i>422.258.056</i>	<i>(4.615.309.760)</i>
<b>II</b>	<b>BMN NON NERACA</b>	<b>25.021.600</b>	<b>(19.967.800)</b>	<b>5.053.800</b>
<b>A</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>	<b>25.021.600</b>	<b>(19.967.800)</b>	<b>5.053.800</b>
1	BMN Ekstrakomptabel	126.584.000	0	126.584.000

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahunan Tahun 2023 (31 Desember 2023)		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel	(101.562.400)	(19.967.800)	(121.530.200)
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
E	BARANG PERSEDIAAN YANG DISERAHKAN	0	0	0
TOTAL (I + II)		400.379.460.294	(1.186.476.607)	399.192.983.687

II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Kementerian Hukum dan HAM periode Tahunan Tahun 2023, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Ratna Jamilah  
NIP 198603212017122001

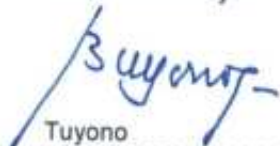
PIHAK PERTAMA,



Nurmansyah  
NIP 198308242006041001

MENGETAHUI,

Analisis Pengelola Keuangan  
APBN Ahli Madya



Tuyono  
NIP 197006151997031001

Kepala Bagian Umum



Anang Ardian Riza  
NIP 197304092002121008

**NILAI LAPORAN BARANG DAN LAPORAN KEUANGAN  
PER 31 Desember 2023**

PERKIRAAN NERACA		LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN
KODE	URAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I</b>	<b>POSISI BMN DI NERACA</b>		
		<b>399.187.929.887</b>	<b>399.187.929.887</b>
<b>A</b>	<b>ASET LANCAR</b>		
		<b>181.076.570</b>	<b>181.076.570</b>
1171	Persediaan	181.076.570	181.076.570
<b>B</b>	<b>ASET TETAP</b>		
		<b>398.956.855.157</b>	<b>398.956.855.157</b>
131111	Tanah	356.165.357.000	356.165.357.000
132111	Peralatan dan Mesin	26.605.556.857	26.605.556.857
137111	Akumulasi Penyusutan	(22.314.784.270)	(22.314.784.270)
133111	Gedung dan Bangunan	63.001.542.936	63.001.542.936
137211	Akumulasi Penyusutan	(25.624.584.808)	(25.624.584.808)
134111	Jalan dan Jembatan	0	0
137311	Akumulasi Penyusutan	0	0
134112	Irigasi	0	0
137312	Akumulasi Penyusutan	0	0
134113	Jaringan	0	0
137313	Akumulasi Penyusutan	0	0
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	1.123.767.442	1.123.767.442
137411	Akumulasi Penyusutan	0	0
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
<b>C</b>	<b>ASET LAINNYA</b>		
		<b>49.998.160</b>	<b>49.998.160</b>
162121	Hak Cipta		0
169312	Amortisasi Hak Cipta		0
162151	Software	4.184.325.500	4.184.325.500
169315	Amortisasi Software	(4.184.325.500)	(4.184.325.500)
162161	Lisensi	0	0
169316	Amortisasi Lisensi	0	0
162171	Hasil Kajian/Penelitian	0	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49.998.160	49.998.160
169317	Amortisasi ATB Lainnya	0	0
166113	ATB yang tidak digunakan	0	0
169318	Amortisasi ATB yang dihentikan	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan	430.984.260	430.984.260
169122	Akumulasi Penyusutan	(430.984.260)	(430.984.260)
<b>II</b>	<b>BMN NON NERACA</b>		
		<b>5.053.800</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>EKSTRAKOMPTABEL</b>		
		<b>5.053.800</b>	<b>0</b>
1	BMN Ekstrakomptabel	126.584.000	0
2	Akum. Peny. Ekstrakomptabel	(121.530.200)	0
<b>B</b>	<b>BARANG HILANG</b>		<b>0</b>
<b>C</b>	<b>BARANG RUSAK BERAT</b>		<b>0</b>
	<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>399.192.983.687</b>	<b>399.187.929.887</b>

Catatan Rekonsiliasi: dapat diisi sebagai tambahan penjelasan hasil rekonsiliasi

--



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-20**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ricky Aditya Supratman  
NIP : 19871028 201012 1002  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.18	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Ricky Aditya Supratman  
NIP.19871028 201012 1002

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP.198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-32**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua belas* bulan *Juni* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Burhazir Zamda R  
NIP : 196308281984031002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.27	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Gorontalo ;
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Gorontalo .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA







**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-01**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Benni Risky  
NIP : 198307302007031001  
Jabatan : Kasubbag keuangan dan BMN

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.88	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Selatan
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Selatan

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Benni Risky  
NIP 198307302007031001



Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-02**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : M. Kasim Umasangadji  
NIP : 197704272002121012  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.89	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Maluku Utara
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Maluku Utara

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
  
M. Kasim Umasangadji  
NIP 197704272002121012  


PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001  




**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-03**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Maria titik sumiyati  
NIP : 197305292001122001  
Jabatan : Kasubbag keuangan dan BMN

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.90	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jawa Tengah
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maria titik sumiyati  
NIP 197305292001122001



PIHAK PERTAMA,

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-04**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Adi Gunawan  
NIP : 198208222006041002  
Jabatan : Kasubbag keuangan dan BMN

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.91	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Barat
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kalimantan Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-05**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Suci Rahmina Sari  
NIP : 198505262009122005  
Jabatan : Kasubbag Pengelola keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.92	Acer tahun pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Suci Rahmina Sari  
NIP 198505262009122005

PIHAK PERTAMA,

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-06**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ricky Aditya Supratman  
NIP : 198710282010121003  
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.93	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah NTB
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Ricky Aditya Supratman  
NIP 198710282010121003

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-07**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Dua puluh tujuh* bulan *Januari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Santika Premier Tangerang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mansyur  
NIP : 196710121990031001  
Jabatan : Kasubbag. Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.94	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Barat
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-08**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Heryanto Matma  
NIP : 196810121989031001  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.95	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bengkulu
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Heryanto Matma  
NIP 196810121989031001



PIHAK PERTAMA,

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001







**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-09**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Ni Wayan Armashanti  
NIP : 197411012001122002  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.96	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-10**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Vina Syafrudin  
NIP : 19880215 201012 2 001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.97	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Barat
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Vina Syafrudin  
NIP 19880215 201012 2 001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-11**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Taufik Akbar Nasution  
NIP : 198608022009121001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.98	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jambi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jambi
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jambi

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Taufik Akbar Nasution  
NIP 198608022009121001

  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-12**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Edi Kurniawan  
NIP : 198709082009121006  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.99	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bangka Belitung
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bangka Belitung

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
Edi Kurniawan  
NIP. 198709082009121006

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Heru Triawan  
NIP. 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-13**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Khomaini  
NIP : 19800705 200912 1 003  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.100	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Selatan
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA,**  
  
Khomaini  
NIP 19800705 200912 1 003

**PIHAK PERTAMA,**  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)**

**Nomor : PHN.1-PB.03.01-14**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **satu** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Maraulina  
NIP : 19771231 2008042001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.101	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sumatera Utara
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sumatera Utara

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maraulina  
NIP 19771231 2008042001



Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP)  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-15**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *satu* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Hotel Ritz Carlton Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : R. Indah R. Supriyadi  
NIP : 198308272006042001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.102	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Gorontalo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Gorontalo
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Gorontalo

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
R. Indah R. Supriyadi  
NIP 198308272006042001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN ( LAPTOP )  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-16**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *enam belas* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah D.I Yogyakarta Kementerian Hukum dan HAM , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Fitri Wulansari  
NIP : 198705102009122004  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.103	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik
2.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.15	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah D.I Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah D.I Yogyakarta
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah D.I Yogyakarta

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Fitri Wulansari  
NIP 198705102009122004

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-18**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Nurhayati Sitorus  
NIP : 196901101994032001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.104	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik
2.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.16	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Riau
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa perlengkapan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Riau

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Nurhayati Sitorus  
NIP.196901101994032001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP.198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-19**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *dua puluh delapan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Mansyur  
NIP : 196710121990031001  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.17	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Barat
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa perlengkapan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Barat

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Mansyur  
NIP 196710121990031001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-22**

Pada hari ini *Senin* tanggal *tiga belas* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kalimantan Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Audy Murfi M.Z, S.H.,M.H  
NIP : 196303271989031001  
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Faisol Ali, S.H.,M.H.  
NIP : 196412111990031002  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.20	Primitech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik
2.	Lap Top	3.10.01.02.002.105	Acer Travelmate TMP 214 pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Selatan;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit dan lap top sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

Faisol Ali, S.H.,M.H.  
NIP.196412111990031002



PIHAK PERTAMA,

Audy Murfi M.Z, S.H.,M.H  
NIP.196303271989031001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-23**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Fatmawaty Baud  
NIP : 198007242009122005  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.21	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Utara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Maluku Utara ;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Maluku Utara .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Fatmawaty Baud  
NIP 198007242009122005

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp. 021-8091908 Faks. 021-8011753, 8002265

laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-24**

Pada hari ini *Senin* tanggal *dua puluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Suci Rahmina Sari, S.E  
NIP : 198505262009122005  
Jabatan : Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.22	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau ;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
Suci Rahmina Sari, S.E  
NIP 198505262009122005

  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-25**

Pada hari ini *Senin* tanggal *tujuh belas* bulan *April* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Adly Azhari  
NIP : 198301052010121001  
Jabatan : Penyuluh Hukum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.23	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Selatan ;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast dan lap top pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Sulawesi Selatan .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Adly Azhari  
NIP 198301052010121001

PIHAK PERTAMA

Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-25**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *sebelas* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hajrianor  
NIP : 196612141990031003  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.25	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Jawa Tengah ;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA  
  
Hajrianor  
NIP 196612141990031003

PIHAK PERTAMA  
  
Constantinus Kristomo  
NIP 197404111999031001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-26**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *lima* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mamur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP : 19780701 200312 1 002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.24	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK KEDUA** adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan transfer keluar aset kepada **PIHAK KEDUA** dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. **PIHAK PERTAMA** memberikan BMN berupa sound system (Alat Podcast) pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA,  
Mamur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP 19780701 200312 1 002

PIHAK PERTAMA,  
  
Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP 19740411 199903 1 001





**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01- 26**

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *lima* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Mamur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP : 19780701 200312 1 002  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System ( Alat Podcast)	3.05.02.06.008.24	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bali Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bali
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa sound system (Alat Podcast) pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bali

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa perlengkapan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA,  
Mamur Saputra, S.Sos., M.H.  
NIP 19780701 200312 1 002

  
PIHAK PERTAMA,  
Constantinus Kristomo, S.S., M.H.  
NIP 19740411 199903 1 001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-31**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *dua puluh enam* bulan *Mei* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Constantinus Kristomo  
NIP : 197404111999031001  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Muslim Alibar  
NIP : 197311251999031001  
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.26	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bangka Belitung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bangka Belitung;
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bangka Belitung .

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Muslim Alibar  
NIP 197311251999031001



Constantinus Kristomo  
NIP 197404111999031001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-21**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Rahmat Huda  
NIP : 196911032001121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.19	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohone, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bengkulu
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK KEDUA,  
Rahmat Huda  
NIP 196911032001121001

  
PIHAK PERTAMA,  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA  
PERALATAN DAN MESIN  
Nomor : PHN.1-PB.03.01-21**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *sepuluh* bulan *Maret* tahun *dua ribu dua puluh tiga*, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Heru Triawan  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelolaan BMN  
Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- Nama : Rahmat Huda  
NIP : 196911032001121001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum  
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Sound System (Alat Podcast)	3.05.02.06.008.19	Primatech Pro-FX8, Goldwin Headset & Micropohne, Pengadaan 2022	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Bengkulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Bengkulu
- PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa peralatan podcast pada TA 2023, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Wilayah Bengkulu

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Peralatan podcast sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
  
Rahmat Huda  
NIP 196911032001121001

PIHAK PERTAMA,  
  
Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BMN**  
Nomor : PPH.1-PB.05.05-15

Pada hari **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/08/2023)** bertempat di Kantor Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Satker : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Nama : Heny Widyawati, S.H., M.H.  
NIP : 19760131 200112 2 001  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Barang.

2. Nama Satker : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Nama : Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP : 19730409 200212 1 008  
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Barang.

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa 1 (satu) unit Meja Rapat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan	Kondisi
1.	3050201008	4	Meja Rapat	2006	1	Rp. 9.988.000,-	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang  
Kepala Bagian Umum  
Badan Pembinaan Hukum Nasional,

Pemberi Barang  
Kepala Bagian Umum  
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM,



Anang Ardian Riza, S.H., M.H.  
NIP. 19730409 200212 1 008

Heny Widyawati, S.H., M.H.  
NIP. 19760131 200112 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan Jakarta Selatan 12940  
Call Center: 152  
Laman: www.dgip.go.id, Surel: halodjki@dgip.go.id

BERITA ACARA  
NOMOR HKI.1-PB.02.01-2225

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02/11/2023), kami masing-masing:

- Nama : **Handhy Pratama Prabaswara**  
NIP : 199201162010121001  
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Pihak Pertama,
- Nama : **Heru Triawan**  
NIP : 198506112006041001  
Jabatan : Subkoordinator Pengelola Barang Milik Negara selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan

dengan ini **PIHAK PERTAMA** telah memberikan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

No	Jenis barang/Merek/Type	Jumlah	Kode Barang	NUP	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1333	2023	Baik
2	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1487	2023	Baik
3	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1556	2023	Baik
4	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1560	2023	Baik
5	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1587	2023	Baik
6	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1591	2023	Baik
7	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1592	2023	Baik
8	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1611	2023	Baik
9	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1620	2023	Baik
10	Lap Top ACER Travelmate P214 Core i7 14 Inch	1	3.10.01.02.002	1621	2023	Baik

Berdasarkan hal tersebut:

- BMN tersebut digunakan untuk mendukung kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- Arsip data komputer transfer BMN akan dikirimkan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- Apabila timbul biaya yang diakibatkan dari Barang Milik Negara yang diserahkan, maka menjadi tanggungjawab Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Heru Triawan  
NIP 198506112006041001



Dibuat di Jakarta, 02 November 2023  
PIHAK PERTAMA,

Handhy Pratama Prabaswara  
NIP 199201162010121001



REVIU LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

REVIU LAPORAN KEUANGAN  
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023

**Catatan Hasil Reviu (CHR)**

**Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Inspektorat Jenderal**

**CATATAN HASIL REVIU**

**LAPORAN KEUANGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

**(selaku UAPPA-E1)**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

<b>Kementerian Hukum dan HAM RI Inspektorat Jenderal</b>		Disusun oleh/Tanggal	AT/ 13-02-2024
		Direviu oleh/Tanggal	KT/ 13-02-2024
		Disetujui oleh/Tanggal	PT/ 15-02-2024
<b>UAPA</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kementerian Hukum dan HAM	
<b>UAPPA-E1</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Badan Pembinaan Hukum Nasional	
<b>UAPPA-W</b>	<input type="checkbox"/>	-	
<b>UAKPA</b>	<input type="checkbox"/>	-	
<b>URAIAN CATATAN HASIL REVIU</b>			<b>INDEKS KKR</b>
<b>PENYELENGGARAAN AKUNTANSI</b>			
-			KKR-HR
<b>PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>A. LRA</b>			
-			KKR- LRA
<b>B. LO</b>			
-			KKR-LO
<b>C. LPE</b>			
-			KKR- LPE
<b>D. NERACA</b>			
<p>Terdapat Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang berlokasi jauh dari lokasi kantor BPHN (di daerah Tangerang) yang terbangun di atas Tanah tercatat kepemilikan UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN sudah tidak mengganggu anggaran pemeliharaan terhadap Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen tersebut sejak selesai dibangun dan berencana akan menyerahkan Bangunan Masjid tersebut, nilai manfaat, dan status aset kepada UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN telah melakukan pembahasan dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal dan ditindaklanjuti dengan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Cq. Kepala Biro Umum dengan Nomor</p>			KKR- NRC



PHN.1-PB.02.04-01 tanggal 09 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Inspektorat Jenderal, namun sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut penyelesaian dari Biro Umum Sekretariat Jenderal.	
<b>E. MONITORING SAKTI</b>	
Terdapat <i>to do list</i> atas Transaksi Resiprokal antara Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan UPN Veteran Jakarta atas pencatatan belanja terkait Bantuan Hukum. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak pengelola keuangan, diketahui bahwa <i>to do list</i> tersebut muncul dikarenakan anggaran Bantuan Hukum secara otomatis masuk ke rekening bank yang dalam hal ini teregistrasi atas nama UPN Veteran Jakarta, namun pihak UPN Veteran Jakarta tidak mencatatkan anggaran Bantuan Hukum tersebut sebagai Pendapatan. Hal ini disebabkan karena anggaran Bantuan Hukum tersebut akan digunakan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum kampus yang bersangkutan, sehingga menurut UPN Veteran Jakarta pihaknya tidak mengakui dan mencatat anggaran tersebut sebagai Pendapatan. Untuk transaksi resiprokal sudah ditindaklanjuti dengan penghapusan di SAKTI setelah koordinasi dengan KPPN dengan data dukung surat pernyataan dari UPN Veteran.	
<b>F. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan nominal Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada neraca percobaan akrual dan CaLK pada pos Laporan Operasional, dengan Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel yang belum dijelaskan secara memadai. Pada neraca percobaan akrual dan CaLK Laporan Operasional, nilai beban penyusutan Gedung dan bangunan adalah sebesar Rp4.086.621.945,00 sedangkan pada laporan penyusutan barang adalah sebesar Rp4.142.362.865,00.</li> <li>2. Terdapat perbedaan nominal pada Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya pada penjelasan CaLK dengan Mutasi Tambah pada Laporan Barang Intrakomptabel pada Pos Aset Tetap Lainnya (Monografi dan Buku Lainnya) yang belum dijelaskan secara memadai. Nilai mutasi tambah aset tetap lainnya pada CaLK adalah sebesar Rp206.993.023,00 sedangkan pada laporan barang intrakomptabel adalah sebesar Rp235.023.023,00.</li> </ol>	KKR-CaLK
<b>KOREKSI/PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DISETUJUI</b>	
-	
<b>REKOMENDASI</b>	
Direkomendasikan agar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Badan Pembinaan Hukum Nasional agar melakukan perbaikan terhadap Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sesuai Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:	

1. Agar terhadap Aset Gedung Bangunan UAKPB BPHN berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang terbangun di atas aset tanah yang kepemilikannya tercatat di UAKPB Sekretariat Jenderal dilakukan transfer keluar ke UAKPB Sekretariat Jenderal;
2. Agar UAPPA-E1 BPHN membuat kebijakan/surat untuk mencegah transaksi resipokal pada aplikasi SAKTI yang menginformasikan bahwa dalam proses penyusunan kontrak Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jika menggunakan rekening Pemerintah maka harus mencatat sebagai pendapatan, dikecualikan bagi Pemberi Bantuan Hukum PTN yang menggunakan rekening Pemberi Bantuan Hukum selain rekening Pemerintah;
3. Agar memberikan penjelasan yang memadai pada CaLK atas perbedaan pada nominal:
  - a. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada neraca percobaan akrual dan CaLK pada pos Laporan Operasional, dengan Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel; dan
  - b. Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya pada CaLK dengan Mutasi Tambah Pos Aset Tetap Lainnya (Monografi dan Buku Lainnya) pada Laporan Barang Intrakomptabel.

Sekretaris  
Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

I Gusti Putu Milawati  
NIP 197705092001122001



Jakarta, 16 Februari 2024

Inspektoral Jenderal  
Pengendali Teknis I,

Andriyanto Wahyu Prasetio  
NIP 197012181999031002  
Pengendali Teknis II,

Fandyla Wahyu Sasongko  
NIP 198402112006041001

## Hasil Pemeriksaan Kas

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 9890884092881000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00292/DRPP/409288/2023

### I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

#### A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Saldo BP BPP	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

#### B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0
4 Saldo Pajak	Rp.	0
5 Saldo Hibah	Rp.	0
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0

#### C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp. 0

### II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

#### A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

#### B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3)

Rp. 0

### III. Hasil Rekonsiliasi Internal

#### A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0
2 a. Saldo TUP	Rp.	0
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0
3 Saldo Lainnya	Rp.	0
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0

#### B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0

#### C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA

(III.A.4-III.B.4) Rp. 0

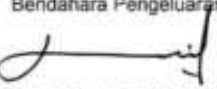
### IV. Penjelasan atas selisih

#### A. Selisih Kas (II.B)

-

#### B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

-

Yang diperiksa  
Bendahara Pengeluaran  
  
UCI BAYU KURNIAWAN  
NIP 198801272009121006



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN**

**Bulan: Desember 2023**

Kementerian/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-013.10.1.409288/2023

Unit Organisasi : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.51) DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT KPPN : (139) Jakarta V

Satuan Kerja : (409288) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00292/DRPP/409288/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>BP Kas, BPP dan UM</b>	302.550.000,00	2.390.450.116,00	2.693.000.116,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	302.550.000,00	2.390.450.116,00	2.693.000.116,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>BP Selain Kas</b>	302.550.000,00	1.640.450.116,00	1.943.000.116,00	0,00
	1. BP UP*)	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	792.796.394,00	792.796.394,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	2.550.000,00	847.653.722,00	850.203.722,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

\*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terlampir salinan rekening koran)
<b>3. Jumlah Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
<b>3. Selisih Kas</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
<hr/>		
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

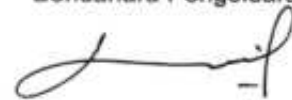
1. -

2. -

Mengetahui  
Kuasa Pengguna Anggaran  
  
GUSTI PUTRI MILAWATI  
NIP. 198801272009121006

KOTA JAKARTA PUSAT, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



UCI BAYU KURNIAWAN

NIP 198801272009121006

Di cetak pada tanggal 04 Januari 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)									
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)									
Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)									
Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	13:40:19	209495	TARIK TUNAI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI UANG PE	Rp. 200,000,000	Rp. 200,000,000	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	15:02:34	972011	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 221,922,393	Rp. 21,922,393	-	Rp. 200,000,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	14:40:36	947736	TRANSFER KE   TRF TO:000000007031972038   PEMINDAHAN KE 7031972038 Ibu NURLAELA SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 229,918,393	Rp. 7,996,000	-	Rp. 221,922,393	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	14:40:36	947730	TRANSFER KE   Pembayaran rembers TU Pusren TRF TO:000000008027   PEMINDAHAN KE 802765163 Sdri SARI PANGESTI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 237,159,693	Rp. 7,241,300	-	Rp. 229,918,393	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	14:40:35	947695	TRANSFER KE   Pembayaran rembers TU Pusedok TRF TO:000000001905   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 260,806,161	Rp. 20,954,468	-	Rp. 239,851,693	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	14:40:35	947694	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000032604   PEMINDAHAN KE 326040137 Sdri SYAFITRI MULIANI IPA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 239,851,693	Rp. 2,692,000	-	Rp. 237,159,693	(TELLER)	(Empty)
2023-12-21	14:40:35	947692	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000080276   PEMINDAHAN KE 802765174 Sdri NURUL ROHMAH   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 287,542,501	Rp. 26,736,340	-	Rp. 260,806,161	(TELLER)	(Empty)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-18	13:49:21	970503	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000703197   PEMINDAHAN KE 7031972038 Ibu NURLAELA SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 337,542,501	Rp. 50,000,000	-	Rp. 287,542,501	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	10:41:59	992500	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang TRF TO:000   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 344,668,901	Rp. 7,126,400	-	Rp. 337,542,501	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	10:35:31	956758	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas Bali TRF TO:000000000   PEMINDAHAN KE 242859217 Sdri INDRY MEUTIA SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 372,580,901	Rp. 27,912,000	-	Rp. 344,668,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	10:18:21	963873	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium narasumber TRF TO:000000000   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 375,640,901	Rp. 3,060,000	-	Rp. 372,580,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	10:12:29	931454	TRANSFER KE   Pembayaran Transport Perjalanan dinas TRF TO:0000   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 383,452,901	Rp. 7,812,000	-	Rp. 375,640,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	10:00:24	967106	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 410,968,547	Rp. 27,515,646	-	Rp. 383,452,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	09:33:18	927609	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium Penulis TRF TO:000000000190   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 452,048,547	Rp. 41,080,000	-	Rp. 410,968,547	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-18	09:33:18	927607	TRANSFER KE   Pembayaran Transport Perjalanan dinas TRF TO:0000   PEMINDAHAN KE 802765163 Sdri SARI PANGESTI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 453,508,547	Rp. 1,460,000	-	Rp. 452,048,547	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	09:33:18	927569	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas PUU Bali TRF TO:00000   PEMINDAHAN KE 326040137 Sdri SYAFITRI MULIANI IPA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 531,946,547	Rp. 78,438,000	-	Rp. 453,508,547	(TELLER)	(Empty)
2023-12-18	09:33:18	927568	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000019057   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 542,022,447	Rp. 10,075,900	-	Rp. 531,946,547	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	14:36:10	955014	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium TRF TO:000000000190574500   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 595,344,578	Rp. 53,322,131	-	Rp. 542,022,447	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	14:20:03	766442	TARIK TUNAI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI UANG PE	Rp. 795,344,578	Rp. 200,000,000	-	Rp. 595,344,578	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	13:44:01	975254	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium TRF TO:000000001156886741   PEMINDAHAN KE 1156886741 Sdri MURNI HANDAYANI SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 806,819,578	Rp. 11,475,000	-	Rp. 795,344,578	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	13:44:00	975226	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium TRF TO:000000000193721588   PEMINDAHAN KE 193721588 Sdri IIS TRISNAWATI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 813,194,578	Rp. 6,375,000	-	Rp. 806,819,578	(TELLER)	(Empty)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-14	09:57:17	931275	TRANSFER KE   Pembayaran Tiket Perjalanan dinas malang TRF TO:0   PEMINDAHAN KE 732573015 AYOMI CITRA WISATA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 1,002,892,188	Rp. 189,697,610	-	Rp. 813,194,578	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	09:21:25	101785	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055843000001 39130305584300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 999,832,188	-	Rp. 3,060,000	Rp. 1,002,892,188	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	09:21:25	101756	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055836000001 39130305583600000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 989,756,288	-	Rp. 10,075,900	Rp. 999,832,188	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	09:21:25	101739	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055835000001 39130305583500000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 988,296,288	-	Rp. 1,460,000	Rp. 989,756,288	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	09:21:25	101718	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055834000001 39130305583400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 960,384,288	-	Rp. 27,912,000	Rp. 988,296,288	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	09:21:24	101559	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055833000001 39130305583300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 938,724,288	-	Rp. 21,660,000	Rp. 960,384,288	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	09:21:24	101531	TRANSFER DARI   0977000077 231391303055832000001 39130305583200000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 919,304,288	-	Rp. 19,420,000	Rp. 938,724,288	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-13	11:59:35	984801	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas dan honor TRF TO:0000   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 976,470,788	Rp. 57,166,500	-	Rp. 919,304,288	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	11:02:00	654177	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054875000001 39130305487500000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 971,625,788	-	Rp. 4,845,000	Rp. 976,470,788	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:02:00	654168	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054874000001 39130305487400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 944,110,142	-	Rp. 27,515,646	Rp. 971,625,788	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:01:40	644023	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054913000001 39130305491300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 874,489,519	-	Rp. 69,620,623	Rp. 944,110,142	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:01:40	644010	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054912000001 39130305491200000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 796,051,519	-	Rp. 78,438,000	Rp. 874,489,519	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:01:39	643834	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054935000001 39130305493500000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 764,251,519	-	Rp. 31,800,000	Rp. 796,051,519	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:01:39	643815	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054934000001 39130305493400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 761,031,019	-	Rp. 3,220,500	Rp. 764,251,519	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-13	11:01:39	643518	TRANSFER DARI   0977000077 231391303054933000001 391303054933000000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 753,219,019	-	Rp. 7,812,000	Rp. 761,031,019	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	09:42:17	950118	TRANSFER KE   Pembayaran penginapan 4 malam TRF TO:000000001156   PEMINDAHAN KE 1156886683 Sdri ANTIKA DESY SAPUTRI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 763,419,019	Rp. 10,200,000	-	Rp. 753,219,019	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	09:42:16	950083	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000051405   PEMINDAHAN KE 514053663 Bpk BHAKTI PURNAMA LEONARDO   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 789,419,019	Rp. 26,000,000	-	Rp. 763,419,019	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	09:42:16	950082	TRANSFER KE   Pembayaran transport darat TRF TO:000000000984647   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 789,864,019	Rp. 445,000	-	Rp. 789,419,019	(TELLER)	(Empty)
2023-12-12	14:06:50	963194	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan TRF TO:0   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 814,573,819	Rp. 24,709,800	-	Rp. 789,864,019	(TELLER)	(Empty)
2023-12-12	12:05:34	914400	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000014531   PEMINDAHAN KE 145311727 Bpk KRISNA PRAMUDIA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 829,173,819	Rp. 14,600,000	-	Rp. 814,573,819	(TELLER)	(Empty)
2023-12-12	09:07:13	354822	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053845000001 391303053845000000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 822,047,419	-	Rp. 7,126,400	Rp. 829,173,819	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-12	09:07:13	354808	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053844000001 39130305384400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 797,337,619	-	Rp. 24,709,800	Rp. 822,047,419	(SPAN)	(Empty)
2023-12-12	09:07:13	354790	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053843000001 39130305384300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 782,737,619	-	Rp. 14,600,000	Rp. 797,337,619	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	14:52:24	924178	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 827,459,969	Rp. 44,722,350	-	Rp. 782,737,619	(TELLER)	(Empty)
2023-12-11	11:36:02	945071	TRANSFER KE   Pembayaran perjalanan dinas rakor TRF TO:00000000   PEMINDAHAN KE 802765141 Sdri NASTITI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 859,259,969	Rp. 31,800,000	-	Rp. 827,459,969	(TELLER)	(Empty)
2023-12-11	11:06:35	675074	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053531000001 39130305353100000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 852,884,969	-	Rp. 6,375,000	Rp. 859,259,969	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	11:06:35	675049	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053530000001 39130305353000000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 849,697,469	-	Rp. 3,187,500	Rp. 852,884,969	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	11:06:35	675017	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053529000001 39130305352900000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 829,030,469	-	Rp. 20,667,000	Rp. 849,697,469	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-11	11:06:35	674993	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053528000001 39130305352800000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 806,938,469	-	Rp. 22,092,000	Rp. 829,030,469	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	11:06:35	674979	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053527000001 39130305352700000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 789,169,338	-	Rp. 17,769,131	Rp. 806,938,469	(SPAN)	(Empty)
2023-12-11	11:06:35	674959	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053526000001 39130305352600000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 784,324,338	-	Rp. 4,845,000	Rp. 789,169,338	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	14:36:06	931622	TRANSFER KE   Tiket a.n Antika. Pramesti. Riri TRF TO:000000000   PEMINDAHAN KE 732573015 AYOMI CITRA WISATA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 834,158,894	Rp. 49,834,556	-	Rp. 784,324,338	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	14:01:18	360644	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053286000001 39130305328600000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 831,608,894	-	Rp. 2,550,000	Rp. 834,158,894	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	14:01:18	360623	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053285000001 39130305328500000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 808,096,394	-	Rp. 23,512,500	Rp. 831,608,894	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	14:01:18	360603	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053284000001 39130305328400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 804,271,394	-	Rp. 3,825,000	Rp. 808,096,394	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-08	12:58:24	934049	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 820,121,394	Rp. 15,850,000	-	Rp. 804,271,394	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	10:43:59	169405	TRANSFER DARI   0977000077 231391303053087000001 39130305308700000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 808,646,394	-	Rp. 11,475,000	Rp. 820,121,394	(SPAN)	(Empty)
2023-12-07	13:38:20	920127	TRANSFER KE   Biaya Pembelian Buku TRF TO:00000000984647561   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 867,332,783	Rp. 58,686,389	-	Rp. 808,646,394	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	08:57:31	958108	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:0000000019372   PEMINDAHAN KE 193721725 Bpk HERU TRIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 884,140,783	Rp. 16,808,000	-	Rp. 867,332,783	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	12:12:26	522203	TRANSFER DARI   0977000077 231391303051656000001 39130305165600000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 91,344,389	-	Rp. 792,796,394	Rp. 884,140,783	(SPAN)	(Empty)
2023-12-05	10:55:26	927123	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000178623   PEMINDAHAN KE 1786237675 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 108,152,389	Rp. 16,808,000	-	Rp. 91,344,389	(TELLER)	(Empty)
2023-12-05	10:11:45	160901	TRANSFER DARI   0977000077 231391303051398000001 39130305139800000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 91,344,389	-	Rp. 16,808,000	Rp. 108,152,389	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-05	10:11:43	159832	TRANSFER DARI   0977000077 231391303051477000001 39130305147700000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 75,494,389	-	Rp. 15,850,000	Rp. 91,344,389	(SPAN)	(Empty)
2023-12-04	14:29:32	388979	TARIK TUNAI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI UANG PE	Rp. 175,494,389	Rp. 100,000,000	-	Rp. 75,494,389	(TELLER)	(Empty)
2023-12-04	13:28:01	992106	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000051405   PEMINDAHAN KE 514053663 Bpk BHAKTI PURNAMA LEONARDO   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 200,000,000	Rp. 24,505,611	-	Rp. 175,494,389	(TELLER)	(Empty)
2023-12-04	10:32:53	994438	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 239,823,585	Rp. 39,823,585	-	Rp. 200,000,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	17:19:05	960403	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000115688   PEMINDAHAN KE 1156886683 Sdri ANTIKA DESY SAPUTRI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 251,423,585	Rp. 11,600,000	-	Rp. 239,823,585	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:30:57	916135	TRANSFER KE   Pembayaran Transport Perjalanan dinas TRF TO:0000   PEMINDAHAN KE 1156886741 Sdri MURNI HANDAYANI SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 265,445,000	Rp. 14,021,415	-	Rp. 251,423,585	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	15:22:50	961152	TRANSFER KE   Pembayaran pengadaan ID Card TRF TO:0000000001131   PEMINDAHAN KE 113188224 Sdr RINTO MANURUNG   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 289,825,000	Rp. 24,380,000	-	Rp. 265,445,000	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-01	15:22:49	961122	TRANSFER KE   Pembayaran Honorarium narasumber TRF TO:000000000   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 294,670,000	Rp. 4,845,000	-	Rp. 289,825,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	14:50:10	414702	TARIK TUNAI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI LANGSUN	Rp. 544,670,000	Rp. 250,000,000	-	Rp. 294,670,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	13:16:28	902182	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000019057   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 555,920,000	Rp. 11,250,000	-	Rp. 544,670,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	12:56:38	965361	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000098464   PEMINDAHAN KE 984647561 Sdr UCI BAYU KURNIAWAN   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 571,081,265	Rp. 15,161,265	-	Rp. 555,920,000	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	12:56:38	965358	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000703197   PEMINDAHAN KE 7031972038 Ibu NURLAELA SARI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 602,900,022	Rp. 31,818,757	-	Rp. 571,081,265	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	12:56:38	965317	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000019057   PEMINDAHAN KE 190574500 Sdri LIANAWATI RAHAYU   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 630,701,022	Rp. 27,801,000	-	Rp. 602,900,022	(TELLER)	(Empty)
2023-12-01	12:56:38	965316	TRANSFER KE   Pembayaran Perjalanan dinas TRF TO:00000000117150   PEMINDAHAN KE 1171500828 Ibu NUR PRAMESTI ARMIDA   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 647,971,722	Rp. 17,270,700	-	Rp. 630,701,022	(TELLER)	(Empty)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-01	10:29:08	007602	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050592000001 39130305059200000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 645,984,222	-	Rp. 1,987,500	Rp. 647,971,722	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	10:29:07	007125	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050607000001 39130305060700000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 634,734,222	-	Rp. 11,250,000	Rp. 645,984,222	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	10:29:07	007095	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050606000001 39130305060600000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 606,334,222	-	Rp. 28,400,000	Rp. 634,734,222	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	10:29:07	007073	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050605000001 39130305060500000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 591,116,000	-	Rp. 15,218,222	Rp. 606,334,222	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	10:28:25	777382	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050604000001 39130305060400000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 563,315,000	-	Rp. 27,801,000	Rp. 591,116,000	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	10:28:25	777358	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050603000001 39130305060300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 558,470,000	-	Rp. 4,845,000	Rp. 563,315,000	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	09:49:56	687669	TRANSFER DARI   0977000077 231391303050383000001 39130305038300000   PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI   9890884092881000 BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI	Rp. 302,550,000	-	Rp. 255,920,000	Rp. 558,470,000	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI (013)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (10)

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (409288)

Rekening Induk : RKK BADAN PHN KEMENKUMHAM OPS (977000077)

Rekening Satker : BPG 139 BPHN DEPKUMHAM RI (9890884092881000)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
Total Mutasi					Rp. 1,943,000,116	Rp. 1,640,450,116	Rp. 0		

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 001  
 Tanggal : 02 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	9.358.395	-
2	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	9.358.395

Keterangan:  
 Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

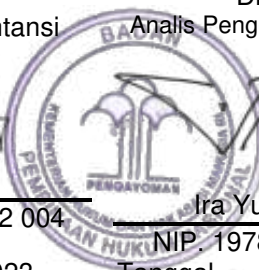


Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Januari 2023

Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda

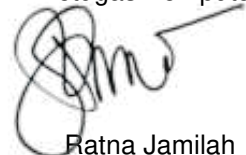


Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Januari 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 02 Januari 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 002  
 Tanggal : 18 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	67.159.197	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	67.159.197

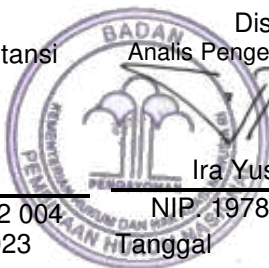
**Keterangan:**

Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2022 dengan No ID 547100163555


Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
Rizky Awaliyan

NIP. 19830228 200901 2 004  
Tanggal : 18 Januari 2023



Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

  
Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001  
Tanggal : 18 Januari 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer

  
Fatna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001  
Tanggal : 18 Januari 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 003  
 Tanggal : 18 Januari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	39.189.068	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	39.189.068

**Keterangan:**

Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2022 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079

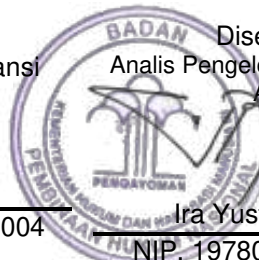
Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2023



Disetujui oleh :  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 18 Januari 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 004  
 Tanggal : 06 Februari 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang Masih Harus Dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	1.065.020	-
2	K	522112	Beban Langganan Telepon	-	1.065.020

Keterangan:  
Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2022

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Februari 2023

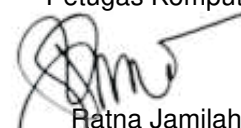
Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

  
Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Februari 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer

  
Fatna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 06 Februari 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 005  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pendapatan Diterima Dimuka

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.547.806	-
2	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	-	27.547.806

Keterangan:  
 Jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin BPHN TA 2023

Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda



Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 006  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024

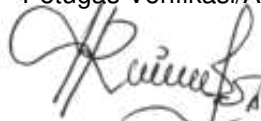
**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	√	Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	218111	Utang yang belum diterima tagihannya	589.375.493	-
2	K	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	589.375.493

Keterangan:  
 Jurnal Penyesuaian atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024

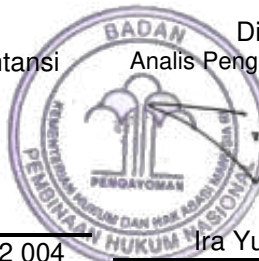
Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda



Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023



# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 007  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	59.552.282	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	59.552.282

Keterangan:  
 Jurnal utang listrik I Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024 dengan No. ID 547100163555

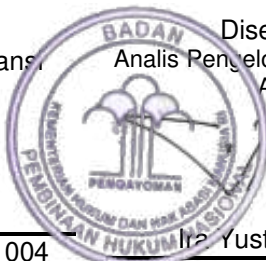
Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda

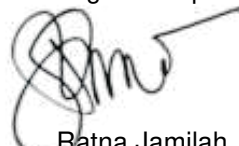


Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 008  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

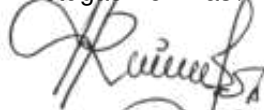
**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	37.728.322	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	37.728.322

Keterangan:  
 Jurnal utang listrik II Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024 dengan No. ID 547100717100 dan 547102931079

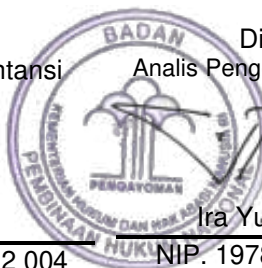
Dibuat oleh :  
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda

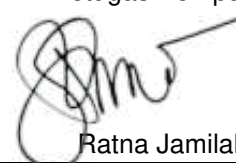


Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
 Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

## MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 009  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Beban yang masih harus dibayar

### Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Beban Langganan Telepon	972.858	-
2	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-	972.858

Keterangan:  
Jurnal utang telepon Bulan Desember 2023 yang dibayar bulan Januari 2024

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

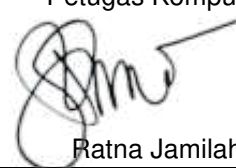


Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 010  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Koreksi beban atas kelebihan pembayaran

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24	√	Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	12.068.375	-
2	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	-	12.068.375

**Keterangan:**

Koreksi beban atas kelebihan pembayaran outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023



Disetujui oleh :  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 011  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan piutang lainnya atas Koreksi beban

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaiaan Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	√	Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	60.342	-
2	K	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	-	60.342

**Keterangan:**

Penyisihan piutang lainnya atas Koreksi beban atas temuan pengembalian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi

  
Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004  
Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahli Muda

  
Ira Yustisia Smarayoni  
NIP. 19780313 200312 2 001  
Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer

  
Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001  
Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 012  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1	Pendapatan Diterima Di Muka	17	Transfer Masuk
2	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18	Transfer Keluar
3	Belanja Dibayar Di Muka	19	Koreksi Beban Aset
4	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	Penyisihan Piutang	21	Kas Lainnya di BLU
6	Penghapusan Piutang	22	Uang Muka Belanja
7	Penyusutan Aset	23	Perolehan Aset
8	Kas Di Bendahara Penerimaan	24	Koreksi Piutang/utang
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25	Hibah Langsung
10	Persediaan	26	
11	Koreksi Antar Beban	27	
12	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28	
13	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30	Penyesuaian Neraca
15	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31	√ Jurnal Koreksi
16	Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	47.080.355	-
2	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	47.080.355

**Keterangan:**

Koreksi atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJD dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

Disetujui oleh :  
Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
Ahl Muda




Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jamilah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023

# MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 No. Dokumen : 013  
 Tanggal : 31 Desember 2023  
 Tahun Anggaran : 2023  
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian atas Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran

**Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :**

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	√	Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	235.402	-
2	K	116212	Penyisihan Utang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	-	235.402

**Keterangan:**

Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan.

Dibuat oleh :  
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 31 Desember 2023

  
 Disetujui oleh :  
 Analis Pengelolaan Keuangan APBN  
 Ahli Muda  
  
 Ira Yustisia Sizarayoni  
 NIP. 19780313 200312 2 001  
 Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  
Petugas Komputer



Ratna Jannah

NIP. 19860321 201712 2 001

Tanggal : 31 Desember 2023



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 241391303000316

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241391303000316	16-01-2024	18-01-2024	97,280,604.00	IDR	1	18-01-2024	97,280,604	NON GAJI	00018T/409288/2024	16-01-2024	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai nota tagihan nomor 0009/AGA.04.01/F06100000/2024 tgl 04 Januari 2024. Rekening listrik bulan Januari 2024 dengan ID 547100163555, ID 547100717100, dan ID 547102931079. Kantor BPHN TA 2024.	Cek Akun	<input type="checkbox"/>





CEK DISTRIBUSI COA

AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	409288	139	522111	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	97,280,604
TOTAL BELANJA											97,280,604
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
TOTAL POTONGAN											0
NILAI SP2D											97,280,604



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 241391303001196

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	241391303001196	01-02-2024	02-02-2024	189,755,445.00	IDR	1	02-02-2024	189,755,445	GUP	00037T/409288/2024	01-02-2024	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



CEK DISTRIBUSI COA

AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	409288	139	523111	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	148,245,165
2	409288	139	521811	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	12,349,000
3	409288	139	521111	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	5,929,295
4	409288	139	521211	01310WA	1614EBD	A000000001	1	0199	2	BELANJA	5,306,550
5	409288	139	521211	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	4,320,000
6	409288	139	521211	01310WA	1614EBC	A000000001	1	0199	2	BELANJA	3,763,900
7	409288	139	522111	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	2,283,752
8	409288	139	524111	01310WA	1614EBD	A000000001	1	0199	2	BELANJA	1,961,807
9	409288	139	524113	01310WA	1614EBD	A000000001	1	0199	2	BELANJA	1,700,000
10	409288	139	522119	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	1,447,485
11	409288	139	522112	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	972,858
12	409288	139	522191	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	600,000
13	409288	139	524113	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	510,000
14	409288	139	524113	01310WA	1614EBC	A000000001	1	0199	2	BELANJA	340,000
15	409288	139	524111	01310WA	1614EBA	A000000001	1	0199	2	BELANJA	25,633
<b>TOTAL BELANJA</b>											<b>189,755,445</b>
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
<b>TOTAL POTONGAN</b>											<b>0</b>
<b>NILAI SP2D</b>											<b>189,755,445</b>

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Kementerian  
Keuangan  
**BNI**

**PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero), TBK**

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 04/05/23 09:47:08  
Tanggal Buku : 04/05/23  
Code Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTB : 000000084656  
NTPN : 792195UDQBTHR824  
STAN : 962356

Data Setoran :  
Code Billing : 700230504194116  
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Kategori Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 540.000,00  
Terbilang : lima ratus empat puluh ribu rupiah

Mata Uang : IDR



*This is a computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan  
Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses  
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230504194116  
 Tanggal Billing : 04-05-2023 08:59  
 Tanggal Kadaluarsa : 11-05-2023 23:59  
 Tanggal Bayar : 04-MAY-23 09:47.08.916853 AM  
 Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
 Channel Bayar : Teller  
 Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran  
 Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Total Disetor : 540.000 (IDR)  
 Terbilang : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah (IDR)  
 Status : TERBAYAR  
 NTPN : 792195UDQBTHR824  
 NTB : 000000084656  
 KPPN : JAKARTA V  
 Program : Program Dukungan Manajemen  
 Sumber Dana : RM  
 Cara Penarikan : RM  
 Register : 00000001  
 Kewenangan : Kantor Pusat  
 Keterangan : Pengembalian belanja pegawai untuk tunj Fungsional JF Analisis Hukum Pertama bin Maret 2023 an peg Deasy Kamila

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran BPHN  
 Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
 Uraian : Output : EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 Periode : 032023 s/d 032023  
 Akun : 511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS  
 Jumlah Setoran : 540.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hal.kemenkeu.go.id/>.

Keluar

**F. Bank Negara Indonesia  
(Persero), TBK**

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Penerimaan Negara Bukan Pajak**



KU. IN. : 02103 074745  
NO. PER. : CASH  
Jumlah : 1.000.000  
0037 - KCU JATINEGARA

Waktu Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 04/05/23 09:46:51  
Tanggal Buku : 04/05/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTB : 000000074745  
NTPN : 2F2D92CNK1K03JGA  
STAN : 962275

Tipe Setoran :  
Kode Billing : 760230504074762  
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA PENGELUARAN  
Kementerian / Lembaga : 013  
Tingkat Eselon I : 10  
Kategori Kerja : 709288  
Jumlah Setoran : 1.000.000,00  
Keterangan : satu juta rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



04/05/2023 09:46:51



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230504074762  
 Tanggal Billing : 04-05-2023 08:54  
 Tanggal Kadaluarsa : 11-05-2023 23:59  
 Tanggal Bayar : 04-MAY-23 09:46:51.233014 AM  
 Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
 Channel Bayar : Teller  
 Nama Penyetor : Bendahara Pengeluaran  
 Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Total Disetor : 1.000.000 (IDR)  
 Terbilang : Satu Juta Rupiah (IDR)  
 Status : TERBAYAR  
 NTPN : 2F2D92CNR1K03JGA  
 NTB : 000000074745  
 KPPN : JAKARTA V  
 Program : Program Dukungan Manajemen  
 Sumber Dana : RM  
 Cara Penarikan : RM  
 Register : 00000001  
 Kewenangan : Kantor Pusat  
 Keterangan : Pengembalian belanja pegawai untuk tunj fungsional JF Perawat Penyelia bln Feb dan Maret 2023 an peg Dien Shalli

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran BPHN  
 Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
 Uraian : Output : EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 Periode : 022023 s/d 032023  
 Akun : 511124 - Belanja Tunj. Fungsional PNS  
 Jumlah Setoran : 1.000.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DIPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.

Keluar



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May. Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640  
Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 –  
801175525

Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertangan tangan di bawah ini :

Nama : Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP : 197811082001122001  
Pangkat/Golongan : Pembina Golongan I/IV-b

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Diskusi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha dan Jaminan Benda Bergerak pada tanggal 16-18 Februari 2023 di Palembang (Sumatera Selatan) telah diajukan pengajuan LS sejumlah Rp. 48.448.000 dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang tiket pesawat : Rp.20.412.000
  - Uang Penginapan : Rp.17.776.000
  - Uang Harian : Rp.10.260.000

Dalam pelaksanaannya biaya perjalanan dinas tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.45.790.667 dikarenakan adanya selisih biaya uang tiket pesawat dan biaya uang penginapan sehingga berubah dengan rincian sebagai berikut,

- Uang tiket pesawat : Rp.19.022.667
  - Uang Penginapan : Rp.16.508.000
  - Uang Harian : Rp.10.260.000
2. Biaya penginapan dimaksud akan dikembalikan kepada Bendahara BPHN sejumlah **Rp.2.657.333** dengan rincian biaya uang tiket pesawat sejumlah Rp.1.389.333 dan uang penginapan sejumlah Rp.1.268.000

Jakarta, <sup>23</sup> Februari 2023

Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP.197811082001122001



NO. TRX. : 87705 500584 95202 15/06/2023 11:05:09  
 MO. REF. : CASH  
 JUMLAH : 2.657.333  
 (03) - KCU JATINEGARA



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Penerimaan Negara Bukan Pajak**

**PT. Bank Negara Indonesia**  
**(Persero), TBK**

Data Pembayaran :			
Tanggal dan Jam Bayar	:	15/06/23 11:05:09	MTB
Tanggal Buku	:	15/06/23	MTBK
Kele Cabang Bank	:	37	STAN
		KCU JATINEGARA	
Data Detiloran :			
Kode Billing	:	100230615416707	
Nama Wajib Bayar	:	BADAN PENERIMAAN BUNDA NASIONAL	
Rekening / Lembaga	:	012	
Unit Eriton 1	:	10	
Jatuh Wertin	:	409298	
Jumlah Brucorn	:	2.657.333,00	
Tertitilang	:	000 juta lebih ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tiga rupiah	Mata Uang : IDR

*(This is computer generated message and requires no signature)*  
*Informasi ini di terima komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*  
*(This is a computer generated message and requires no signature)*  
*Informasi ini di terima komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230615436707  
Tanggal Billing : 15-06-2023 10:11  
Tanggal Kadaluarsa : 22-06-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 15-JUN-23 11.05.09.855660 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Periyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 2.657.333 (IDR)  
Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 5040C6QRA6J8B3D3  
NTB : 000000500586  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Pembentukan Regulasi  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian selisih biaya tiket pesawat kegiatan Perjadin Diskusi Penyusunan NA di Palembang

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1613-Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
Uraian : Output : ABO-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM  
Periode : 062023 s/d 062023  
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Jumlah Setoran : 2.657.333 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket, teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DIPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemrenkeu.go.id/>.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DITJEN PERBENDAHARAAN  
KPPN  
1 3 9  
Jakarta V

**Surat Setoran  
Pengembalian Belanja  
(SSPB)**

Nomor: 00011/SSPB/409288/2023  
Tanggal: 15 Juni 2023

Lembar Ke - 1  
Untuk  
BENDAHARA

**KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :**

- A. 1. NPWP Bendahara : 000265884005000
- 2. Nama Bendahara : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Alamat : JL. MAY.JEND SUTOYO CILILITAN JAKARTA TIMUR
- B. 1. Kementerian/ Lembaga : 0 1 3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
- 2. Unit Organisasi Eselon 1 : 1 0 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 3. Satuan Kerja : 4 0 9 2 8 8 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- 4. Fungsi / Sub Fungsi / Program : 0 3 0 3 B B  
KETERTIBAN DAN KEAMANAN /  
PEMBINAAN HUKUM /  
Program Pembentukan Regulasi
- 5. Kegiatan : 1 6 1 3 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
- 6. Lokasi : 0 1 9 9 KOTA JAKARTA PUSAT
- C. Kode Akun dan Uraian : 5 2 4 1 1 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- D. Jumlah Setoran : Rp. 2.657.333,00
- Dengan Huruf : Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga

**PERHATIAN**

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini.

Untuk Keperluan Pengembalian selisih biaya pesawat dan penginapan kegiatan Perjadin NA RUU di Palembang

KOTA JAKARTA PUSAT , 16 Juni 2023

UCI BAYU KURNIAWAN  
NIP 198801272009121006

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO  
Tanggal 15/06/2023

Nama Terang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May. Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640  
Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 –  
801175525

Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertangan tangan di bawah ini :

Nama : Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP : 197811082001122001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I/ IV-b

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas Diskusi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana antar Negara pada tanggal 2-4 Maret 2023 di Yogyakarta telah diajukan pengajuan LS sejumlah Rp50.662.000 dengan rincian sebagai berikut:
  - Uang tiket : Rp.20.412.000
  - Uang Penginapan : Rp.18.910.000
  - Uang Harian : Rp.11.340.000Dalam pelaksanaannya biaya perjalanan dinas tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.48.539.425 dikarenakan adanya selisih biaya uang tiket pesawat dan biaya uang penginapan sehingga berubah dengan rincian sebagai berikut,
  - Uang tiket : Rp.18.689.425
  - Uang Penginapan : Rp.18.510.000
  - Uang Harian : Rp.11.340.000
2. Biaya penginapan dimaksud akan dikembalikan kepada Bendahara BPHN sejumlah **Rp. 2.122.575** dengan rincian :
  - biaya uang tiket pesawat sejumlah Rp. 1.722.575
  - uang penginapan sejumlah Rp.400.000.

Jakarta, 10 Maret 2023

Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP.197811082001122001

NO. TRX. : 87705 412480 95100 15/06/2023 11:07:38  
NO. REK. : CASH  
JURNAL : 2.122.575  
0037 - KCU JATIMEGARA

PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Penerimaan Negara Bukan Pajak



1 000000412480  
2 5605010AB74T0914  
3 220164

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jns Bayar : 15/06/23 11:07:38  
Tanggal Baks : 15/06/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATIMEGARA

Data Pelitain :  
Kode Billing : 70023061503001  
Nama Wajib Bayar : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kementerian / Lembaga : 213  
Tipe Bayan : 00  
Sektor Kerja : 409208  
Jumlah Deteksi : 2.122.575,00  
Terdeteksi : 2.122.575,00

Mata Uang : IDR

*This is computer generated message and requires no signature.  
Informasi ini dihasilkan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.  
Jika tidak terdapat nomor ATPM, transaksi sedang dibayar proses.  
Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk menyetor atau nomor KPM Anda dan cetak ulang bukti transaksi!*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230615016501  
Tanggal Billing : 15-06-2023 10:01  
Tanggal Kadaluarsa : 22-06-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 15-JUN-23 11.02.38.519599 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 2.122.575 (IDR)  
Terbilang : Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 56C901GAB74TG91L  
NTB : 000000412480  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Pembentukan Regulasi  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian Tiket Pesawat dan uang penginapan kegiatan Perjadin Penyusunan NA RUU ke Yogyakarta

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1613-Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
Uraian : Output : ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM  
Periode : 062023 s/d 062023  
Alokasi : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Jumlah Setoran : 2.122.575 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, tolong apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hal.kemerkau.go.id/>.

Keluar



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DITJEN PERBENDAHARAAN  
KPPN  
1 3 9  
Jakarta V

**Surat Setoran  
Pengembalian Belanja  
(SSPB)**

Nomor: 00009/SSPB/409288/2023  
Tanggal: 15 Juni 2023

Lembar Ke - 1  
Untuk  
BENDAHARA

**KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :**

- A. 1. NPWP Bendahara : 000265884005000  
2. Nama Bendahara : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. Alamat : JL. MAY.JEND SUTOYO CILILITAN JAKARTA TIMUR
- B. 1. Kementerian/ Lembaga : 0 1 3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
2. Unit Organisasi Eselon 1 : 1 0 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
3. Satuan Kerja : 4 0 9 2 8 8 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
4. Fungsi / Sub Fungsi / Program : 0 3 0 3 B B  
KETERTIBAN DAN KEAMANAN /  
PEMBINAAN HUKUM /  
Program Pembentukan Regulasi
5. Kegiatan : 1 6 1 3 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
6. Lokasi : 0 1 9 9 KOTA JAKARTA PUSAT
- C. Kode Akun dan Uraian : 5 2 4 1 1 1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
- D. Jumlah Setoran : Rp. 2.122.575,00  
Dengan Huruf : Dua Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

**PERHATIAN**

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.

Untuk Keperluan Biayaselisih uang tiket pesawat dan penginapan Perjadin Penyusunan NA di Yogyakarta

KOTA JAKARTA PUSAT , 16 Juni 2023

UCI BAYU KURNIAWAN  
NIP 198801272009121006

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO  
Tanggal 15/06/2023

Nama Terang



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jl. Mayjen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Email : [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : R. Septyarto Priandono, S.H.  
NIP : 19740927 199803 1 00 1  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. II/IVb  
Jabatan : Koordinator Penyelarasan Naskah Akademik

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya uang harian paket meeting fullboard sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 (tiga) hari yang seharusnya diberikan kepada Bapak Uci Bayu Kurniawan pada tanggal 14 s.d 16 Maret 2023 sebagai peserta kegiatan konsinyering penyelarasan tetapi dikarenakan Bapak Uci Bayu Kurniawan hanya dapat hadir selama 2 (dua) hari dalam kegiatan tersebut maka biaya sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada Bendahara BPHN.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Maret 2023  
Koordinator Penyelarasan NA

R. Septyarto Priandono, S.H.  
NIP. 19740927 199803 1 00 1



NO. TAX : 81708 360981 95502 15/06/2023 11:01:14  
NO. BAK : CASH  
JUMLAH : 150.000  
0037 - KCU JATIHARJANA

PT. Bank Negara Indonesia  
(Persero), TBK

BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
Penerimaan Negara Bukan Pajak



Kementerian  
Keuangan  
**BNI**  
Kantor Pusat (001/001)  
Jl. Sunda Kelapa No. 1  
Jakarta Pusat 10132

NTN  
PTPN  
PRAN

Data Pembayaran :  
Tanggal dan Jam Bayar : 15/06/23 11:01:14  
Tanggal Buku : 15/06/23  
Kode Cabang Bank : KCU JATIHARJANA  
Data Seluler :  
Kode Billing : 7100730615203992  
Nama Nominasi Bayar : BAKUM PERNIBAMAAN MUKIM NALICHAL  
Kontokorban / Lembaga : GIC  
Mail Koneksi : 11  
Saluran Pajak : 409286  
Jumlah (Pecahan) : 150.000,00  
Terdapat : 1 pecahan lima puluh ribu rupiah

Mata Uang : IDR



This is computer generated message and receipt is digitally  
signature and it contains computer data that is irreversible, tamper  
free and unchangeable. Nomor NTPN, transaksi online adalah proses  
Mekanisme Kejangkitan Cabang terdapat untuk memvalidasi nomor NTPN dan data cetak ulang buku bukti



## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230615303982  
Tanggal Billing : 15-06-2023 09:47  
Tanggal Kadaluausa : 22-06-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 15-JUN-23 11.01.14.595556 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 150.000 (IDR)  
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 6AEF42CNR1NA61PE  
NTB : 000000360981  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Pembentukan Regulasi  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian Uang Harian kegiatan Konsinyering Penyusunan NA RUU Badan Usaha di Jawa Barat

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1613-Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
Uraian : Output : ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM  
Periode : 062023 s/d 062023  
Akun : 524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  
Jumlah Setoran : 150.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DiPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://tka.kemkeu.go.id/>.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DITJEN PERBENDAHARAAN

KPPN

1 3 9  
Jakarta V

**Surat Setoran  
Pengembalian Belanja  
(SSPB)**

Nomor: 00008/SSPB/409288/2023  
Tanggal: 15 Juni 2023

Lembar Ke - 1  
Untuk

BENDAHARA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :

- A. 1. NPWP Bendahara : 000265884005000  
 2. Nama Bendahara : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 3. Alamat : JL. MAY.JEND SUTOYO CILILITAN JAKARTA TIMUR
- B. 1. Kementrian/ Lembaga : 0 1 3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 2. Unit Organisasi Eselon 1 : 1 0 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 3. Satuan Kerja : 4 0 9 2 8 8 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 4. Fungsi / Sub Fungsi / Program : 0 3 0 3 B B  
 KETERTIBAN DAN KEAMANAN /  
 PEMBINAAN HUKUM /  
 Program Pembentukan Regulasi
5. Kegiatan : 1 6 1 3 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
 6. Lokasi : 0 1 9 9 KOTA JAKARTA PUSAT
- C. Kode Akun dan Uraian : 5 2 4 1 1 9 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- D. Jumlah Setoran : Rp. 150.000,00  
 Dengan Huruf : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

**PERHATIAN**

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.

Untuk Keperluan Pengembalian uang harian kegiatan penyusunan NA RU di Jawa barat

KOTA JAKARTA PUSAT , 16 Juni 2023

UCI BAYU KURNIAWAN  
NIP 198801272009121006

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO  
Tanggal 15/06/2023

Nama Terang

00095

1613. ABD.052 / 524 119



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640  
Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 –  
801175525

Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

---

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertangan tangan di bawah ini :

Nama : Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP : 197811082001122001  
Pangkat/Golongan : PembinaTk.I/ IV-b

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Konsinyering Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Badan Usaha pada tanggal 6-8 Maret 2023 di Depok, Jawa Barat telah diajukan pengajuan LS uang harian sejumlah Rp. 6.150.000 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Dalam pelaksanaanya biaya uang harian tersebut mengalami perubahan menjadi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
3. Biaya uang harian dimaksud akan dikembalikan kepada Bendahara BPHN sejumlah Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Jakarta, 8 Maret 2023

  
Adharinalti, S.H., M.H.  
NIP.197811082001122001





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230615572623  
Tanggal Billing : 15-06-2023 09:53  
Tanggal Kadaluausa : 22-06-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 15-JUN-23 11.02.25.873217 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 150.000 (IDR)  
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : D93E5395AS9MR84F  
NTB : 000000404987  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Pembentukan Regulasi  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian Biaya uang harian paket meeting fullboard selama 1 hari kegiatan Konsinyering Penyelarasan

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1613-Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
Uraian : Output : ABD-Kebijakan Bidang Hukum dan HAM  
Periode : 062023 s/d 062023  
Akun : 524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  
Jumlah Setoran : 150.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpanan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DIPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://pnl.kemendikpu.go.id/>.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DITJEN PERBENDAHARAAN

KPPN

1 3 9  
Jakarta V

**Surat Setoran  
Pengembalian Belanja  
(SSPB)**

Nomor: 00010/SSPB/409288/2023

Tanggal: 15 Juni 2023

Lembar Ke - 1

Untuk

BENDAHARA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :

- A. 1. NPWP Bendahara : 000265884005000  
 2. Nama Bendahara : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 3. Alamat : JL. MAY. JEND SUTOYO CILILITAN JAKARTA TIMUR
- B. 1. Kementerian/ Lembaga : 0 1 3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 2. Unit Organisasi Eselon 1 : 1 0 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 3. Satuan Kerja : 4 0 9 2 8 8 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 4. Fungsi / Sub Fungsi / Program : 0 3 0 3 B B  
 KETERTIBAN DAN KEAMANAN /  
 PEMBINAAN HUKUM /  
 Program Pembentukan Regulasi
5. Kegiatan : 1 6 1 3 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional  
 6. Lokasi : 0 1 9 9 KOTA JAKARTA PUSAT
- C. Kode Akun dan Uraian : 5 2 4 1 1 9 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
- D. Jumlah Setoran : Rp. 150.000,00  
 Dengan Huruf : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

**PERHATIAN**

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSPB pada halaman belakang lembar ini.

Untuk Keperluan Pengembalian uang harian kegiatan Konsinyering penyelarasan

KOTA JAKARTA PUSAT , 16 Juni 2023

UCI BAYU KURNIAWAN  
NIP 198801272009121006

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI / KANTOR POS DAN GIRO  
Tanggal 15/06/2023

Nama Terang



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PORTAL PENERIMAAN NEGARA

## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230213398918  
Tanggal Billing : 13-02-2023 07:37  
Tanggal Kadaluaarsa : 20-02-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 13-FEB-23 07.46.59.078123 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Mobile Banking  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 1.690.000 (IDR)  
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : E660B7N8Q0PLASC6  
NTB : 000000682916  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Dukungan Manajemen  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian honor narsum kegiatan workshop peningkatan kapasitas asesor PMPRB

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
Uraian : Output : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal  
Periode : 022023 s/d 022023  
Akun : 522151 - Belanja Jasa Profesi  
Jumlah Setoran : 1.690.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.





## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	13-02-2023
Waktu Transaksi	07:47:04 WIB
Tanggal Buku	13/02/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000682916
STAN	617392
Kode Billing	700230213398918
Nama Wajib Bayar	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	1690000
Mata Uang	IDR
NTPN	E660B7N8Q0PLASC6
Fee Bank	0
Total Pembayaran	1.690.000,00
Terbilang	satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0802765083



## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230213589705  
Tanggal Billing : 13-02-2023 07:32  
Tanggal Kadaluarsa : 20-02-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 13-FEB-23 07.46.13.622461 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Mobile Banking  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 1.650.000 (IDR)  
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 5B603520AH2G9MM9  
NTB : 000000671571  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Dukungan Manajemen  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian uang harian kegiatan workshop peningkatan kapasitas asesor PMPRB

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
Uraian : Output : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal  
Periode : 022023 s/d 022023  
Akun : 524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  
Jumlah Setoran : 1.650.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenkeu.go.id/>.



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	13-02-2023
Waktu Transaksi	07:45:57 WIB
Tanggal Buku	13/02/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000671571
STAN	617364
Kode Billing	700230213589705
Nama Wajib Bayar	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	1650000
Mata Uang	IDR
NTPN	5B603520AH2G9MM9
Fee Bank	0
Total Pembayaran	1.650.000,00
Terbilang	satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0802765083



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
Jl. Mayjen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Email : [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RM. Aminulloh  
NIP : 197212071999031001  
Jabatan : Sub. Koordinator Data dan Informasi

Menyatakan dengan ini, bahwa:

Pada Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Asesor PMPRB Tahun 2023 di Hotel Santika Depok, Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Januari 2023. Terdapat pengembalian uang kegiatan, sebagai berikut:

1. Uang harian sebesar Rp. 1.650.000,- (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); dan
2. Honor narasumber sebesar Rp. 1.690.000,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Jakarta, 31 Januari 2023

Mengetahui,

Plt. Kepala Bagian Program dan Pelaporan,

Yang membuat pernyataan,

RM. Aminulloh  
NIP 197212071999031001

Anang Ardian Riza  
NIP 197304092002121008



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

<b>Kode Billing</b> Y023122020207082	<b>Pembuat Billing</b> TIRA FIDYA WATI, A.Md	<b>NTPN</b> CE2242CPNKBVCO3A
<b>Tanggal Billing</b> 20-12-2023 11:40:24	<b>Kemartabatan/ Lembaga</b> 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	<b>NTB</b> 000000796855
<b>Tanggal Kadaluwarsa</b> 25-12-2023 11:40:24	<b>Unit Eselon I</b> 10 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	<b>Tanggal Bayar</b> 22-12-2023 15:03:47
<b>Status</b> [Green Box]	<b>Satuan Kerja</b> 400386 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	<b>Bank/ Poin Bayar</b> BANK NEGARA INDONESIA
<b>Keterangan</b> Pengembalian: Setelah biaya uang hasil kegiatan FGD Tim Terevisi JDIH di Bogor		<b>Kanal Bayar</b> 7015 - Mobile Banking
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b> NPWP 00228584009000	<b>Kab/ Kota</b> KOTA JAKARTA PUSAT Periode DESEMBER 2023	<b>524119</b> 01210BF.18108MA <b>300.000,00</b>
		<b>Total Disetar</b> <b>IDR 300.000,00</b>

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen yang valid karena Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran yang dapat dibelanjakan adalah berdasarkan: (a) masa berlakunya masa berlaku Billing di Bank Mandiri, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran sendiri
3. Pembayaran untuk penjaminan diberikan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya
4. Pembayaran atas unit dana penjaminan diberikan ke rekening yang terdapat pada Billing (NTPN) atau rekening lain
5. Pembayaran menggunakan Billing Bank Mandiri diberikan menggunakan Billing Penerimaan Negara sedangkan pembayaran menggunakan rekening lain menggunakan Billing
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai media bank pembayaran seperti transfer bank, mesin ATM internet banking, cabang bank, dan lain sebagainya sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh masing-masing bank
7. Pastikan bahwa data data pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera kemudian ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidaksesuaian data, maka akan kode billing yang Anda masukkan akan salah
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center 157 (GPN di 1400) dan juga dapat melalui Mail Pns.kemkeu.go.id



1610 001.051B/539119

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jl. Mayor Jenderal Sutoyo, Ciliilitan, Jakarta 13640  
Telepon: (021) 8091908, Faksimili: (021) 8002265, 8011753  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Surel: [tupusdok@jdih.go.id](mailto:tupusdok@jdih.go.id)

KRONOLOGIS PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING  
KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)* TIM TEKNIS JDIIH BPHN  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Tim Teknis JDIIH BPHN dilaksanakan pada tanggal 15 -16 Juni 2023 yang dianggarkan untuk 30 orang peserta. Kegiatan dimaksud sudah diajukan LS untuk Uang Harian serta telah cair SPPD pada tanggal 14 Juni 2023 dengan rincian :
  - Uang harian = 2 hari x Rp. 150.000,- x 30 orang = Rp. 9.000.000,-
  
- Namun, pada saat pelaksanaan terdapat 1 orang peserta atas nama M. Reyhan Pradipta yang hanya dapat mengikuti setengah hari kegiatan karena harus menghadiri juga Undangan Rapat yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Oleh karena itu harus dilakukan pengembalian uang harian untuk 2 hari terhadap peserta tersebut
  - Uang harian = 2 hari x Rp. 150.000,- x 1 orang = Rp. 300.000,-

Sehingga uang harian yang harus dikembalikan untuk biaya perjalanan dinas ini sebesar Rp. 300.000,-

Koordinator Sistem dan Basis Data JDIIH

  
Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si  
NIP. 19730207 200112 2 001



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	22-12-2023
Waktu Transaksi	15.03:47 WIB
Tanggal Buku	22/12/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000798855
STAN	420403
Kode Billing	702312220287082
Nama Wajib Bayar	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	300000
Mata Uang	IDR
NTPN	C82242CPNKBVCO3A
Fee Bank	0
Total Pembayaran	300.000,00
Terbilang	tiga ratus ribu rupiah
Nomor Rekening	0802764975



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

<b>Kode Billing</b> 70231220028000	<b>Pembuat Billing</b> TKA FIDYAWATI & M	<b>NTPN</b> 0C2FAZCPNKRVC00G
<b>Tanggal Billing</b> 22-12-2023 11:36:11	<b>Kementerian/Lembaga</b> 012 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	<b>KTB</b> 00000745564
<b>Tanggal Ketaahwasa</b> 25-12-2023 11:36:11	<b>Unit Eselon I</b> 10 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	<b>Tanggal Bayar</b> 22-12-2023 15:02:27
<b>Status</b> Pembayaran	<b>Satuan Kerja</b> 40828 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	<b>Bank/ Pos Bayar</b> BANK NEGARA INDONESIA
<b>Keterangan</b> Pergantian selisih biaya penggantian tiket pesawat dan uang makan kegiatan Monus JDIH ke Maluku <a href="#">Cetak dan Unduh</a>		<b>Kanal Bayar</b> 7015 - Mobile Banking
<b>Badan Pembinaan Hukum Nasional</b> NPWP 000265884005000	<b>Rabu Kota KOTA JAKARTA PUSAT</b> Periode DESEMBER 2023	<b>ISK111</b> 013108F.16108AA
		<b>400.000,00</b>
<b>Total Diatur</b>		<b>IDR 400.000,00</b>

Kelembagaan Pembayaran Tagihan

1. Sistem Pembayaran Perantara Negara (NTPN) adalah rekening dan buku tabung Anda akan melakukan debit/transfer ke Kas Negara.
2. Pembayaran tagihan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh. Anda dapat melakukan debit langsung. Billing ini bisa berlaku dan Anda tidak perlu melakukan pengisian data pembayaran sendiri.
3. Pembayaran oleh pemerintah dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan kemudian.
4. Pembayaran akan sangat cepat dan langsung ke rekening yang ditunjuk yang akan terpotong 5 (lima) bulan kemudian.
5. Pembayaran pengembalian tagihan akan langsung ke rekening pembayaran Billing. Perintah/batas rekening pembayaran pengembalian tagihan akan langsung ke rekening Sistem.
6. Data pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran sesuai kebutuhan bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan lain-lain yang sesuai dengan metode pembayaran yang disediakan oleh penyedia agent.
7. Pastikan bahwa data data pembayaran akan dituliskan ke akun dengan data yang benar termasuk nomor rekening. Apabila terjadi kesalahan/cek diri agar dapat melakukan pengecekan ulang sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center ke GPN di 14080 dan juga dapat melalui help line pelayanan go id.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Jl. Mayor Jenderal Sutoyo, Cililitan, Jakarta 13640  
 Telepon: (021) 8091908, Faksimili: (021) 8002265, 8011753  
 Laman : www.bphn.go.id, Surel: tupusdok@jdih.go.id

#### KRONOLOGIS PENGEMBALIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan JDH Tahun 2023 ke Provinsi Maluku dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pegawai a.n. Desyana Berliana selama 3 (tiga) hari pada tanggal 27 – 29 Maret 2023. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas tersebut biaya yang dikeluarkan menggunakan sistem reimburs dengan rincian sebagai berikut :


Tiket Pesawat	Uang Harian	Uang Penginapan	Taksi	Jumlah
Rp. 6.491.420,-	Rp. 1.140.000,-	Rp. 1.334.000,-	Rp. 328.400,-	Rp. 9.293.820,-

Namun, pada saat membuat kwitansi reimburs perjalanan dinas, terdapat kesalahan di kwitansi dalam mencantumkan biaya tiket pesawat Jakarta – Maluku PP. Dimana nilai yang tertera lebih besar dari nilai yang seharusnya. Dan kwitansi reimburs perjalanan dinas tersebut telah diinput oleh Sub Perbendaharaan dalam GU Persediaan dan juga telah mengurangi nilai realisasi pada aplikasi OMSPAN. Adapun keseluruhan nilai perjalanan dinas yang telah digunakan untuk kegiatan tersebut adalah :

Tiket Pesawat	Uang Harian	Uang Penginapan	Uang Taksi	Jumlah
Rp. 6.941.420,-	Rp. 1.140.000,-	Rp. 1.334.000,-	Rp. 328.400,-	Rp. 9.743.820,-

Sehingga untuk biaya perjalanan dinas ini dana yang harus dikembalikan sebesar **Rp.450.000,-** dari biaya tiket pesawat yang seharusnya senilai Rp.6.491.420,- tertera Rp. 6.941.420,-

Jakarta, 28 April 2023  
 Plt. Koordinator Jaringan Dokumentasi  
 Informasi Hukum

  
 Emalia Suwartika, S.Sos., M.Si.  
 NIP. 19730207 200112 2 001



## Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	22-12-2023
Waktu Transaksi	15:02:28 WIB
Tanggal Buku	22/12/23
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000745564
STAN	420116
Kode Billing	702312220286992
Nama Wajib Bayar	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	450000
Mata Uang	IDR
NTPN	6C2FA2CPNKBVCO0G
Fee Bank	0
Total Pembayaran	450.000,00
Terbilang	empat ratus lima puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	0802764975

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 11/08/23 11:11:01  
Tanggal Buku : 11/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTE : 000000167443  
NTPN : 981171GAB7AG8LGS  
STAN : 990570

Data Setoran :

Kode Billing : 700230810850811  
Nama Wajib Bayar : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 62.000,00  
Terbilang : enam puluh dua ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230810850821  
Tanggal Billing : 10-08-2023 09:18  
Tanggal Kadaluarsa : 17-08-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 11-AUG-23 11.11.01.519394 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 62.000 (IDR)  
Terbilang : Enam Puluh Dua Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 981171GAB7AO8LG5  
NTB : 000000167443  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Dukungan Manajemen  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : pengembalian uang tiket travel perjadiin kegiatan monev laporan keuangan dan nilai IKPA di Kanwil Jabar

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
Uraian : Output : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal  
Periode : 082023 s/d 082023  
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Jumlah Setoran : 62.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemenukeu.go.id/>.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen. Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telp 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753

Laman : www.bphn.go.id, Email : bphn@bphn.go.id

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Tuyono  
NIP : 19700615 199703 1 001  
Jabatan : Koordinator Keuangan

Dengan ini bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Nilai IKPA DIPA BPHN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat pada tanggal 01 s.d 03 Maret 2023 sebesar Rp15.238.000,- mengalami perubahan menjadi Rp15.176.000,- dikarenakan adanya selisih biaya transportasi (harga tiket travel) yang lebih kecil a.n Rizky Awaliyah dan Ratna Jamilah;
2. Selisih biaya transportasi yang dimaksud dikembalikan kepada Bendahara BPHN sebesar Rp62.000,- untuk dikembalikan kepada kas negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Maret 2023  
Koordinator Keuangan,

Tuyono  
NIP. 19700615 199703 1 001

Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 11/08/23 11:10:44  
Tanggal Buku : 11/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTE : 000000157906  
NTPN : 5EC86520AHK9TH5J  
STAN : 990518

Data Setoran :

Kode Billing : 700230810679155  
Nama Wajib Bayar : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 300.000,00  
Terbilang : tiga ratus ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

### Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230810879155  
Tanggal Billing : 10-08-2023 09:21  
Tanggal Kadaluausa : 17-08-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 11-AUG-23 11.10.44.106747 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 300.000 (IDR)  
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : 5EC86520AHK9TH5J  
NTB : 000000157906  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Dukungan Manajemen  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian uang penginapan perjadiin kegiatan monev pelaporan keuangan DIPA BPHN di Kanwil NTB

### Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
Uraian : Output : EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal  
Periode : 082023 s/d 082023  
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Jumlah Setoran : 300.000 (IDR)

### Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hal.kemenkeu.go.id/>.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jl. Mayjen. Sutoyo No. 10 Cilandak Jakarta Timur 13640

Telp 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753

Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id), Email : [bphn@bphn.go.id](mailto:bphn@bphn.go.id)

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ira Yustisia Smarayoni  
NIP : 19780313 200312 2 001  
Jabatan : Subkoordinator Akuntansi dan Pelaporan

Dengan ini bahwa :

1. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan DIPA BPHN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat pada tanggal 08 s.d 10 Maret 2023 sebesar Rp19.021.740,- mengalami perubahan menjadi Rp18.721.740,- dikarenakan adanya selisih biaya uang penginapan yang lebih kecil a.n Ira Yustisia Smarayoni;
2. Selisih biaya uang penginapan yang dimaksud dikembalikan kepada Bendahara BPHN sebesar Rp300.000,- untuk dikembalikan kepada kas negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Maret 2023

Subkoordinaotor Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisia Smarayoni

NIP. 19780313 200312 2 001



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 11/08/23 11:10:31  
Tanggal Buku : 11/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTB : 000000151165  
NTPN : C724ABJM9RTQN4IR  
STAN : 990489

Data Setoran :

Kode Billing : 700230810014299  
Nama Wajib Bayar : BADAN PEMERINTAHAN NASIONAL  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 32.000,00  
Perbilang : tiga puluh dua ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi!*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

## Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230810014299  
Tanggal Billing : 10-08-2023 09:30  
Tanggal Kadaluarsa : 17-08-2023 23:59  
Tanggal Bayar : 11-AUG-23 11.10.31.938032 AM  
Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 32.000 (IDR)  
Terbilang : Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah (IDR)  
Status : TERBAYAR  
NTPN : C724A8JM9RTQN4IR  
NTB : 000000151165  
KPPN : JAKARTA V  
Program : Program Dukungan Manajemen  
Sumber Dana : RM  
Cara Penarikan : RM  
Register : 00000001  
Kewenangan : Kantor Pusat  
Keterangan : Pengembalian uang penginapan perjadiin kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data BMN di Jabar

## Detil pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
Uraian : Output : EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal  
Periode : 082023 s/d 082023  
Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
Jumlah Setoran : 32.000 (IDR)

## Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan..
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui <https://hai.kemkenku.go.id/>.



1614.EBA.356.051 B/524111

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan Mayor Jenderal Soetoyo No. 10 Cilandak Jakarta Timur  
Telp.021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman. www.bphn.go.id

**SURAT PENYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Sadewo Y. C  
NIP : 198007112003121001  
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Dengan ini bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data BMN Program Pembinaan Hukum Nasional di Jawa Barat pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023 sebesar Rp. 9.720.000,-, mengalami perubahan menjadi Rp. 9.688.000,-, dikarenakan adanya selisih biaya uang penginapan yang lebih kecil a.n. Vian Budi Satyo dan Andhika Rizki Pamungkas;
2. Selisih biaya uang penginapan yang dimaksud dikembalikan kepada Bendahara BPHN sebesar Rp. 32.000,- untuk dikembalikan ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepala Subbagian Rumah Tangga



Tri Sadewo Y. C.  
NIP 198007112003121001



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 11/08/23 11:10:16  
Tanggal Buku : 11/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTE : 000000142456  
NTPN : D283D45IQM1T3J88  
STAN : 990395

Data Setoran :

Kode Billing : 700230810455304  
Nama Wajib Bayar : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 32.000,00  
Terbilang : tiga puluh dua ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*





## BUKTI PEMBAYARAN KODE BILLING

## Data pembayaran tagihan :

Kode Billing : 700230810455304  
 Tanggal Billing : 10-08-2023 09:44  
 Tanggal Kadaluaarsa : 17-08-2023 23:59  
 Tanggal Bayar : 11-AUG-23 11.10.16.417656 AM  
 Bank/Pos Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
 Channel Bayar : Teller  
 Nama Penyetor : Badan Pembinaan Hukum Nasional  
 Kementerian / Lembaga : 013-KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Eselon I : 10-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Satuan Kerja : 409288-BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
 Total Disetor : 32.000 (IDR)  
 Terbilang : Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah (IDR)  
 Status : TERBAYAR  
 NTPN : D283D45IQN1T3J88  
 NTB : 000000142456  
 KPPN : JAKARTA V  
 Program : Program Dukungan Manajemen  
 Sumber Dana : RM  
 Cara Penarikan : RM  
 Register : 00000001  
 Kewenangan : Kantor Pusat  
 Keterangan : Pengembalian uang penginapan perjadi rekonsiliasi dan pemutakhiran data laporan keuangan dan BMN an Teguh Irawan dan Bangur

## Detail pembayaran tagihan :

Wajib Bayar : Bendahara Pengeluaran  
 Kegiatan : 1614-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn  
 Uraian : EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal  
 Periode : 082023 s/d 082023  
 Akun : 524111 - Belanja Perjalanan Dinas Biasa  
 Jumlah Setoran : 32.000 (IDR)

## Ketentuan pembayaran tagihan :

- Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara
- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
- Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
- Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hal-DJPb di 14000 dan juga dapat melalui <https://hal.kemendiknas.go.id/>.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Jalan Mayor Jenderal Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur  
Telp. 021-8091908 Faks. 021-8002265/8011753 Laman. www.bphn.go.id

## **SURAT PENYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tri Sadewo Y. C  
NIP : 198007112003121001  
Jabatan : Kepala Subbagian Rumah Tangga

Dengan ini bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan Mengikuti Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat kantor Wilayah kegiatan Pengelolaan Teknis Teknologi Informasi/Aplikasi BPHN di Jawa Barat pada tanggal 10 s.d. 14 Juli 2023 sebesar Rp. 9.820.000,-, mengalami perubahan menjadi Rp. 9.788.000,-, dikarenakan adanya selisih biaya uang penginapan yang lebih kecil a.n. Teguh Irawan dan Bangun Asanurjaya;
2. Selisih biaya uang penginapan yang dimaksud dikembalikan kepada Bendahara BPHN sebesar Rp. 32.000,- untuk dikembalikan ke kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya, dan dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2023

Kepala Subbagian Rumah Tangga



Tri Sadewo Y. C.

NIP 198007112003121001





**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 013  
**ESELON I** : 10  
**WILAYAH/PROVINSI** : null  
**SATUAN KERJA** : 409288  
**JENIS SATUAN KERJA** : KP

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**BA(013) ES1(10) DKI JAKARTA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

Kode Lap : LRA.B.S.2  
 Tanggal : 16/01/24 11:03 AM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid --rekon17  
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	66,740,000	30,268,000	30,202,573	0	30,202,573	99.78	65,427
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	17,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	17,500,000	0	0	0	0		0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	247,295,000	722,000	405,000	0	405,000	56.09	317,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	247,295,000	722,000	405,000	0	405,000	56.09	317,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	331,535,000	30,990,000	30,607,573	0	30,607,573	98.77	382,427
	JUMLAH BELANJA	331,535,000	30,990,000	30,607,573	0	30,607,573	98.77	382,427

**REKAPITULASI DATA REVISI BPHN SATKER**  
**PERIODE S.D 31 DESEMBER 2023**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	PAGU	REVISI KE	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI		Nilai Revisi	KEWENANGAN				DOKUMEN PENDUKUNG	STATUS REVISI	KETERANGAN
							POK	DIPA		SATKER	ESELON I	KANWIL PERBEN	DJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
diisi nomor surat	diisi kode satker	diisi nama satker	diisi nomor DIPA satker	diisi pagu keseluruhan satker	diisi revisi yang dilakukan	diisi tanggal revisi	di ceklist	diceklist	diisi jumlah yang di revisi	di ceklist	diceklist	di ceklist	diceklist	diisi dokumen pendukung berupa surat atau nota dinas	diisi status revisi pada aplikasi OM SPAN	diisi maksud dan tujuan revisi
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	DIPA-013.10.1.409288/2023	Rp 47.741.425.000	1	26/12/2022		√	Rp 47.741.425.000				√	1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-773/AG/AG.5/2022 tanggal 24 Desember 2022 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023 pada Delapan Unit Kemendukham 2. Nota Dinas Kepala Bagian Pelaporan Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-163 Perihal Penyampaian DIPA dan RKA-K/L Unit Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023 Revisi ke-1 ( <i>Automatic Adjustment</i> )	Posting	Revisi dalam rangka Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp1.141.371 pada output 1614.EBB akun 533121
				Rp 47.741.425.000	2	25/01/2023		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-08 tanggal 26 Januari 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi tanggal 25 Januari 2023	Posting	Revisi antar jenis belanja
				Rp 47.741.425.000	3	15/02/2023		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-13 tanggal 16 Februari 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi RPD Triwulan I TA 2023	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan I TA 2023
				Rp 47.741.425.000	4	06/03/2023		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-19 tanggal 07 Maret 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L hasil Revisi Revisi Anggaran DIPA BPHN	Posting	Revisi antar output dan KRO
				Rp 47.741.425.000	5	21/03/2023		√	Rp 47.741.425.000			√		Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-27 tanggal 21 Maret 2023 Perihal penyampaian POK Revisi Pemutakhiran level KPA	Posting	Pemutakhiran POK
				Rp 47.741.425.000	6	14/04/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-36 tanggal 14 April 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan II TA 2023, Revisi dari Belanja Modal ke Belanja Barang
				Rp 47.741.425.000	7	31/05/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-46 tanggal 31 Mei 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Posting	Revisi antar kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paralegal Justice Awards
				Rp 47.741.425.000	8	12/06/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-52 tanggal 12 Juni 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN	Posting	Revisi antar output untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Paralegal Justice Awards
				Rp 47.741.425.000	9	14/07/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-65 tanggal 14 Juli 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan III TA 2023 dan Revisi DIPA
				Rp 47.741.425.000	10	01/08/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-72 tanggal 02 Agustus 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Posting	Revisi antar output untuk mendukung pelaksanaan kegiatan HDKD
				Rp 47.741.425.000	11	10/08/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-76 tanggal 10 Agustus 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Hasil Revisi POK Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Posting	Revisi POK
				Rp 47.741.425.000	12	24/08/2023		√	Rp 47.741.425.001			√		1. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-379/AG/AG.5/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM 2. Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-89 tanggal 24 Agustus 2023 Perihal Penyampaian RKA-K/L Unit Hasil Revisi Buka Blokir <i>Automatic Adjustment</i> TA 2023	Posting	Buka Blokir Automatic Adjustment TA 2023

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	NOMOR DIPA	PAGU	REVISI KE	TANGGAL REVISI	JENIS REVISI		Nilai Revisi	KEWENANGAN				DOKUMEN PENDUKUNG	STATUS REVISI	KETERANGAN
							POK	DIPA		SATKER	ESELON I	KANWIL PERBEN	DJA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>diisi nomor surat</i>	<i>diisi kode satker</i>	<i>diisi nama satker</i>	<i>diisi nomor DIPA satker</i>	<i>diisi pagu keseluruhan satker</i>	<i>diisi revisi yang dilakukan</i>	<i>diisi tanggal revisi</i>	<i>di ceklist</i>	<i>diceklist</i>	<i>diisi jumlah yang di revisi</i>	<i>di ceklist</i>	<i>diceklist</i>	<i>di ceklist</i>	<i>diceklist</i>	<i>diisi dokumen pendukung berupa surat atau nota dinas</i>	<i>diisi status revisi pada aplikasi OM SPAN</i>	<i>diisi maksud dan tujuan revisi</i>
				Rp 49.436.291.000		07/09/2023		√	Rp 49.436.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-424/AG/AG.5/2023 tanggal 07 September 2023 perihal Pengesahan usulan revisi pergeseran anggaran antar unit setjen kemenkumham TA 2023	Posting	Anggaran Belanja Tambahan dari Sekretariat Jenderal Kemenkumham sebesar Rp1.694.866.000 guna mendukung kegiatan LDCC
				Rp 49.436.291.000	13	26/09/2023		√	Rp 49.436.291.000				√	Nota Dinas Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-KU.01.02-90 tanggal 26 September 2023 Perihal penyampaian RKA-K/L Revisi Anggaran DIPA BPHN TA 2023	Posting	Revisi antar output dan KRO
				Rp 49.436.291.000	14	02/10/2023		√	Rp 49.436.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5880/WPB.12/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Posting	Update RPD Hal III DIPA Triwulan IV TA 2023
				Rp 48.886.291.000	15	13/10/2023		√	Rp 48.886.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-518/AG/AG.5/2023 tanggal 13 Oktober 2023 perihal Pengesahan Usulan Revisi Anggaran Pergeseran Anggaran Antar Unit Kemenkumham TA 2023	Posting	Pergeseran Anggaran Belanja Pegawai Sebesar Rp550.000.000 dari BPHN ke Sekretariat Jenderal Kemenkumham
				Rp 48.886.291.000	16	07/11/2023		√	Rp 48.886.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7288/WPB.12/2023 tanggal 07 November 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Posting	Revisi untuk mendukung kegiatan RUU PHN di Jember
				Rp 48.886.291.000	17	27/11/2023		√	Rp 48.886.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7888/WPB.12/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Posting	Revisi untuk mendukung kegiatan Fasilitas Pembentukan PUU terkait dengan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan UU PHN di Batu Malang
				Rp 48.886.291.000	18	08/12/2023		√	Rp 48.886.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-8695/WPB.12/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Posting	Revisi untuk mendukung kegiatan Fasilitas Pembentukan PUU BPHN di Bali
				Rp 48.886.291.000	19	21/12/2023		√	Rp 48.886.291.000				√	Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-9231/WPB.12/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Kementerian Hukum dan HAM RI	Posting	Revisi dan Pemutakhiran POK

Lembar Pertama  
Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

**SALINAN  
RISALAH LELANG**  
Nomor 602/28/2023

-----Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (14-11-2023), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Gunawan Raharjo, Sarjana Manajemen, NIP 19791009 200112 1 004 -----  
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 238/KM.6/2015 tanggal 27 Mei 2015, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1534/KNL.0704/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 10 Cililitan Jakarta Timur . -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Constantinus Kristomo, NIP 197404111990031001, Pelaksana Tugas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, berkedudukan di Jakarta, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PHN.1-PB.05.01-04 tanggal 24 Agustus 2023, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-5125/KNL.0704/2023 tanggal 30 Oktober 2023 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-192/MK.6/KNL.0704/2023 tanggal 9 Oktober 2023. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----  
Anang Ardian Riza, Sarjana Hukum, Magister Hukum, NIP 197304092002121008, Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor PHN.1-PB.05.01-05 tanggal 24 Agustus 2023 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta IV. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----

1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat terdiri dari -----  
1. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6637 TQA nomor rangka MH1KC1215AK245081 nomor mesin KC12E1242678 (BPKB ada STNK tidak ada) --  
2. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6640 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245116 nomor mesin KC12E1242704 (BPKB dan STNK ada) -----  
3. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6642 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245133 nomor mesin KC12E1242922 (BPKB ada STNK tidak ada) --  
4. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6755 TQB nomor rangka MH1MC2310DK065279 nomor mesin MC23E1064735 (BPKB ada STNK ada) -----  
5. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6756 TQB nomor rangka MH1MC2315DK065276 nomor mesin MC23E1064736 (BPKB ada STNK ada) -----  
Nilai Limit : Rp9.948.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jalan Mayjen Sutoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur . -----  
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 09

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 602/28/2023 tanggal 14 November 2023  
Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

- November 2023. -----
- Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----
- Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
- Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
- Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
    - a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
    - b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----
    - c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
  2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
    - a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----
    - b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
    - c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
  2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
  2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
  3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
  2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
  3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
  2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
- Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
  2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
  2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka

Pejabat Lelang

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

- waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
- Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
- Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ---
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
- Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat

Ttd.

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta IV. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga puluh satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket kendaraan roda dua dalam kondisi rusak berat terdiri dari -----

1. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6637 TQA nomor rangka MH1KC1215AK245081 nomor mesin KC12E1242678 (BPKB ada STNK tidak ada) --
2. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6640 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245116 nomor mesin KC12E1242704 (BPKB dan STNK ada) -----
3. Honda GL 160 D tahun 2010 nomor polisi B 6642 TQA nomor rangka MH1KC1219AK245133 nomor mesin KC12E1242922 (BPKB ada STNK tidak ada) --
4. Honda GL 200 R tahun 2013 nomor polisi B 6755 TQB nomor rangka MH1MC2310DK065279 nomor mesin MC23E1064735 (BPKB ada STNK ada) -----





Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 602/28/2023 tanggal 14 November 2023

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----  
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----  
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp26.763.500,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----  
Jumlah harga barang yang ditahan: -----  
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 20 (dua puluh) -----  
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Anang Ardian Riza, S.H.,  
M.H.  
NIP 197304092002121008

Gunawan Raharjo, S.Mn.  
NIP 19791009 200112 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya  
Tanggal: 15 NOV 2023  
Kepala KPKNL Jakarta IV



Rofiq Manshur  
NIP: 19750725 199903 1 001



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231115658894  
Tanggal Billing : 15-11-2023 10:18:24  
Tanggal Kedaluwarsa : 22-11-2023 10:18:24  
Tanggal Bayar : 15-11-2023 22:04:57  
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Internet Banking  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 26.763.500 (IDR)  
Terbilang : *Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : **000000102454**  
NTPN : **C5EE948VV61M4LKE**

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin  
Jumlah Setoran : 26.763.500 (IDR)  
Keterangan : RL-602/28/2023 Tgl 14 November 2023 Badan Pembinaan Hukum Nasional



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820231115658512  
Tanggal Billing : 15-11-2023 10:15:32  
Tanggal Kedaluwarsa : 22-11-2023 10:15:32  
Tanggal Bayar : 15-11-2023 22:04:58  
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Internet Banking  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV  
Kementerian/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Eselon I : 09 - Ditjen Kekayaan Negara  
Satuan Kerja : 537937 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV  
Total Disetor : 535.270 (IDR)  
Terbilang : Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh (IDR)  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : 000000102767  
NTPN : 719502G4VGSTAL8G

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli -  
3.Lelang Nonsekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak  
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I  
Jumlah Setoran : 535.270 (IDR)  
Keterangan : RL-602/28/2023 Tgl 14 November 2023 Badan Pembinaan Hukum Nasional

**DAFTAR KONTRAK RPATA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Nomor SPK dan Nama Pekerjaan	Tanggal pelaksanaan	Nilai Kontrak	Jadwal Batas Pembayaran dan Jumlah			Status Pembayaran
				Termin	Tanggal	Jumlah	
1	PHN.1-PB.02.01-07/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 128.220.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 32.055.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 32.055.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
2	PHN.1-PB.02.01-06/2023 tgl 02 Jan 23 Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 67.740.000	Termin 1	21-Jul-23	Rp 33.870.000	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 33.870.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
3	PHN.1-PB.02.01-09/2023 tgl 02 Jan 23 Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 60.876.840	Termin 1	21-Jul-23	Rp 30.438.420	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 30.438.420	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
4	PHN.1-PB.02.01-08/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 63.752.850	Termin 1	21-Jul-23	Rp 31.876.425	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 31.876.425	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
5	PHN.1-PB.02.01-01/2023 tgl 02 Jan 23 Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	02 Jan s/d 31 Des 23	Rp 417.600.000	Termin 1	20-Apr-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 2	21-Jul-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 3	19-Oct-23	Rp 104.400.000	SP2D
				Termin 4	31-Dec-23	Rp 104.400.000	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
6	PHN.1-PB.02.01-213/2023 tgl 01 Mar 23 Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA.2023	01 Mar s/d 31 Des 23	Rp 117.170.201	Termin 1	22-Jun-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 2	20-Sep-23	Rp 35.151.061	SP2D
				Termin 3	31-Dec-23	Rp 46.868.079	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
7	PHN.1-PB.02.01-1246/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 318.470.150	Termin 1	20-Dec-23	Rp 159.235.075	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 159.235.075	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
8	PHN.1-PB.02.01-1247/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 166.873.176	Termin 1	20-Dec-23	Rp 83.436.588	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 83.436.588	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
9	PHN.1-PB.02.01-1248/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 50.955.224	Termin 1	20-Dec-23	Rp 25.477.612	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 25.477.612	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
10	PHN.1-PB.02.01-1249/2023 Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	1 Nov s/d 31 Des 23	Rp 83.436.588	Termin 1	20-Dec-23	Rp 41.718.294	SP2D
				Termin 2	31-Dec-23	Rp 41.718.294	- SP2D Penampungan tanggal 21-12-2023 - SP2D Pembayaran tanggal 08-01-2024
<b>TOTAL</b>						<b>Rp 589.375.493</b>	



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PEMBAYARAN RPATA Tanggal : 08-01-2024 s.d. 08-01-2024

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	249991304001181	08-01-2024	08-01-2024	28,300,810.00	IDR	1	08-01-2024	28,300,810	PEMBAYARAN RPATA	00003T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1440/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	249991304001179	08-01-2024	08-01-2024	92,172,973.00	IDR	1	08-01-2024	92,172,973	PEMBAYARAN RPATA	00007T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1439/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	249991304001140	08-01-2024	08-01-2024	29,903,244.00	IDR	1	08-01-2024	29,903,244	PEMBAYARAN RPATA	00004T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floorr Standing Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1441/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	249991304001180	08-01-2024	08-01-2024	26,873,560.00	IDR	1	08-01-2024	26,873,560	PEMBAYARAN RPATA	00005T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1442/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
5	249991303002564	08-01-2024	08-01-2024	81,765,183.00	IDR	1	08-01-2024	81,765,183	PEMBAYARAN RPATA	00010T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1446/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



6	249991303002543	08-01-2024	08-01-2024	28,143,150.00	IDR	1	08-01-2024	28,143,150	PEMBAYARAN RPATA	00006T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1443/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
7	249991303002563	08-01-2024	08-01-2024	156,292,423.00	IDR	1	08-01-2024	156,292,423	PEMBAYARAN RPATA	00009T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1445/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
8	249991303002559	08-01-2024	08-01-2024	41,379,025.00	IDR	1	08-01-2024	41,379,025	PEMBAYARAN RPATA	00008T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA.2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1444/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
9	249991303002561	08-01-2024	08-01-2024	25,079,806.00	IDR	1	08-01-2024	25,079,806	PEMBAYARAN RPATA	00011T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1447/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
10	249991303002562	08-01-2024	08-01-2024	40,901,607.00	IDR	1	08-01-2024	40,901,607	PEMBAYARAN RPATA	00012T/409288/2024	05-01-2024	NON GAJI	Pembayaran Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023 sesuai BAST Nomor PHN.1-PB.02.01-1448/2023 Tanggal 31-12-2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



DAFTAR SP2D SATKER

Jenis SPM : PENAMPUNGAN RPATA

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Mata Uang	Rate	Tanggal Rate	Nilai SP2D Ekuivalen	Jenis SPM	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	231390301000392	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00869T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1246/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Kebersihan Dalam dan Luar Gedung Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
2	231390301000347	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00865T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-09/2023 untuk Perawatan Lift Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
3	231390301000349	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00864T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-06/2023 untuk Pekerjaan Perawatan AC Split, AC Cassette dan AC Floor Standing Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
4	231390301000393	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00870T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1247/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengamanan Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
5	231390301000348	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00863T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-07/2023 untuk Pekerjaan Perawatan AC Central termasuk Cooling Tower dan Pompa Cooling Tower Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>





6	231390301000417	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00868T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-213/2023 untuk Pemeliharaan/perawatan aplikasi akses penyuluh dan bantuan hukum (SIDBANKUM) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA.2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
7	231390301000395	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00872T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1249/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Petugas Pengemudi Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
8	231390301000394	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00871T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-1248/2023 untuk Paket Pengadaan Jasa Lainnya Tenaga Pramubakti Non PNS Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
9	231390301000345	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00867T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-01/2023 untuk Pengadaan Langganan Internet Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>
10	231390301000344	20-12-2023	21-12-2023	0.00	IDR	1	21-12-2023	0	PENAMPUNGAN RPATA	00866T/409288/2023	19-12-2023	LAINNYA	Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor PHN.1- PB.02.01-08/2023 untuk Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi Webserver BPHN (Content Management System) dan Subdomain Kantor BPHN TA. 2023	Cek Akun	<input type="checkbox"/>

0 9 • 0 4 • 0 4 • 0 4 • 0 2 • 4 • 0 0 • 0 0 • 0 6

Administrasi Jakarta Timur

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN / KOTA

**SERTIPIKAT**  
(TANDA BUKTI HAK)



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

AAN896904

0 9 . 0 4 . 0 4 . 0 2 . 4 . 0 0 1 0 6

Administrasi Jakarta Timur

KANTOR PERTANAHAN  
~~KABUPATEN / KOTA~~

DAFTAR ISIAN 307  
No. 139773/2019,  
DAFTAR ISIAN 208  
No. 70624/2019,

PROVINSI : DKI JAKARTA  
KABUPATEN / KOTA : JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN : KRAMAT JATI  
~~DESA / KELURAHAN~~ : CILITAN

HAK : PAKAI No. 00106

# SERTIPIKAT




KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



AAN896904

DAFTAR ISIAN 206

<p>d) NAMA PEMEGANG HAK          PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA          KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA          REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Tanggal lahir / akta pendirian</p>	<p>a) HAK : PAKAI          No. : 00106          Bess / Kel : CILILITAN          Tgl. berakhirnya hak :          Pakai selama dipergunakan</p> <p>b) NIB 09040402.06191          Letak Tanah Jalan Mayjen Sutuyo</p>
<p>g) PEMBUKUAN</p> <p>JAKARTA 06 DEC 2019</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota          Administrasi Jakarta Timur</p> <p>tid</p> <p>SAMSUL BAHRI A.Pmh, M.Si          NIP 196312311983031054</p>	<p>c) ASAL HAK</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian Hak</p> <p>Pakai selama dipergunakan</p> <p>3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</p>
<p>h) PENERBITAN SERTIFIKAT</p> <p>JAKARTA 06 DEC 2019</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan          Kabupaten / Kota          Administrasi Jakarta Timur</p>  <p>SAMSUL BAHRI A.Pmh, M.Si          NIP 196312311983031054</p>	<p>1. Daftar Isian 202</p> <p>Tgl. 02/12/2019</p> <p>No. 182/MD/DA-31/5/XII/2019</p> <p>3. Permohonan Pemecahan / Penggabungan bidang</p> <p>Tgl. 04/11/2019</p> <p>No. 00391/Cililitan/2019</p> <p>Luas : 4.657 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi)</p>
<p>i) PENUNJUK</p> <p>Tanah Negara</p> <p>301/30568/2019</p>	<p>e) SURAT UKUR</p> <p>Tgl. 04/11/2019</p> <p>No. 00391/Cililitan/2019</p> <p>Luas : 4.657 m<sup>2</sup> (Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Meter Persegi)</p>





AAN896904

09.04.04.02.4.00206

NIB : 09040402.06191

DAFTAR ISIAN 207

# SURAT UKUR

Nomor : 00391/Ci/Itan/2019

## SERIDANG TANAH TERLETAH DALAM

Provinsi : Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Kabupaten / Kota : Kota Administrasi Jakarta Timur

Kecamatan : Kramat Jati

Desa / Kelurahan : Ciiliten, Jalan Mayjen Sutoyo

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 48-2-35.088-12-4-B-C/1-2

Lembar : 48/48-49 (72) Kotak : E/5-I

Kedaaan Tanah : Tanah non pertanian diatasnya berdiri bangunan berupa Sarana Lingkungan (Jalan, Taman, dll)

Tanda-tanda batas : Telah Sesuai dengan PMNA No.3 Tahun 1997

Luas : 4.657 m<sup>2</sup> (Empat ribu enam ratus lima puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan pencetakan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : Heru Triawan

Pemohon : Badan Pembinaan Hukum Nasional Cq. Kementerian Hukum dan HAM RI

Ditukir dan digambar oleh : Rio Nurdianto, S.ST





# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

# DEPARTEMEN DALAM NEGERI



## S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

- Sementara .-

- HAK PAKAI .-

BUKU-TANAH: DESA: CILILITAN.  
HAK PAKAI. No. 55.  
SURAT-UKUR: NO. \_\_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_\_  
SITUASI No.1994/1986.-

6938773  
KANTOR AGRARIA  
WILAYAH JAKARTA TIMUR.-

DEPARTEMEN DALAM NEGERI



S E R T I P I K A T

(TANDA BUKTI HAK)

WILAYAH

JAKARTA

TIMUR.-

6938773

# DEPARTEMEN DALAM NEGERI



# BUKU TANAH

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA

WILAYAH JAKARTA

TIMUR.-

KECAMATAN

KRAMAT JATI.-

DESA

CILILITAN.-

BIAYA  
Rp. 50.000.-

DAFTAR PENGHASILAN  
No. 10-DIKR/19 86

6938773 -

KANTOR AGRARIA  
WILAYAH JAKARTA

TIMUR.-

## PENDAFTARAN-PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK <b>PAKAI.</b></p> <p>No. <b>55.</b></p> <p>Desa <b>CILILITAN.</b></p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK - <b>DEPARTEMEN KEHAKIMAN.</b>-</p>										
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL <b>Jln. May Jen. Soetoyo,</b> <b>Rt. 005/014.-</b></p>	<p>g) PENDAFTARAN <b>JAKARTA,</b> Tgl. <b>13-10-1986.</b> A.n. <b>WALIKOTA/KDH</b> A.n. <b>WALIKOTA/KDH</b> <b>WILAYAH JAKARTA TIMUR.</b> <b>WILAYAH JAKARTA TIMUR.</b> Kepala Kantor Agraria Kepala Kantor Agraria u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah  <b>ttd.</b>  <b>SOEBAGIO BROTOKUSUMO</b> <b>Dr. H.M. ALI HANAFIAH</b> NIP. : 010028687 NIP. 010024521</p>										
<p>c) ASAL PERSIL 1. <del>Konversi</del> 2. Pemberian hak 3. <del>Remisahan dari</del> 4. <del>Penggabungan</del></p>	<p>h) PENGELUARAN SERTIPIKAT <b>JAKARTA,</b> Tgl. <b>17 OCT 1988</b> A.n. <b>WALIKOTA/KDH WILAYAH JAKARTA TIMUR.</b> Kepala Kantor Agraria <b>WALIKOTA JAKARTA TIMUR,</b> u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kepala Kantor Agraria</p>										
<p>d) SURAT KEPUTUSAN <b>Gub. Kep. DKI. Jakarta /</b> <b>Ka. Dit. Agraria tgl.</b> <b>5-10-1986 No. 1326/293/-</b> <b>I/HP/T/1/1986.-</b></p> <p>Ganti rugi/uang wajib / Uang Pemas. Rp. 150.000,-</p> <p>Lamanya hak berlaku <b>Selama diper-</b> <b>gunakan untuk kepentingan</b> Berakhir <b>Dinas.-</b></p>	<p>i) PENUNJUK <b>Tanah Negara, Bekas Milik Adat C.No.</b> <b>2355; C.2381; dan C.1041.-</b></p>										
<p>e) SURAT UKUR/URAIAN BATAS</p>	<p>j) CATATAN MENGENAI PAJAK</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Tahun</th> <th style="width: 15%;">Besarnya</th> <th style="width: 15%;">Tambah</th> <th style="width: 15%;">Pengurangan</th> <th style="width: 40%;">Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>WARKAH</b>  NO: 2972 / 1986 </div> </td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Besarnya	Tambah	Pengurangan	Catatan					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>WARKAH</b>  NO: 2972 / 1986 </div>
Tahun	Besarnya	Tambah	Pengurangan	Catatan							
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <b>WARKAH</b>  NO: 2972 / 1986 </div>							
<p>SITUASI : Tgl. <b>25-7-1986</b> No. <b>1994/1986.-</b></p> <p>Luas: <b>6691,- M<sup>2</sup>.-</b></p>											



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 22/08/23 11:01:35  
Tanggal Buku : 22/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTB : 000000731118  
NTN : 8777A61QUQTMCOII  
STAN : 194221

Data Setoran :

Kode Billing : 820230821446226  
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA BPHM  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 31.514.000,00  
Terbilang : tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX. : 87705 731118 95202  
NO. PER. : CACH  
JUMLAH : 31.514.000  
0017 - KCU JATINEGARA

22/08/2023 11:01:35



### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230821446226  
Tanggal Billing : 21-08-2023 15:36:01  
Tanggal Kedaluwarsa : 28-08-2023 15:36:01  
Tanggal Bayar : 22-08-2023 11:01:35  
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : Teller  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 31.514.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **000000731118**  
**NTPN** : **8777A61QUQTM0II**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 31.514.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa Kantin BPHN



## BUKTI PENERIMAAN NEGARA

### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820230821446226  
Tanggal Billing : 21-08-2023 15:36:01  
Tanggal Kedaluwarsa : 28-08-2023 15:36:01  
Tanggal Bayar : 22-08-2023 11:01:35  
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA  
Channel Bayar : *Teller*  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN  
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Total Disetor : 31.514.000 (IDR)  
Terbilang : *Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu (IDR)*  
Status : Sudah Dibayar  
**NTB** : **000000731118**  
**NTPN** : **8777A61QUQTMCOII**

### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 31.514.000 (IDR)  
Keterangan : Sewa Kantin BPHN



Data Pembayaran :

Tanggal dan Jam Bayar : 22/08/23 11:01:35  
Tanggal Buku : 22/08/23  
Kode Cabang Bank : 37  
KCU JATINEGARA

NTB : 000000731118  
NTN : 8777A61QUQTMCOII  
STAN : 194221

Data Setoran :

Kode Billing : 820230821446226  
Nama Wajib Bayar : BENDAHARA BPHM  
Kementerian / Lembaga : 013  
Unit Eselon I : 10  
Satuan Kerja : 409288  
Jumlah Setoran : 31.514.000,00  
Terbilang : tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah

Mata Uang : IDR

*This is a computer generated message and requires no signature*

*Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan*

*Jika tidak terdapat nomor NTPN, transaksi sedang dalam proses*

*Silakan kunjungi Cabang terdekat untuk mendapatkan nomor NTPN Anda dan cetak ulang bukti transaksi*



NO. TRX. : 87705 731118 95202  
NO. PER. : CACH  
JUDULAI : 31.514.000  
0017 - KCU JATINEGARA

22/08/2023 11:01:35



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
Jl. Mayjen. Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640  
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753  
Laman. www.bphn.go.id

**SURAT PERJANJIAN SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN  
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: PHN.1-PB.03.01-34**

Pada hari ini Selasa tanggal dua belas Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Constantinus Kristomo  
Jabatan : Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Alamat : Jl. Mayjen Soetoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama : Ivo Hetty N Nainggolan  
Jabatan : Ketua Koperasi Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Alamat : Jl. Mayjen Soetoyo No.10 Cililitan Jakarta Timur

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM selaku pemakai/penyewa kantin Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa/pemanfaatan bangunan untuk usaha kantin dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1  
SARANA DAN PRASARANA**

1. PIHAK PERTAMA telah menyediakan sarana dan prasarana berupa bangunan yang disewakan kepada pihak kedua untuk usaha kantin, diisi/berjualan makanan dan minuman sehari-hari dengan menyewa bangunan seluas 60 meter persegi;
2. PIHAK KEDUA bersedia mengisi berjualan makanan dan minuman sehari-hari untuk keperluan para pegawai dan tamu pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **Pasal 2 JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu perjanjian sewa bangunan untuk kegiatan kantin telah disepakati oleh para pihak selama 2 (dua) tahun, dengan sistem pembayarannya dilakukan dimuka dengan bukti kwitansi setor pada kas negara;
2. Surat perjanjian ini berlaku mulai tanggal 1 (satu) bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan 30 (tiga puluh) bulan September tahun 2025.
3. Bila kemudian hari akan memperpanjang sewa bangunan untuk kantin, maka 3 (tiga) bulan sebelum masa/jangka waktu berakhir, PIHAK KEDUA akan menyampaikan pengajuan perpanjangan sewa kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan surat permohonan.

## **Pasal 3 NILAI SEWA**

Dengan mengacu Surat Menteri Keuangan Nomor : S-122/MK.6/KNL.07.04/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, para PIHAK sepakat dengan perjanjian sewa sebagai berikut :

1. Nilai sewa untuk jangka waktu tersebut di atas dalam Pasal 2, telah disepakati oleh para pihak. PIHAK KEDUA membayar sewa kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp.31.514.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) dengan bukti setor sah berupa kwitansi bermaterai;
2. Nilai sewa seluruhnya Rp.31.514.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah) disetor ke kas negara RI oleh bendahara pengeluaran dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil sewa bangunan untuk usaha kantin pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

## **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab :

1. PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan bangunan yang disewa untuk kegiatan usaha;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan bangunan yang disewa;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara yang disewa selama jangka waktu;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan barang milik negara yang disewa kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan kondisi semula;
5. Bila terjadi kerusakan sarana dan prasarana pada bangunan yang disewakan seperti atap bocor, plafon rusak, kran air, bohlam putus, wastafel, meja kursi dan sarana kebersihan kantin maka perbaikan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 5  
FORCE MAJEUR**

Apabila terjadi huru-hara, gempa bumi atau bencana alam yang mengakibatkan rusak atau hancurnya sarana bangunan maka menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sedangkan isi kantin menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

**Pasal 6  
PERSELISIHAN DAN PENYELESAIAN**

1. Semua perselisihan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan perjanjian sewa menyewa diselesaikan dengan cara musyawarah;
2. Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka akan diselesaikan melalui pengadilan dan sepakat memilih domisili yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Perjanjian sewa ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi cap.

Jakarta, 12 September 2023

PIHAK PERTAMA  
Plt. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional



Constantinus Kristomo  
NIP. 197404111999031001

PIHAK KEDUA  
Penyewa



Ivo Hetty N Nainggolan



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-08**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,741,425,000	47,741,425,000	0
2	Belanja	29,367,853,008	29,367,853,008	0
3	Pengembalian Belanja	-10,943,046	-10,943,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	31,514,000	31,514,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	836,500,000	836,500,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	836,500,000	836,500,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 05-SEP-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-04**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,741,425,000	47,741,425,000	0
2	Belanja	14,122,808,905	14,122,808,905	0
3	Pengembalian Belanja	-3,341,443	-3,341,443	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	765,258,600	765,258,600	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	765,258,600	765,258,600	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 29-MAY-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	48,886,291,000	48,886,291,000	0
2	Belanja	48,381,791,127	48,381,791,127	0
3	Pengembalian Belanja	-36,131,389	-36,131,389	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,277,500	58,277,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23-JAN-24*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-07**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,741,425,000	47,741,425,000	0
2	Belanja	26,164,615,815	26,164,615,815	0
3	Pengembalian Belanja	-10,517,046	-10,517,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	890,000,000	890,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	890,000,000	890,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-AUG-23*







**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,741,425,000	47,741,425,000	0
2	Belanja	21,579,498,866	21,579,498,866	0
3	Pengembalian Belanja	-10,517,046	-10,517,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,000,000,000	1,000,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,000,000,000	1,000,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 03-JUL-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-05**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	47,741,425,000	47,741,425,000	0
2	Belanja	17,132,853,691	17,132,853,691	0
3	Pengembalian Belanja	-5,437,138	-5,437,138	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	981,000,000	981,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	981,000,000	981,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 01-JUN-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	48,886,291,000	48,886,291,000	0
2	Belanja	41,995,092,148	41,995,092,148	0
3	Pengembalian Belanja	-10,943,046	-10,943,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,277,500	58,277,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 12-DEC-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	48,886,291,000	48,886,291,000	0
2	Belanja	37,477,244,437	37,477,244,437	0
3	Pengembalian Belanja	-10,943,046	-10,943,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	31,514,000	31,514,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	721,700,000	721,700,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	721,700,000	721,700,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-NOV-23*





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN  
PADA SATKER 409288  
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	49,436,291,000	49,436,291,000	0
2	Belanja	32,143,840,886	32,143,840,886	0
3	Pengembalian Belanja	-10,943,046	-10,943,046	0
4	Estimasi Pendapatan	20,000,000	20,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	31,514,000	31,514,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	720,000,000	720,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	720,000,000	720,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

*Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-OCT-23*





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640

Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini, Jum'at 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran BAST RPATA sebesar Rp. 589.375.493 (Lima ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan adanya pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/SP2D di Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang BAST RPATA sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640

Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini, Jum'at 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2023 dengan ID Pelanggan 547100163555 sebesar Rp.59.552.282,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian listrik bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang pemakaian listrik sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640

Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini, Jum'at 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.  
Jabatan : Koordinator Keuangan  
Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian listrik bulan Desember 2023 dengan ID Pelanggan 547100717100 dan 547102931079 sebesar Rp. 37.728.322,- (Tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian listrik bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, hutang pemakaian listrik sebagaimana tersebut di atas akan kami selesaikan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Jalan May.Jen Sutoyo – Cililitan Jakarta 13640

Tlp. (021) 8091908 – Faksimili (021) 8002265 – 801175525 Website : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HUTANG

Pada hari ini, Jum'at 29 Desember 2023 yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tuyono, S.H.

Jabatan : Koordinator Keuangan

Alamat : Jl. Mayjend Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bahwa Badan Pembinaan Hukum Nasional telah berhutang atas pembayaran pemakaian telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp. 972.858 (Sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun hal tersebut dikarenakan pemakaian telepon bulan Desember 2023 ditagihkan pada bulan Januari 2024.

Demikian surat pernyataan pengakuan hutang ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan,  
  
Tuyono, S.H.  
NIP. 197006151997031001

PT PLN (Persero)  
Unit Induk Distribusi Jakarta Raya  
UP3 Kramat Jati  
Jl. Raya Bogor KM 20 Jakarta Timur 13520

2.007.1

NO: 0009 /AGA.04.01/F06100000/2024

## KUITANSI

NO. KONTRAK: 547100163555

Diterima dari : KANTOR BPHN  
Alamat : JL JL MAY JEND SUTOYO

Uang Sejumlah Terbilang :

**#lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah #**

Untuk Pembayaran : Rekening Listrik Bulan Januari 2024

Jakarta, 04 Januari 2024

**MANAGER**



BANK DKI CAB. UTAMA JUANDA  
Nomor Virtual Account : **9901235471002500**

AN. PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT  
NPWP : **01.001.629.3.051.000**

---

RP TOTAL : **Rp 59,552,282,-**

Nomor : 0009/AGA.04.01/F06100000/2024  
Lampiran : 1 Set  
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

04 Januari 2024  
Kepada  
Yth. BPHN  
JL JL MAY JEND SUTOYO  
2.007.1

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr telah menjadi pelanggan setia PLN UP3 Kramat Jati. Semoga PLN UP3 Kramat Jati dapat terus mendukung kesuksesan Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan pemakaian aliran listrik pada alamat yang menjadi tanggungan Instansi Saudara, bersama ini kami sampaikan Nota Tagihan sebagai berikut:

No	ID PEL	Nama	Tarif	Daya	Bln/Thn	RP TAG
1	547100163555	KANTOR B P H N	P2	630000	Januari 2024	<b>59,552,282</b>
<b>TOTAL</b>						<b>59,552,282</b>

1. Batas jatuh tempo pembayaran tagihan listrik adalah tanggal 20 setiap bulan. Untuk pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan ke rekening:

**Nama Bank** : **BANK DKI CABANG UTAMA JUANDA**  
**Nama Pemilik Rekening** : **PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT**  
**Nomor Virtual Account** : **9901235471002500**  
**NPWP** : **010016293051000**

2. Setelah melakukan pembayaran mohon mengirimkan/menginformasikan bukti pembayaran (SP2D atau bukti pembayaran lainnya) sebelum tanggal 20 setiap bulan ke PLN melalui email ke [SINTA.WULANDARI@pln.co.id](mailto:SINTA.WULANDARI@pln.co.id) / [plnkramatjati20@gmail.com](mailto:plnkramatjati20@gmail.com) atau melalui whatsapp ke nomor 087741026951 (Sdr. Hendi) guna proses pengecekan dan *flag* pelunasan.

3. Pembayaran tagihan listrik di awal waktu sebelum tanggal 20 setiap bulan akan memberikan kenyamanan bagi Bapak/Ibu karena terhindar dari risiko sanksi pemutusan sementara aliran listrik dan turut serta dalam kontribusi pembangunan daerah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER  
PT. PLN UP3 KRAMAT JATI,



ADITYA YOGA NUGRAHA

Nomor : 0009/AGA.04.01/F06100000/2024  
Lampiran : 1 Set  
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

04 Januari 2024  
Kepada  
Yth. BPHN  
JL JL MAY JEN SUTOYO  
2.007.2

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr telah menjadi pelanggan setia PLN UP3 Kramat Jati. Semoga PLN UP3 Kramat Jati dapat terus mendukung kesuksesan Bapak dan Ibu. Sehubungan dengan pemakaian aliran listrik pada alamat yang menjadi tanggungan Instansi Saudara, bersama ini kami sampaikan Nota Tagihan sebagai berikut:

No	ID PEL	Nama	Tarif	Daya	Bln/Thn	RP MAT	RP TAG
1	547100717100	BADAN PEMB HUKUM NAS	P1	16400 0	Januari 2024	10000	<b>18,343,680</b>
2	547102931079	SJDI HUKUM	P1	14700 0		10000	<b>19,384,642</b>
3							
4							
<b>TOTAL</b>							<b>37,728,322</b>

1. Batas jatuh tempo pembayaran tagihan listrik adalah tanggal 20 setiap bulan. Untuk pembayaran tagihan dapat dilakukan dengan transfer/pemindahbukuan ke rekening :

**Nama Bank** : **BANK DKI CABANG UTAMA JUANDA**  
**Nama Pemilik Rekening** : **PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT**  
**Nomor Virtual Account** : **9901235471002500**  
**NPWP** : **010016293051000**

2. Setelah melakukan pembayaran mohon mengirimkan/menginformasikan bukti pembayaran (SP2D atau bukti pembayaran lainnya) sebelum tanggal 20 setiap bulan ke PLN melalui email ke [SINTA.WULANDARI@pln.co.id](mailto:SINTA.WULANDARI@pln.co.id) / [plnkramatjati20@gmail.com](mailto:plnkramatjati20@gmail.com) atau melalui whatsapp ke nomor 087741026951 (Sdr. Hendi) guna proses pengecekan dan *flag* pelunasan.

3. Pembayaran tagihan listrik di awal waktu sebelum tanggal 20 setiap bulan akan memberikan kenyamanan bagi Bapak/Ibu karena terhindar dari risiko sanksi pemutusan sementara aliran listrik dan turut serta dalam kontribusi pembangunan daerah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAGER  
PT. PLN UP3 KRAMAT JATI,



ADITYA YOGA NUGRAHA

PT PLN (Persero)  
Unit Induk Distribusi Jakarta Raya  
UP3 Kramat Jati  
Jl. Raya Bogor KM 20 Jakarta Timur 13520

2.007.2

No: 0009/AGA.04.01/F06100000/2024

## KUITANSI

NO. KONTRAK: 547100717100,547102931079,

Diterima dari : KANTOR BPHN  
Alamat : JL JL MAY JEN SUTOYO

Uang Sejumlah Terbilang :

**# tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah #**

Untuk Pembayaran : **Rekening Listrik Bulan Januari 2024**

Jakarta, 04 Januari 2024  
**MANAGER**



BANK DKI CAB. UTAMA JUANDA  
Nomor Virtual Account : **9901235471002500**

AN. PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT  
NPWP : **01.001.629.3.051.000**

---

RP TOTAL : **Rp 37,728,322,-**



Kepada Yth : KANTOR B P H N JL JL MAY JEND SUTOYO 0	Id Pelanggan : 547100163555 Rekening Bulan : 01-2024 Tarif / Daya : P2 / 630,000 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKM kWh/kVarh/FRT : 800 / 800 / 1 FKM kWh/kVarh/FRT LM : 800 / 800 / 1 Jam Nyalaa / Fak K : 63
No Invoice : 547100163555-0124 NPWP : 00.026.588.4-005.000 Nama Sesuai NPWP : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BAD Alamat Sesuai NPWP : JL MAYJEN SUTOYO 010 004 014	
NIK : 1771043003910003	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2024	3,422.560	215.590		2,162.050
St Awal	01-12-2023	3,376.520	212.350		2,133.360
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM * FRT		36,832.000	2,592.000		22,952.000
Pemakaian kWh Total		36,832.000	2,592.000	39,424.000	22,952.000

**Biaya pemakaian sebelum subsidi** Rp **1.424,53**  
**Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya** Rp **58.006.862**

I Penyerahan Listrik  
1. Pendapatan Biaya Beban Rp 0  
2. Pendapatan Biaya Pemakaian Rp  
**Subsidi** Rp **387.655**

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	36,832	1,415.01	52,117,648	2,592	2,122.52	5,501,559	0	1,522.88	0	57,619,207
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto \* Rp 57,619,207  
4. Rupiah Kompensasi TMP Rp 0  
5. Jumlah PTL Netto Rp 57,619,207  
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 57,619,207  
7. Tagihan Lainnya Rp 0  
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 57,619,207  
9. PPN Rp 6,338,112  
Total Penyerahan Listrik Rp 57,619,207

**PPN DIBEBAKAN SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2022**

II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0  
PTL (%) x 57,619,207 Rp 0

III Penyerahan Non Listrik  
1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 1,732,500  
2. PPN Rp 190,575  
3. Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 ) Rp 0  
4. PPN Renewable Energy Certificate Rp 0  
Total Penyerahan Non Listrik Rp 1,923,075  
IV Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 59,542,282

TERBILANG  
**Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah**

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2024  
Status : BELUM LUNAS (11)  
Tanggal Bayar : //  
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0  
Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

JAKARTA, 04-01-2024  
MANAJER

Keterangan :  
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

ADITYA YOGA NUGRAHA

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
\* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



Kepada Yth : BADAN PEMB HUKUM NAS JL JL MAY JEN SUTOYO 0	Id Pelanggan : 547100717100 Rekening Bulan : 01-2024 Tarif / Daya : P1 / 164,000 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKM kWh/kVarh : 50 / 50 FKM kWh/kVarh LM : 50 / 50 Jam Nyalaa / Fak K : 66
No Invoice : 547100717100-0124 NPWP : 00.026.588.4-005.000 Nama Sesuai NPWP : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BAD Alamat Sesuai NPWP : JL MAYJEN SUTOYO 010 004 014	
NIK : 3216052107040007	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2024	13,456.520	0.000		0.000
St Awal	01-12-2023	13,240.770	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		10,787.500	0.000		
Pemakaian kWh Total		10,787.500	0.000	10,787.500	0.000

**Biaya pemakaian sebelum subsidi** Rp **1.706,31**  
**Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya** Rp **18.406.819**

- I Penyerahan Listrik
- Pendapatan Biaya Beban Rp 0
  - Pendapatan Biaya Pemakaian Rp
- Subsidi** Rp **73.139**

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	10,787.50	1,699.53	18,333,680	0		0	0	0	0	18,333,680
B										
C										
D										

- Rupiah PTL Bruto \* Rp 18,333,680
  - Rupiah Kompensasi TMP Rp 0
  - Jumlah PTL Netto Rp 18,333,680
  - Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 18,333,680
  - Tagihan Lainnya Rp 0
  - Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 18,333,680
  - PPN Rp 2,016,704
- Total Penyerahan Listrik Rp 18,333,680

**PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2022**

II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0  
PTL (%) x 18,333,680 Rp 0

- III Penyerahan Non Listrik
- Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
  - PPN Rp 0
  - Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 ) Rp 0
  - PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
- Total Penyerahan Non Listrik Rp 0

IV Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 18,333,680

TERBILANG  
**Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah**

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2024  
Status : BELUM LUNAS (11)  
Tanggal Bayar : //  
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0  
Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

JAKARTA, 04-01-2024  
MANAJER

Keterangan :  
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

ADITYA YOGA NUGRAHA

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.  
\* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



Kepada Yth : SJDI HUKUM JL JL MAYJEND SUTOYO 0	Id Pelanggan : 547102931079 Rekening Bulan : 01-2024 Tarif / Daya : P1 / 147,000 VA Tarif / Daya Lama : / 0 VA FKM kWh/kVarh : 50 / 50 FKM kWh/kVarh LM : 50 / 50 Jam Nyalaa / Fak K : 78
No Invoice : 547102931079-0124 NPWP : 00.026.588.4-005.000 Nama Sesuai NPWP : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL BAD Alamat Sesuai NPWP : JL MAYJEN SUTOYO 010 004 014	
NIK : 3175090611030001	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-01-2024	15,011.490	0.000		0.000
St Awal	01-12-2023	14,783.490	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		11,400.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		11,400.000	0.000	11,400.000	0.000

**Biaya pemakaian sebelum subsidi** Rp **1.706,31**  
**Total Pendapatan Biaya Pemakaian sebelum subsidi di luar biaya beban dan lainnya** Rp **19.451.934**

- I Penyerahan Listrik
- Pendapatan Biaya Beban Rp 0
  - Pendapatan Biaya Pemakaian Rp
- Subsidi** Rp **77.292**

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A	11,400	1,699.53	19,374,642	0		0	0	0	0	19,374,642
B										
C										
D										

- Rupiah PTL Bruto \* Rp 19,374,642
  - Rupiah Kompensasi TMP Rp 0
  - Jumlah PTL Netto Rp 19,374,642
  - Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 19,374,642
  - Tagihan Lainnya Rp 0
  - Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 19,374,642
  - PPN Rp 2,131,210
- Total Penyerahan Listrik Rp 19,374,642

**PPN DIBEBAKAN SESUAI PP NOMOR 49 TAHUN 2022**

- II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0
- PTL (%) x 19,374,642 Rp 0
- III Penyerahan Non Listrik
- Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
  - PPN Rp 0
  - Renewable Energy Certificate ( 0 unit x Rp 0 ) Rp 0
  - PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
- Total Penyerahan Non Listrik Rp 0
- IV Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 19,374,642

TERBILANG  
**Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah**

Batas Akhir Masa Bayar 20 Januari 2024  
Status : BELUM LUNAS (11)  
Tanggal Bayar : //  
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0  
Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

JAKARTA, 04-01-2024  
MANAJER

Keterangan :  
A = Tarif/Daya Baru TTL Baru  
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru  
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama  
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

ADITYA YOGA NUGRAHA

1. Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2021.

\* Sudah termasuk stimulus/relaksasi



# SURAT PENGAKUAN HUTANG (SPH / L-15)

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPKUMHAM  
 BULAN : JANUARI 2024  
 ( PEMAKAIAN BULAN : DESEMBER 2023 )  
 JASA TELEKOMUNIKASI

02D0063

**PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
 UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA  
 AREA JAKARTA**

DEPARTEMEN : KEMENTERIAN  
 UNIT ORGANISASI : KEHAKIMAN  
 SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN HUKUM  
 NASIONAL DEPKUMHAM  
 SERVIS AREA : JAKARTA

No.C.TEL.01/KU.370/DGS-B30002000/2024

NO	NO. KWIT	NO. TELP	NO. PLG	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	JASMITA	TAGIHAN	PPN	JML TAGIHAN
1	2401A055282520001	0218011751	1751541	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
2	2401A055282550001	0218011752	1751551	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
3	2401A055282540001	0218011753	1751561	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
4	2401A055282560001	0218011755	1751581	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	1.000	33.600	3.696	37.296
5	2401A055282560005	0218016939	1751581	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
6	2401A055282560006	0218016940	1751581	BPHN DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
7	2401A055340390006	0218011754	1809431	B P H N DEP KEHAKIMAN RI	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
8	2401A055340390005	0218091908	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
9	2401A055340390007	0218092336	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
10	2401A055340390008	0218002192	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	42.600	0	750	0	2.550	45.900	5.049	50.949
11	2401A055340390009	0218002265	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	21.750	750	0	9.250	64.350	7.078	71.428
12	2401A055340390011	02180871747	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
13	2401A055340390012	02180871748	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
14	2401A055340390013	02180871741	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
15	2401A055340390014	02180871742	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
16	2401A055340390015	02180871743	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	4.750	0	2.000	39.350	4.328	43.678
17	2401A055340390016	02180871744	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
18	2401A055340390017	02180871745	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
19	2401A055340390018	02180871746	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN	32.600	717	3.250	0	33.550	70.117	7.712	77.829

**PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA  
UNIT ENTERPRISE REGIONAL II JAKARTA  
AREA JAKARTA**

DEPARTEMEN : KEMENTERIAN  
UNIT ORGANISASI : KEHAKIMAN  
SATUAN KERJA : BADAN PEMBINAAN HUKUM  
NASIONAL DEPKUMHAM  
SERVIS AREA : JAKARTA

No.C.TEL01/KU.370/DGS-B30002000/2024

NO	NO. KWIT	NO. TELP	NO. PLG	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	JASNITA	TAGIHAN	PPN	JML TAGIHAN
20	2401A055340390003	0218090192	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN U/ BADAN	32.600	0	0	0	0	32.600	3.586	36.186
21	2401A055340390004	0218092250	1809431	DEPARTEMEN KEHAKIMAN U/ BADAN	32.600	43.540	22.944	18.869	16.181	134.134	14.754	148.888
<b>TOTAL</b>					<b>694.600</b>	<b>66.007</b>	<b>32.444</b>	<b>18.869</b>	<b>64.531</b>	<b>876.451</b>	<b>96.407</b>	<b>972.858</b>
<b>METERAI</b>												<b>0</b>
<b>GRAND TOTAL</b>												<b>972.858</b>

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :  
Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 972.858  
**(Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)**  
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

JAKARTA, JANUARI 2024

Mengetahui / Menyetujui  
PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk



RAHMALIA DINI PUTRANTI  
SM PLANNING PERFORMANCE & SUPPORT

**LAYANAN PEMBAYARAN PEM / TNI & POLRI**

Sudah terima dari : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI  
Uang sebanyak : **sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah**  
Untuk pembayaran : **JASA TELEKOMUNIKASI Tagihan Bulan JANUARI 2024**  
(Daftar Rincian Terlampir)

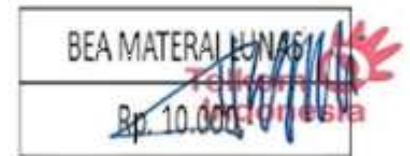
Atas Nama : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL&nbsp;&KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI

Rp.972,858

Jakarta, JANUARI -2024

**BANK BRI - Bank BRI Kantor Kas Menara Kebun Sirih**  
REK. NO 7711114002004523  
**a/n PT Telekomunikasi Indonesia Enterprise**  
NPWP 01.000.013.1-093.000

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk



Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas berdasarkan Penetapan Pemungut Bea Meterai sesuai Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor S-27/PBM/PJ/2021, tanggal 21 Desember 2021.

**RAHMALIA DINI PUTRANTI**  
SM PLANNING PEFORMANCE  
SUPPORTDivisi Government Service

## Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-24.67590417		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA(PERSERO) Tbk		
Alamat : JALAN JAPATI NO. 1 , KOTA BANDUNG		
NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI		
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo, Cililitan, Kramatjati, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13640		
NPWP : 00.026.588.4-005.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telekomunikasi No. Invoice 422024010100002T10380001 Rp. 876.451 x 1	876.451
Harga Jual / Penggantian		876.451
Dikurangi Potongan Harga		0.00
Dikurangi Uang Muka		0.00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		96.407
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0.00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat jendral pajak mengatur bahwa pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada faktur ini

KOTA BANDUNG, 01 January 2024



SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan pasal 14 ayat (4) UU KUP.